

GERAKAN KOMUNIS DI MALAYA :

KAJIAN TENTANG TAKTIK DAN STRATEGI

PARTAI KOMUNIS MALAYA 1948 – 1960



S K R I P S I

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra
pada program studi Sejarah dan Arkeologi
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin**

Oleh :

WASITAH BINTI DARUS

Nim : 90 07 380

**JURUSAN SEJARAH DAN ARKEOLOGI
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1994

PUSTAKA PERDANA



1009346

" Sesungguhnya kejadian ruang angkasa dan bumi, silih bergantinya malam dan siang , bahtera yang berlayar di laut membawa keperluan manusia, dan air hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tandus, dan Dia kembang biakkan di bumi itu binatang - binatang yang melata (termasuk manusia) dan perkibaran angin dan awan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh-sungguh mewujudkan tanda - tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan "

Al Quran : Surah Al Baqarah: 164


UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, tanggal 19 Februari 1994 No. 378/PT04.H5.FS/C/1994, maka dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

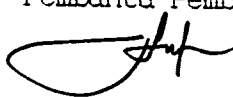
Ujungpandang, 30 Mei 1994.

Pembimbing Utama,



(DR. Edward L. Poelinggomang, M.A)

Pembantu Pembimbing,



(Drs. Bambang Sulistyono, M. Hum)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Skripsi

Dekan,

u.b Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi



Drs. Daud Limbuqau, S.U

NIP: 130 190 505

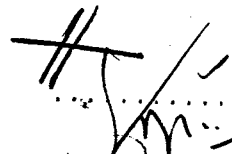
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

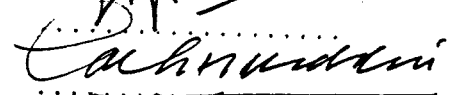
Pada hari ini Senin, tanggal 13 Juni 1994, Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul: *GERAKAN KOMUNIS DI MALAYA (KAJIAN TENTANG TAKTIK DAN STRATEGI PARTAI KOMUNIS MALAYA 1948 - 1960)*, yang diajukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sejarah, pada Jurusan Sejarah dan Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

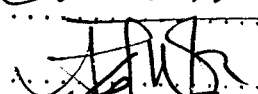
Ujung Pandang, 13 Juni 1994

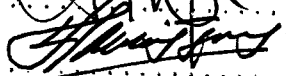
PANITIA UJIAN SKRIPSI


- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Hamzah A. Machmoed, M.A. | Ketua |
| 2. Drs. Daud Limbugau, S.U | Sekretaris |
| 3. Drs. Baharuddin Batalipu | Penguji I |
| 4. Drs. Anwar Thosibo, M. Hum. | Penguji II |
| 5. DR. Edward L. Poelinggomang, M.A. | Anggota |
| 6. Drs. Bambang Sulistyono, M. Hum. | Anggota |

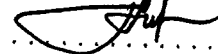












KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirahhim.

Pertama-tama puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk merampung tugas ini. Walaupun tidak sedikit hambatan dan kendala yang penulis temukan, namun syukur Alhamdulillah karena hanya dengan rahman dan rahim-Nyalah sehingga naskah skripsi yang sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dalam waktu yang telah di rencanakan.

Skripsi yang berjudul *GERAKAN KOMUNIS DI MALAYA (KAJIAN TENTANG TAKTIK DAN STRATEGI PARTAI KOMUNIS MALAYA 1948-1960)* ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sejarah, pada Jurusan Sejarah & Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Hassanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan hambatan yang ditemukan dalam merampung tugas akhir ini. Terutama menyangkut sumber-sumber dan literatur yang berhubungan dengan objek kajian. Karena itu tentu banyak kelemahan dan kekurangan di sana sini, baik isi maupun analisisnya. Dengan demikian, kritik dan saran-saran yang membina dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya.

Walaupun tidak sedikit kendala yang hambatan yang penulis temukan selama penulisan skripsi ini, namun berkat adanya kerjasama, bantuan dan dorongan yang diiringi oleh tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh,

D A F T A R I S I

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstract	xiii
Peta Malaya (Federation of Malaya) 1948-1960.	xv
BAB I P E N D A H U L U A N	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Batasan Masalah	7
C. Metodologi	10
BAB II KAJIAN AWAL KONDISI SOSIO-POLITIK DAN EKONOMI MALAYA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA	18
A. Imperialisme dan Politik Kolonial Inggris	18
B. Transformasi Ekonomi	24
C. Tumbuh dan Berkembangnya Masyarakat Majemuk	28
D. Gerakan-Gerakan Politik di Malaya Sebelum Perang Dunia Kedua	34
BAB III PERKEMBANGAN GERAKAN KOMUNIS DI MALAYA	44
A. Awal Perkembangan Komunisme di Malaya	44
B. PKM dan Kegiatannya Sewaktu Pendudukan Jepang di Malaya 1941-1945	53
C. Gerakan Komunis di Malaya Pasca Perang 1945 - 1948	60

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dalam waktu yang direncanakan. Baik secara langsung maupun tidak langsung penulis telah mendapat bantuan, kerjasama dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan, kerjasama dan dorongan yang tidak henti-hentinya itu, skripsi ini tentunya tidak dapat terwujudkan seperti bentuknya yang sekarang ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini sudah sewajarnya penulis menghatur ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membina penulis selama ini.

Ungkapan rasa kasih sayang dan penuh hormat saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Darus Bin Haji Hassan dan Ibunda Sukeah Binti Abdullah, yang telah memelihara dan mendidik dengan baik mulai dari kandungan Ibunda yang tersayang sampai dewasa seperti sekarang. Merekalah orang yang pertama membekali saya harapan hidup yang paling berharga dan bermakna. Semoga Allah SWT dapat mengampuni dosa-dosanya dan mengasihinya mereka sebagaimana kasihnya kepada saya selama ini.

Saya sangat berhutang budi kepada pembimbing-pembimbing saya yang terhormat, Bapak DR. Edward L. Poelinggomang, M.A., selaku Pembimbing Utama dan Drs. Bambang Sulistyono, M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing atas bimbingan yang ramah, menyejukkan hati, dan penuh motivasi, namun tetap korektif. Prilaku bimbingan dan motivasi sedemikian itulah yang menyebabkan saya memperoleh hasil penelitian seperti ini. Banyak pertimbangan dan saran akademis yang belum dapat saya penuhi dalam tulisan ini. Namun demikian saya berbahagia karena telah memperoleh bekal dan pedoman bagi

kegiatan selanjutnya.

Bapak Prof. Dr. Nadjamuddin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, yang telah membekali saya berbagai pengalaman baik, dalam hal akademik maupun non akademik yang sangat bermanfaat dan senantiasa turut memberikan perhatian dalam memecahkan berbagai persoalan akademik yang dihadapi. Pada kesempatan ini perkenankan saya dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Uluran tangan beliau pada waktu saya membutuhkan pegangan kuat, memberikan kesan yang sangat dalam bagi saya sebagai seorang murid yang tahu berterima kasih.

Saya juga tidak pernah melupakan jasa-jasa baik Rektor Universitas Hasanuddin (UNHAS), Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, M.A., Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Drs. Daud Limbugau, S.U, dan para staff akademik, Dr. Mukhlis Paeni, Prof. Dr. H. Mattulada, Prof. Dra. Ny. Marrang P. M.Sc., Dr. Arlina G. Latief, M.Sc., Drs. Suriadi Mappangara, Drs. Anwar Thosibo, M. Hum., Drs. Baharuddin Batalipu, Drs. Abd. Latif, Drs. Abd. Rasyid, Dra. Nya. Margaretha Lapia, M.S., beserta para staff akademik dan administrasi di lingkungan Fakultas Sastra, atas segala kearifan, keteladanan, fasilitas, serta pelayanan sebaik-baiknya yang telah diberikan kepada saya beberapa waktu selama menimba ilmu di kampus Universitas Hasanuddin.

Ucapan yang sama saya sampaikan kepada Pengarah Jabatan Penuntut Malaysia di Indonesia, Bahagian Pendidikan, Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, beserta staf administrasi yang telah memberikan perhatian dan bantuan secara maksimal, baik moral maupun material kepada saya selama

Saya juga sangat berterima kasih dan tidak pernah melupakan jasa-jasa baik pemerintah Malaysia, khususnya kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA), atas kearifannya mengirim dan membekali penulis dengan beasiswa untuk biaya perkuliahan selama menimba ilmu di kampus Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini juga saya ingin merekam rasa terhutang budi, terima kasih dan penghargaan kepada pihak Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Perpustakaan Universiti Malaya Kuala Lumpur, Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Perpustakaan Daerah Kuala Pilah dan Perpustakaan Sekolah Menengah Batu Kikir Negeri Sembilan Darul Khusus, serta Perpustakaan Pusat, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, atas segala bantuan, perhatian, kearifan, fasilitas, serta pelayanan sebaik-baiknya yang telah diberikan selama penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saya merasa perlu pada kesempatan ini untuk turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Malaysia di Indonesia, Cabang Ujung Pandang yang menjadi bagian dari keluarga selama di perantauan, serta rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, atas pemupukan rasa persaudaraan dan solidaritas yang begitu akrab untuk saling berbagi rasa dan pengalaman suka duka hidup di perantauan.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada semua keluarga, handai tolan dan kepada semua pihak yang telah pernah memberi-

kan bantuan, dorongan, dan doa restu selama saya mengikuti pendidikan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya di sini.

Akhirnya, saya curahkan perasaan berhutang budi dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada Kekanda Mohd Nizam Bin Ismail, atas bantuan, dan dorongan yang tiada henti, dan senantiasa tampil sebagai guru dan teman terdekat baik dalam kegiatan penelitian, maupun dalam menangani segala permasalahan baik suka maupun duka selama penulis di Indonesia. Ucapan yang sama disampaikan juga kepada seisi keluarga di tanah air, terutama kepada Kekanda Zulkifli dan Mohd Raof sekeluarga, dan adik-adik tersayang Habibah dan Siti Hajar serta Siti Suraya yang ditinggalkan bertahun-tahun di Malaysia tanpa menghiraukan rasa rindu untuk melepaskan penulis mencari ilmu di rantau orang. Terima kasih dan penghargaan saya yang paling dalam atas segala pengorbanan, kasih sayang, kecintaan, kesabaran, dorongan moral dan doa selama saya menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin. Apa yang saya peroleh ini merupakan titik kulminasi usaha dan doa bersama keluarga, yang merupakan kebahagiaan dan rahmat tersendiri buat saya.

Harapan saya semoga karya ini diterima oleh semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sebagai wujud penghargaan dan terima kasih saya. Selain diharapkan dapat bermanfaat demi kepentingan dan pengembangan ilmu, Insyaallah.

Makassar, 25 Mei 1994.

(Wasitah Binti Darus)

BAB IV	TANTANGAN DAN PERJUANGAN: PARTAI KOMUNIS MALAYA 1948 - 1960	75
A.	Latarbelakang Pengumuman Keadaan Darurat	75
B.	Kebijaksanaan Pemerintah: Tantangan Bagi Perjuangan Komunis	81
	B.I Periode 1948-1949	81
	B.II Periode 1950-1954	84
	B.III Periode 1955-1960	90
C.	Strategi dan Taktik Partai Komunis Malaya (PKM) 1948-1960	95
	C.I -- Periode 1948-1949	95
	C.II Periode 1950-1954	102
	C.III Periode 1955-1960	107
BAB V	TINJAUAN AKHIR	118
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130

DAFTAR SINGKATAN

xi

AMCJA	- <i>All Malayan Council Joint Action/Majelis Tindakan Bersama Se-Malaya.</i>
API	- Angkatan Pemuda Insaf
AWAS	- Angkatan Wanita Sadar
BMA	- <i>British Military Administration/ Pemerintahan Tentara Inggris di Malaya.</i>
CJA	- <i>Council of Joint Action/ Majelis Tindakan Bersama.</i>
COMINTERN	- <i>Communist International/ Organisasi Komunis International</i>
GLTU	- <i>General Labour Trade Union.</i>
KMM	- Kesatuan Melayu Muda.
KMS	- Kesatuan Melayu Singapura.
KMT	- Kaomintang.
MCKK	- <i>Malay College Kuala Kangsar/Maktab Melayu Kuala Kangsar.</i>
MPAJA	- <i>Malayan People's Anti Japanese Army/Rakyat Malaya Anti Tentara Jepang.</i>
MPAJU	- <i>Malayan People's Anti Japanese Union/Kesatuan Rakyat Malaya Anti Jepang.</i>
MIC	- <i>Malayan Indian Congress/Kongres India Se-Malaya.</i>
MPSI	- Maktab Perguruan Sultan Idris.
MRLA	- <i>Malayan Races Liberation Army/Tentara Pembebasan Bangsa-Bangsa Malaya</i>
NMB	- Negeri-Negeri Melayu Bersekutu/ <i>The Federated Malay States.</i>
NMTB	- Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu/ <i>Un-Federated Malay States.</i>
NNS	- Negeri-Negeri Selat/ <i>Straits Settlement.</i>
OCA	- <i>Old Comrades Association</i>
OCAJA	- <i>Overseas Chinese Anti Japanese Army/ Cina Seberang Laut Anti Tentara Jepang.</i>
PEMILU	- Pemilihan Umum
Pen	- Penulis
PKC	- Partai Komunis Cina.
PKI	- Partai Komunis Indonesia.
PKM	- Partai Komunis Malaya.
PKMM	- Partai Kebangsaan Melayu Malaya.
PKN	- Partai Komunis Nanyang.
PMFLTU	- <i>Pan Malayan Federation of Labour Trade Union</i>
PMFTU	- <i>Pan Malayan Federation of Trade Union.</i>
PMPK	- Persatuan Melayu Perak.
PNI	- Partai Nasional Indonesia.
PTM	- Persekutuan Tanah Melayu/ <i>The Federation of Malaya.</i>
PUTERA	- Pusat Tenaga Rakyat.
UMNO	- <i>United Malay National Organisation/Organisasi Nasional Melayu Bersatu.</i>
101 STS	- <i>101 Special Training School</i>

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Hal-Hal Pokok Yang Tercantum Dalam "The Emergency Regulations 1948"	130
2.	Causalities In Emergency 1948-1960	131
3.	Ucapan Komisaris Tinggi Inggris di Malaya, Sir Henry Gurney antara bulan Oktober-November 1949	132
4.	"Eriggs Bersedia Untuk Berperang"	133
5.	Taktik Penyelundupan Dokumen-Dokumen Komunis Selama Periode Darurat di Malaya 1950	134
6.	Malayan Communist Party Organization 1952-1958	135
7.	Data-Data Tentang Program "Kampung Baru" (New Village) (Resettlement and Regroupment)	137
8.	Sebagian Foto dari Wakil-Wakil Pemerintah dan Wakil-Wakil PKM Yang Hadir Dalam Rundingan Baling 1955	138
9.	Dokumen Hasil Rundingan Baling 1955	139
10.	Laporan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tentang Hasil Rundingan Baling 1955	140
11.	Dokumen-Dokumen Arsip Tentang Kebijakan Pemerintah Untuk Menghindari Petani-Petani Memberikan Batuan Kepada PKM	141
12.	Foto Pasukan Pengawal Kampung (Home Guards) dan Salah Satu Tugasnya Membantu Pemerintah Memberantas Komunis Selama Periode Darurat 1948-1960	142
13.	Sebagian Foto-Foto Dari Tindak Kekerasan dan Kekejaman Gerilya-Gerilya PKM 1948-1960	143
14.	Program Pembentukan "Kampung Baru"	144
15.	Pengumuman Daerah Alor Star Kedah sebagai "Kawasan Putih" Pada 20 Februari 1954	145
16.	Operasi Pemeriksaan KTP	146
17.	Upaya Penjatahan Keperluan Bahan Makanan di Malaya Selama Periode Darurat 1948-1960	147
18.	Pengumuman Berakhirnya Keadaan Darurat di Malaya: Sunday Times Tanggal 31 Juli 1960	148

A B S T R A C T

Skripsi ini mengkaji tentang taktik dan strategi Partai Komunis Malaya (PKM) untuk mencapai tujuan dan cita-cita politik di Malaya dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah mengantisipasi gerakan komunis selama periode Darurat di Malaya antara tahun 1948-1960. Penjelasan tidak hanya diarahkan untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, sejauhmana, kapan dan di mana, tetapi juga pertanyaan mengapa peristiwa pemberontakan komunis selama periode Darurat mengalami perkembangan taktik dan strategi yang bervariasi dan berubah-ubah. Pendekatan analisis dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dalam beberapa hal mempunyai fungsi integratif, yaitu berbagai kegiatan dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi terjadinya peristiwa itu. Objek kajian akan disoroti dari berbagai dimensi dengan pendekatan multidimensional. Meskipun demikian pendekatan politik lebih dominan, yaitu melihat proses politik sebagai hal yang memunculkan gejala-gejala sejarah.

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa strategi dan taktik PKM untuk memperkuat kedudukan dan menanamkan pengaruhnya dalam masyarakat seringkali disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Malaya. Selain disesuaikan dengan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menghancurkan gerakan komunis. Langkah dan upaya pemerintah untuk mengantisipasi gerakan komunis di pihak yang lain, seringkali didasarkan pada perkembangan dan kekuatan komunis dan senantiasa diselaras dan disesuaikan dengan pola perubahan yang terjadi dalam strategi dan taktik yang diatur oleh PKM.

Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah dengan taktik dan strategi PKM nampak saling mempengaruhi dan berhubungan erat. Keduanya saling mengisi dan melengkapi. Dengan kata lain, perubahan dalam taktik dan strategi komunis akan diikuti oleh perubahan kebijakan dan upaya pemerintah untuk menghancurkan komunis. Demikian sebaliknya, perubahan dalam kebijakan dan upaya pemerintah akan berakibat perubahan dalam taktik dan strategi PKM. Keduanya, saling mengatur taktik dan strategi yang tepat dan mantap dalam mencapai tujuan dan sasarnya masing-masing.

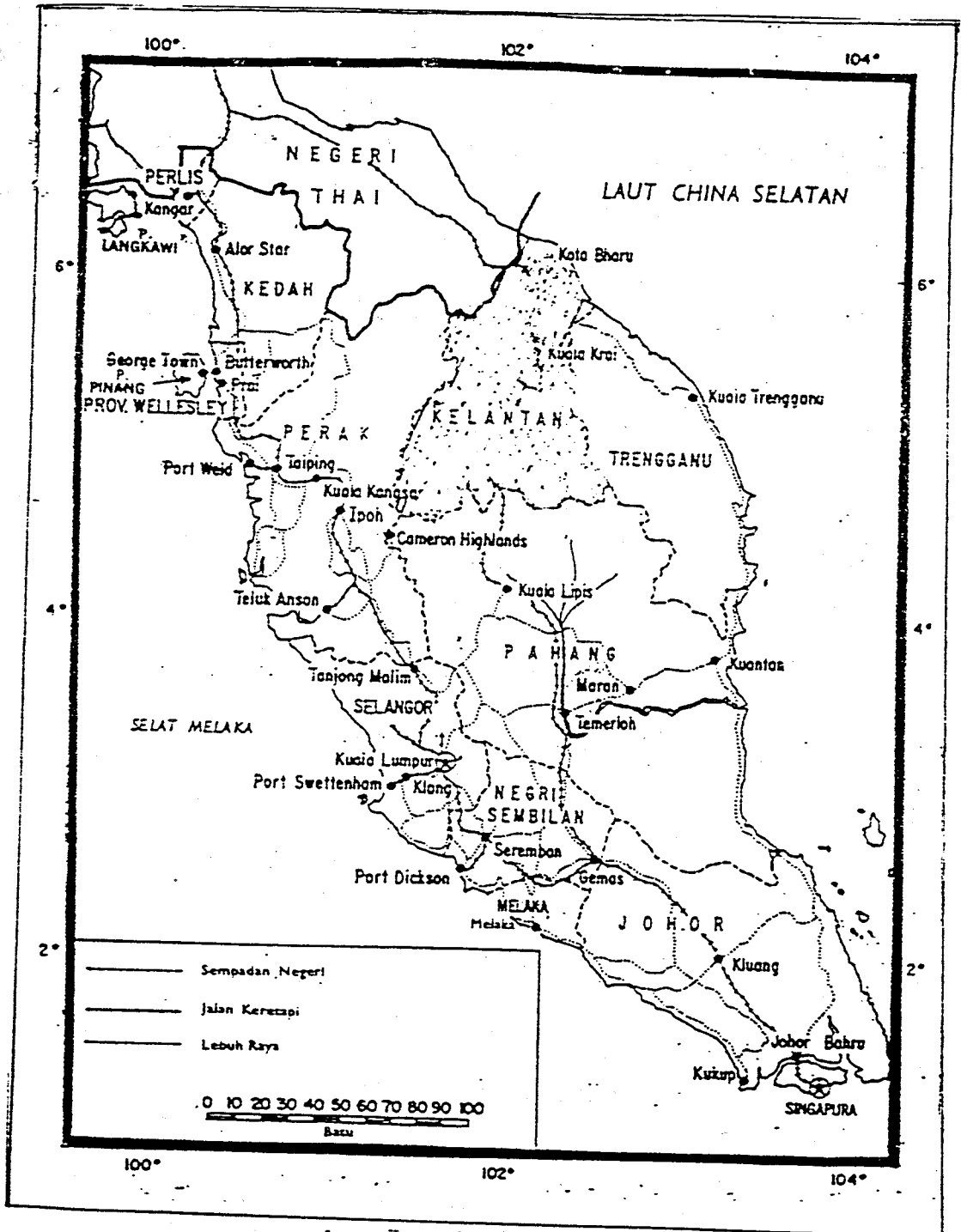
A B S T R A C T

This thesis studies about the strategy and tactics of the Malayan Communist Party (MCP) for achieve their aim and political ambition in Malaya to have contact with the government policy's to destroyed the communist movement during the Emergency 1948-1960. The orientation of the explanation not just to answer what, how, when, and where, but tried to answer why the communist revolt create in 1948 and why the MCP's strategies and tactics during the Emergency period often are variety and changeable. The analysis approach is to have look at the factors what had wield integrative functions, that the various conditions and activities to influence that event. This studies will look from a various dimension or a multidimensional approach. Nevertheless, a political approach were dominance, especialy to percieve a political process there was once to appear an historical phenomenon.

This studies proceed looked that the MCP's strategy and tactic for implant their influence and invigrate thier position in society were often matching with Malaya's situation and condition. Moreever, it also in conformity with discretions government to destroy the communist movement. The other hand, government effort to destroy the communist movement was often basicaly of the communist development and the change of MCP's tactic and strategies.

Thereby, appear that the goverment discretions and the MCP's strategies and tactic were interplay. On this way, both was to fill up each other. The change over in strategy and tactic of MCP will followed by turning in the discreation and government effort to destroy the communist. On the other way about the changes in the government discretions to destroyed the communist movement will followed by correcting the strategies and tactics of the MCP.

PETA PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
(FEDERATION OF MALAYA 1948-1963)



SUMBER: Atlas Progresif Oxford/Philip, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1979)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perkembangan sosio-politik di Malaya khususnya untuk kurun waktu era pasca perang Dunia Kedua, merupakan lahan sejarah yang cukup menarik untuk dikaji dari berbagai sisi. Pernyataan ini muncul, karena perkembangan politik yang terjadi antara kurun waktu pasca perang Dunia Kedua sampai tercapainya kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 telah memperlihatkan beberapa cirinya yang unik dan bersifat khusus. Selain turut memperlihatkan pola perkembangan yang mengalami pasang surut yang berragam.

Setelah Malaysia merdeka, pemerintah mulai mengupayakan pembangunan nasional yang merata dengan meningkatkan upaya untuk memperbaiki dan memajukan perekonomian negara selama tiga dasawarsa dalam segala bidang. Di samping upaya lain untuk menumbuhkan suatu sistem sosial dan politik yang tangguh, dan bersifat demokratis dalam struktur masyarakat Malaysia yang bersifat heterogen dan memiliki pola kebudayaan yang beranekaragam.

Target yang ingin dicapai melalui kebijakan "Wawasan 2020"¹ seper-

¹Wawasan 2020 merupakan rencana pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua Malaysia, dalam rangka menjadi sebuah negara industri maju pada tahun 2020. Penekanan dilakukan dengan memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (jasmani dan rohani), untuk menciptakan manusia yang tangguh, dinamis, produktif, dan agresif, disamping komitmen terhadap konsep keperibadian dan nasionalisme Malaysia. Lebih lanjut, lihat Dr. Mahathir Mohammad, *Wawasan 2020: Malaysia The Way Foward* (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri, 1991), hal. 1-2

ti yang telah dicanangkan dan dicita-citakan oleh pemerintah dan bangsa Malaysia dewasa ini dibawah kepemimpinan Dr. Mahathir Mohammad, adalah menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan cirinya tersendiri. Untuk mencapai tujuan itu, Malaysia diperhadapkan dengan sejumlah tantangan yang merupakan kendala utama bagi terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kalangan penduduk yang terdiri dari berbagai bangsa.

Tantangan pertama yang harus ditempuh adalah bagaimana mewujudkan sebuah negara yang bersatu dengan tujuan hidup yang dinikmati bersama. Terciptanya keamanan dan integrasi nasional, baik dalam konteks territorial maupun wujud persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multi ras yang hidup dalam suasana harmonis dan saling bekerjasama yang menumpahkan kesetiiaannya yang tidak berbelah kepada negara merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan.² Dengan demikian, jalan untuk mencapai tujuan dan mengantisipasi tantangan itu diperlukan suatu konsep yang kukuh dan mantap karena stabilitas dan keamanan negara akan memacu pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam segala bidang, hingga terpenuhinya target tersebut.

Selain itu, kewaspadaan terhadap pengaruh eksteren maupun interen merupakan kunci keberhasilan dari program pembangunan nasional seperti yang direncanakan. Kewaspadaan nasional seperti yang ditekankan oleh pemerintah dewasa ini adalah kewaspadaan terhadap ancaman bahaya laten komunis. Pernyataan di atas kalau diperhatikan, berhubungan erat dengan termeterainya Perjanjian Damai Partai Komunis Malaya dengan Pemerintah

² *Ibid.*,

Malaysia dan Thailand pada tanggal 02 Desember 1989.³ Meskipun pada satu sisi, peristiwa tersebut memperlihatkan berbagai kemungkinan yang akan berdampak positif terhadap proses pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pemerintah menciptakan keamanan dan stabilitas nasional seperti yang dicita-citakan. Namun, pada sisi yang lain tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut hanya berupa taktik dan strategi terselubung Komunisme. Jelas kalau dikaitkan dengan keberadaan dan perjuangan PKM yang penuh tanda tanya dalam upaya menarik perhatian dan dukungan massa setelah sekian lama mendiamkan diri.

Prediksi ini makin diperkuat dengan pernyataan Chin Peng selaku Sekretaris Jenderal PKM yang menganggap bahwa kebijakan tersebut lebih bersifat perjanjian damai semata, bukan berarti pengakuan kalah komunis untuk menyerah diri.⁴ Ditambah dengan beberapa pernyataan yang lain seperti mengakui dirinya masih menganut paham Leninis-Marxist dan pernyataannya bahwa PKM masih aktif bergerak, makin memperkuat kenyataan bahwa ancaman bahaya Komunis memang masih merupakan persoalan-persoalan pokok yang masih terus mengganjal proses pembangunan nasional bangsa Malaysia

³Penjelasan lebih lanjut tentang peristiwa Perjanjian Damai Partai Komunis Malaya (PKM) dengan pemerintah Malaysia dan Thailand yang berlangsung dalam bulan Desember 1989, rujuk berita dan analisis yang sebagian besar banyak di muat dalam surat khabar *Berita Harian*, pada tanggal 3 Desember 1989

⁴Lebih lanjut tanggapan berbagai pihak tentang taktik dan strategi PKM melalui Perjanjian Damai Haadyai 1989, rujuk beberapa pokok pikiran yang dikemukakan oleh Tan Sri C.C. Too (salah seorang yang terlibat secara langsung dalam Rundingan Baling dan seorang Pakar Perang Saraf), dalam suatu wawancara dengan Editor Majalah Dewan Masyarakat. Di samping artikelnya "Perjanjian Damai Haadyai: Hanya Jerangkap Samar PKM", dalam majalah *Dewan Masyarakat*, (Bil.9, September 1991), hal. 28-30

dewasa ini.⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perjanjian Damai komunis itu, pada prinsipnya lebih merupakan taktik PKM untuk memanfaatkan kesempatan dan waktu yang tepat guna menyusun kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka yang terhenti sejak sekian lama.

Kelompok penganut paham Marxist berusaha merubah sistem sosial dan politik negara. Hal ini jelas menunjukkan indikator makin mengerasnya kekuatan komunisme di Malaya. Kemunculan kelompok itu dipelopori oleh beberapa orang mahasiswa yang telah terpengaruh ideologi komunisme, sewaktu mereka mendapatkan pendidikan di Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, bahkan dari beberapa perguruan tinggi di dalam negara sendiri. Dalam melaksanakan rencananya, mereka dikatakan telah menjalin hubungan baik dengan Organisasi Komunis Internasional (Comintern).⁶

Mengingat taktik dan strategi PKM yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional di berbagai bidang baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya, maka penulis, terdorong oleh rasa tanggungjawab sebagai warganegara, mencoba untuk mengungkap fenomena itu ke permukaan agar dapat memberikan beberapa kejelasan dalam upaya memahami taktik dan strategi komunis, khususnya PKM dalam mencapai tujuan dan cita-cita politiknya di Malaya. Penulis akan menyoroti permasalahan tersebut dari kaca mata sejarah, dengan menelusuri dan mengungkapkan kembali taktik dan strategi dalam kaitannya dengan sejumlah kegiatan Komunis pada periode Darurat sepanjang tahun 1948-1960. Pengungkapan kem-

⁵Lihat, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, *Kertas Perintah 14/1988*, Laporan yang dikemukakan dalam Sidang Dewan Rakyat/Dewan Negara Malaysia pada tanggal 14 Maret 1988, hal. 37

⁶*Ibid.*

bali permasalahan ini dirasakan penting karena dapat memberikan kejelasan dan pemahaman tentang kesinambungan fakta dari kenyataan-kenyataan yang berlaku. Kajian ini juga diharap dapat membuka wawasan berpikir tentang sejarah, bahwa apa yang terjadi masa kini merupakan produk dan pengaruh dari masa lampau yang kemudian berpengaruh pula terhadap perencanaan pada masa yang akan datang.

Cicero pernah mengungkapkan, bahwa "barangsiapa yang tidak mengenal sejarah akan tetap menjadi anak kecil".⁷ Dalam hubungan dengan pernyataan di atas, pengungkapan masalah ini diharap akan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas tentang perjalanan sejarah perkembangan bangsa Malaysia, terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, diharap akan lahir generasi muda yang tangguh dan memahami perjalanan sejarah bangsa, yang pada gilirannya dapat diandalkan dalam proses pembangunan negara di masa akan datang, selain dapat mempertebal semangat kecintaan terhadap negara.

Pernyataan di atas menggugah penulis untuk mengungkapkan kembali kejadian itu dengan bantuan data-data dan fakta-fakta yang akurat, dari serangkaian peristiwa dalam saling keterkaitannya untuk disusun secara sistematis dan ilmiah, sesuai dengan pokok kaidah sejarah sebagai ilmu. Studi ini diharap akan dapat menemukan hal dan pemikiran-pemikiran baru, khususnya menyangkut masalah taktik dan strategi komunis yang pada gilirannya dapat pula memberikan input atau masukan yang bermanfaat kepada pemerintah. Terutama dalam upaya merencana dan mengatur berbagai kebi-

⁷Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 23

jakan pembangunan nasional pada umumnya, dan di bidang pertahanan keamanan khususnya. Hal yang demikian itu, secara tidak langsung akan dapat menyumbang ke arah keberhasilan Wawasan 2020 seperti yang dicita-citakan pemerintah dan bangsa Malaysia dewasa ini.

Interaksi antar etnis yang kurang harmonis sejak kebelakangan ini, khususnya antara etnis Melayu dan Cina, ditambah dengan munculnya beberapa isu sensitif yang berhubungan dengan masalah ras, suku, dan agama yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu merupakan kendala utama yang terus mengganjal proses pembangunan nasional di Malaysia. Hal ini sekaligus memberikan indikasi bahwa keharmonisan dalam berinteraksi dalam masyarakat Malaysia yang multi rasial masih perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Jika ditelusuri lebih lanjut, kesemua itu erat keterkaitannya dengan keadaan Darurat yang berlangsung di Malaya antara tahun 1948-1960. Karena itu, pelacakan terhadap gejala-gejala historis dari peristiwa itu diharapkan mampu mengusut permasalahan tersebut, sehingga upaya untuk mewujudkan sebuah negara yang harmonis dan aman sebagai salah satu target Wawasan 2020 dapat diimplementasikan pada masa yang akan datang.

Selain itu, kajian sejarah tentang objek ini dalam hubungannya dengan taktik dan strategi PKM merupakan judul baru dalam katalog sejarah di Indonesia umumnya, dan di lingkungan Universitas Hasanuddin pada khususnya. Hal ini selain memberikan variasi dalam penelitian sejarah, juga dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah Malaysia bagi masyarakat Indonesia umumnya dan dalam kalangan mahasiswa sejarah khususnya. Penulis bertolak dari dasar pemikiran bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak persamaan dalam aspek sosial budaya, terutama

dalam gerak sejarah, karena keduanya pernah berhadapan dengan persoalan komunisme. Meskipun memiliki sifat dan keunikannya yang tersendiri bagi masing-masing negara, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk saling melengkapi demi terjalannya kerjasama yang lebih baik khususnya dalam mengantisipasi bahaya laten komunis.

B. Permasalahan dan Batasan Masalah

Perjanjian Damai yang ditandatangani pada tanggal 02 Desember 1989 antara PKM dengan Pemerintah Malaysia dan Thailand, merupakan suatu taktik terselubung penuh tanda tanya yang masih belum terjawab hingga saat ini. Hal ini perlu dipahami, mengingat Komunis dalam perjalanan sejarah memang memiliki keahlian dan berkemampuan dalam menyusun dan merangka taktik dan strategi dalam perjuangan mencapai tujuan dan cita-cita politiknya. Pengalaman di Malaya telah membuktikan kemampuannya merangka dan menyusun taktik dan strategi yang mantap dan tersusun rapi, sehingga PKM berhasil mengambil alih kekuasaan di Malaya selama dua minggu setelah pendudukan Jepang berakhir pada tahun 1945.⁸

Komunis mulai menanamkan pengaruhnya di Malaya secara rahasia pada awal tahun 1920-an, dengan cara menyusup masuk ke dalam kesatuan-kesatuan buruh dan sekolah-sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai aksi revolusioner seperti pemogokan-pemogokan buruh, dengan tujuan melumpuhkan perekonomian Malaya. Pada bulan April 1930, PKM secara resmi berdiri di Malaya. Laporan Rapat Buruh Se-Malaya menyebutkan tujuan pembentukan

⁸Tan Sri Abdul Samad Idris, *25 Tahun Merdeka* (Kuala Lumpur:Pustaka Budiman, 1982), hal. 359-360.

PKM antara lain adalah memperjuangkan kebebasan dan merumuskan program militer untuk mendirikan sebuah negara bercorak komunis di Malaya.⁹

Sejak itu PKM mengalami perkembangan pesat terutama dalam taktik dan strateginya, disebabkan oleh kemampuannya untuk memanfaatkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Malaya ketika itu. Antara lain kondisi yang mendukung perkembangan pesat PKM, sehingga mampu mendapatkan simpati dan berhasil menghimpun kekuatan massa, adalah depresi ekonomi yang melanda dunia sekitar tahun 1930-an, Perang China-Jepang pada tahun 1937 dan peristiwa pendudukan Jepang di Malaya sepanjang tahun 1941-1945. Kondisi-kondisi itulah yang kemudian membuka jalan dan memberikan kesempatan kepada PKM mendapatkan pengakuan Inggris untuk bergerak sebagai sebuah organisasi legal yang diakui keberadaannya. Hal itu merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong keberhasilan PKM untuk mengambil alih kekuasaan selama masa transisi setelah pendudukan Jepang, yang dikenal dalam sejarah sebagai "Peristiwa 14 Hari Bintang Tiga".

Kegagalan untuk memperjuangkan cita-cita secara "konstitusional", menyebabkan PKM menetapkan kebijakan yang lebih berani yaitu mendirikan sebuah *Republik Komunis Malaya* melalui suatu revolusi bersenjata pada 1948. Namun, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama berlangsungnya Undang-Undang Darurat telah dapat meredam dan mematahkan perjuangan komunis. Hal itu memaksa PKM undur ke pedalaman, daerah-daerah hutan dan pergunungan untuk melanjutkan perjuangan secara gerilya.

⁹Sebagian dari tujuan penting pembentukan Partai Komunis Malaya (PKM) hasil *Laporan Rapat Buruh Se-Malaya*, seperti dikutip oleh Gene Z. Hanrahan, dalam *The Communist Struggle in Malaya* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1971), hal. 43

Kemunculan kembali PKM setelah 41 tahun menghilang dan tiba-tiba muncul dengan Perjanjian Damai, telah menimbulkan kejutan kepada banyak pihak, terutama di kalangan aparat keamanan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa PKM pada kenyataannya masih bergerak di Malaysia ketika itu. Persoalan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh masalah gerakan komunis di Malaya pada umumnya, Partai Komunis Malaya pada khususnya. Permasalahan ini cukup menarik, terlebih dalam kaitan Perjanjian Damai itu dengan taktik dan strategi PKM. Apakah benar perjanjian itu merupakan hasrat murni untuk berdamai, atau apakah hanya sekedar taktik terselubung PKM. Keinginan yang disuarakan oleh Chin Peng dan beberapa orang rekan seperjuangannya untuk pulang dan kembali aktif dalam kegiatan dan perkembangan politik di Malaysia, secara simbolis membuktikan bahwa cita-cita PKM masih belum terkubur, sebaliknya terus membara.

Pernyataan-pernyataan di atas mengantar penulis kepada pertanyaan pokok terhadap permasalahan ini, yaitu taktik dan strategi dalam bentuk yang bagaimana telah diterapkan oleh komunis, khususnya PKM dalam mencapai tujuan dan cita-cita politiknya di Malaya antara tahun 1948-1960? Sampai sejauhmana pula Undang-Undang Darurat yang diterapkan oleh pemerintah dalam waktu yang bersamaan, berpengaruh terhadap taktik dan strategi serta pola perjuangan PKM tahun 1948-1960? Dengan kata lain, pokok permasalahan yang ingin dikaji lebih jauh dalam tulisan ini adalah untuk melihat bagaimana saling pengaruh antara taktik dan strategi Partai Komunis Malaya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi gerakan komunis selama periode Darurat antara tahun 1948-1960.

C. Metodologi

Pernyataan keadaan Darurat di Malaya antara tahun 1948-1960, secara formal merupakan reaksi pemerintah terhadap peristiwa pemberontakan Komunis. Penulis bermaksud untuk menjelaskan peristiwanya tidak hanya sekedar bercerita, sehingga uraian akan lebih bersifat deskriptif analitis. Penjelasan tidak hanya diarahkan untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, sejauhmana, kapan dan di mana, tetapi juga turut memfokuskan perhatian terhadap pertanyaan mengapa peristiwa pemberontakan komunis itu terjadi.

Agar pembahasan dapat berwujud sebagai suatu unit konstruksi sejarah, pendekatan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dalam beberapa hal mempunyai fungsi integratif. Perhatian akan diarahkan pada arus-arus besar (*mainstream*) berupa berbagai kegiatan dan kondisi-kondisi yang kemudian mempengaruhi terjadinya peristiwa itu. Dalam rangka penjelasan itu selain sebagai kerangka analisis dalam uraian, penulis akan bertolak dari pemahaman konsep sejarah sebagai suatu sistem. Konsep sistem itu sendiri mencakup prinsip antara lain ia terdiri dari berbagai unsur yang merupakan kesatuan. Kemudian fungsi unsur-unsur tersebut akan saling berpengaruh dan saling ketergantungan yang secara bersamaan turut mendukung fungsi sistem. Saling ketergantungannya itu disebabkan setiap unsur memiliki dimensi unsur-unsur lain. Selanjutnya dalam mendeskripsikan unsur-unsur serta saling pengaruhnya, menyebabkan tidak ada faktor atau dimensi yang deterministik. Terakhir, dalam studi sejarah, pendekatan sistem yang sinkronis perlu diimbangi oleh pendekatan yang bersi-

fat diakronis.¹⁰

Secara umum, penulis dalam pembahasan berusaha mendekati objek studi dari berbagai dimensi. Dengan kata lain, akan menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensional. Meskipun demikian, penulis secara khusus cenderung untuk menggunakan pendekatan politik, yaitu melihat proses politik sebagai gejala sejarah. Proses politik sebagai hal yang kemudian memunculkan gejala sejarah akan disoroti dari aspek kompleksitas hubungan antara pemimpin dengan pengikut, otoritas dan ideologi, ideologi dan mobilisasi, loyalitas dan solidaritas, dan berbagai unsur lain. Kesemua itu pada gilirannya akan mampu mengungkapkan pola distribusi pengaruh dan kekuasaan (*polity*) dalam kaitannya dengan pola distribusi ekonomi dan masyarakat, yaitu pola distribusi hubungan sosial dalam kaitannya dengan kebudayaan atau pola distribusi nilai-nilai.¹¹ Saling pengaruh dan ketergantungan antar komponen sistem itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan pemikiran atau kerangka analisis dalam mengkaji dan menjelaskan gejala-gejala sejarah yang muncul.

Hal yang demikian itu mungkin tidak akan memberi arti apa-apa, sekiranya tidak didukung oleh data yang benar dan akurat dari sejumlah sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk dapat diakui dan diterima sebagai suatu karya sejarah. Karena itu, penulis berusaha untuk menghadirkan sejumlah sumber ontentik, baik primer maupun sekunder dalam tulisan ini. Antara lain berupa bahan-bahan arsip,

¹⁰Penjelasan lebih lanjut tentang konsep ini, rujuk Sartono Kartodirjo, *op. cit.*, hal. 121

¹¹*Ibid.*, hal. 47

laporan-laporan pemerintah, dan sejumlah dokumen lain yang berhubungan. Di samping serta beberapa surat khabar yang diterbitkan pada zamannya, yang sebagian besar masih tersimpan di Arsip Nasional Malaysia, Kuala Lumpur.

Tidak hanya itu, beberapa sumber tertulis lainnya yang bersifat sekunder turut dipakai dalam menjelaskan permasalahan ini, seperti buku-buku, majalah-majalah, terbitan berkala, Journal, dan lain sebagainya yang sebagian besar penulis dapatkan di beberapa buah perpustakaan di Malaysia. Antaranya termasuklah Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Arkib Negara Malaysia di Kuala Lumpur, Perpustakaan Daerah Kuala Pilah, dan Perpustakaan Sekolah Menengah Batu Kikir, Negeri Sembilan, serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang.

Sesuai dengan topiknya, pembahasan ini berhubung erat dengan masalah revolusi dan komunisme dengan diberlakukannya keadaan Darurat di seluruh Malaya sebagai akibat dari perkembangan dan pemberontakan Komunis pada 1948. Karena itu penulis dalam menjelaskan permasalahan ini mengacu pada sejumlah konsep dan teori yang berhubungan dengan masalah revolusi dan komunisme, dalam kaitannya dengan teori konflik. Dengan kata lain, fenomena sosial yang diangkat dalam mendeskripsikan permasalahan adalah fenomena konflik antara unsur-unsur pelakunya.

Teori Marxist cenderung memandang proses sejarah sebagai proses perjuangan kelas yang tertindas melawan golongan atau kelompok penindas. Menurut Karl Marx, "menanggulangi keterasingan tergantung pada tindakan mengesampingkan pemilikan pribadi". Namun hal itu belum memadai apa yang

dituntut adalah suatu reorganisasi masyarakat yang lebih dalam, mencakup segala hal yang dilandasi oleh penghapusan hubungan kontemporer antara pemilikan pribadi dan buruh upahan.¹²

Konsep Komunisme pada prinsipnya menitik-beratkan pada empat ide pokok. Pertama, sekelompok kecil orang kaya hidup dalam kemewahan yang melimpah, sedangkan kaum pekerja yang lebih besar jumlahnya hidup dalam kesengsaraan. Kedua, cara merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, sistem di mana alat produksi dikuasai oleh negara dan bukan pribadi swasta. Ketiga, satu-satunya jalan adalah melalui revolusi kekerasan. Keempat, demi menjaga kelanggengan sistem sosialis, harus diatur oleh suatu kediktatoran partai komunis dalam jangka waktu yang memadai.¹³

Membangun negara di atas puing-puing reruntuhan menjadi slogan khusus yang diterapkan oleh komunisme. Proses meruntuhkan negara merupakan bagian dari revolusi. Seperti ditegaskan Karl Marx, revolusi terjadi sebagai akibat dari serangkaian krisis yang dialami oleh kapitalisme.¹⁴ Proses revolusi dapat pula dipahami sebagai proses yang amat luar biasa, keras, kasar, dan merupakan suatu gerakan yang terpadu dari sebuah gerakan sosial. Itu dapat dipahami sebagai suatu ungkapan atau pernyataan akhir dari keinginan otonom dan emosi-emosi yang dalam, mencakup segenap

¹²Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosiologi Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber* (Jakarta: University Indonesia Press, 1986), hal. 20

¹³Michel H. Hart, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah* (Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya, 1985), hal. 88

¹⁴Lyman Sargent Tower, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer Suatu Analisis Komparatif* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987), hal. 88

kapasitas keorganisasian maupun ideologi protes sosial yang dikerjakan secara saksama yang akhirnya akan menciptakan suatu tatanan sosial baru yang lebih baik.¹⁵

Dalam pada itu, penulis juga mengacu pada teori-teori yang dikemukakan oleh Smelser, Charmer Johnson, dan Wellace, sebagai alat untuk mendekati gerakan-gerakan yang bersifat revolusioner. Smelser mendekati gejala revolusi dengan dua jalan, yaitu melalui problema-problema modernisasi secara tidak langsung. Juga penggunaan tipe *collective behaviour* sebagai pendekatan secara langsung. Selain memberikan kerangka pemikiran tentang proses terjadinya revolusi berupa tahap-tahap perkembangannya.¹⁶

Johnson dalam studinya pula telah memilah-milahkan jenis gerakan yang bersifat revolusioner, selain menjelaskan faktor exogeneous dan endogeneous yang ada dalam masyarakat di samping faktor lingkungan yang dapat berkembang sehingga mengarah untuk terjadinya revolusi.¹⁷ Sementara Wellace menambahkan kondisi dan faktor psikologis yang berkembang dan berpengaruh dalam masyarakat yang disebut olehnya sebagai "keseimbangan personalitas" (*steady state*). Apabila keseimbangan personalitas yang berfungsi sebagai pencegah timbulnya stress tidak terwujudkan, akan dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang bersifat revolusioner sehing-

¹⁵S. N Eisenstad, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat* (Jakarta: Penerbit C.V Rajawali, 1986), hal. 3

¹⁶Lebih lanjut tentang konsep dan pemikiran Smelser tentang hal ini, rujuk Anthony D. Smith, *The Concept of Social Change: A Critique of The Functionalist Theory of Social Change* (London: Routledge and Kegan Paul, 1971), hal. 97-102

¹⁷*Ibid.*, hal. 111-122

ga terjadilah revolusi atau pemberontakan.¹⁸ Dengan kata lain, revolusi dapat terjadi karena adanya *disequilibrium* dalam masyarakat. Kesemua ini mengantar penulis untuk memahami gejala-gejala sejarah, selain sebagai alat dan kerangka analisis untuk menjelaskan Taktik dan Strategi Partai Komunis Malaya dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam upaya mengantisipasi gerakan komunis selama periode Darurat di Malaya tahun 1945-1948, sebagai suatu unit konstruksi sejarah.

Untuk merekonstruksi sebuah gambaran sejarah yang dapat bernilai objektif, penulis pada prinsipnya akan menggunakan metode yang umumnya dipakai dalam ilmu sejarah. Seperti yang tercakup dalam empat tahap itu, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Secara keseluruhan sumber yang dipakai akan mengacu pada studi pustaka, yaitu mengandalkan sumber-sumber tertulis yang didapatkan dari beberapa buah perpustakaan di Malaysia dan Arsip Nasional Malaysia seperti tersebut di atas.

Pada tahap heuristik, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data dari sejumlah sumber yang berkaitan objek kajian yang dirasakan dapat mendukung tulisan ini dalam penjabarannya, baik primer maupun sekunder. Pada tahap kritik sumber atau seleksi data, penulis sampai pada kegiatan melakukan kritik dan penilaian secara terperinci pada data yang diperoleh, baik kritik ekstern maupun intern. Hal ini perlu dilakukan, mengingat tidak semua data-data yang diperoleh mengandung nilai kebenaran yang bersifat objektif.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 123-125

Kegiatan selanjutnya adalah tahap di mana dilakukan interpretasi atau penilaian terhadap data dan fakta yang telah bebas seleksi. Tahap ini menuntut perhatian yang lebih cermat agar dapat menghindari subjektivitas. Akhirnya tulisan mengenai gerakan Komunis di Malaya, khususnya menyangkut taktik dan strategi Partai Komunis Malaya antara tahun 1945-1948, dapat dijabarkan dalam bentuk penulisan ilmiah. Pada tahap ini penulis dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir yang imajinatif dan interpretatif agar permasalahan tersebut dapat diungkap dan dijelaskan sebagaimana mestinya, untuk dapat dipapar secara deskriptif analitis.

Pembahasan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar organisasi sejarah yaitu kronologi. Hal itu dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu gambaran jelas bagaimana suatu peristiwa terjadi. Selain membantu dalam menganalisa proses kejadian bagi pengungkapan kausalitas dari suatu kesatuan peristiwa untuk melihat gejala-gejala yang muncul sebagai suatu proses.

Dalam kaitan itu, agar tulisan ini menjadi lebih terarah, penulis akan menuangkannya ke dalam lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang mencakup latarbelakang masalah, permasalahan dan batasan masalah, serta metodologi yang dipakai dalam rangka menyusun penulisan ini. Bab II pula merupakan gambaran umum dari kondisi awal sosial politik dan ekonomi Malaya. Tercakup di dalamnya uraian singkat kondisi dan struktur masyarakat majemuk yang heterogen dalam kultur yang berbeda, imperialisme dan kapitalisme Inggris, sedikit tentang perkembangan ekonomi, serta kemunculan gerakan-gerakan buruh dan kemunculan gerakan politik yang radikal di Malaya sebelum pecah perang Dunia Kedua. Keseluruhan dari gambaran

tersebut dapat memberikan penjelasan bagaimana awal tumbuh dan berkembangnya gerakan komunis di Malaya, selain dapat memberikan gambaran awal mengapa taktik dan strategi PKM dalam perkembangannya kemudian, terutama periode 1948-1960 mengalami perubahan dan perkembangan dengan pola yang beragam.

Dengan demikian sekaligus akan mengantarkan pembahasan yang lebih lanjut dalam bab III, yaitu perkembangan gerakan komunis di Malaya. Ia terdiri atas tiga fase yaitu, pertama masuk dan berkembangnya paham komunisme di Malaya, PKM sewaktu zaman Jepang dan PKM pada zaman pasca perang 1945-1948. Sementara Bab IV yang merupakan bab inti, perhatian akan lebih diberikan pada penjelasan dan analisa tentang saling hubungan antara kebijakan pemerintah dengan taktik dan strategi PKM selama periode Darurat di Malaya sepanjang tahun 1948-1960.

Terakhir adalah Bab V yang merupakan Bab Penutup. Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan yang merupakan jawapan dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya. Setiap masalah dengan simpulan-simpulannya, kemudian akan dibuat suatu kesimpulan akhir dari keseluruhan permasalahan yang dimunculkan.

BAB II

KAJIAN AWAL KONDISI SOSIO-POLITIK DAN EKONOMI MALAYA SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

A. Imperialisme dan Politik Kolonial Inggris

Kehadiran imperialisme dan kolonialisme di Malaya adalah fakta historis yang turut menentukan perjalanan sejarah bangsa Malaysia pada umumnya. Sistem kolonial beserta sistem eksploitasinya telah menimbulkan beberapa dampak yang luas seperti terwujud dalam proses komersialisasi, industrialisasi, birokratisasi, serta modernisasi dalam segala bidang termasuk bidang komunikasi, transportasi, dan edukasi. Suatu hal yang tidak disengaja terjadi adalah timbulnya mobilisasi sosial yang tinggi, diikuti kemudian dengan munculnya golongan intelegensia yang telah memelopori pertumbuhan dan perkembangan gerakan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air dari belenggu penjajahan.

Bagian kedua abad ke 19 merupakan periode baru bagi imperialisme Inggris, yang ditandai oleh politik kolonial yang berbeda sekali dengan politik kolonial yang diterapkan oleh Inggris sebelumnya. Kalau kepentingan-kepentingan Inggris sebelum ini lebih tertumpu kepada kegiatan perdagangan, maka pada periode-periode berikutnya selain memperhatikan kepentingan-kepentingan ekonomi, Inggris juga sudah mulai memperhatikan kepentingan-kepentingan politiknya di Malaya.

Titik tolak dari permulaan zaman imperialisme Inggris di Malaya diawali dengan peristiwa pembukaan daerah koloni Inggris yang pertama di Pulau Pinang oleh Francis Light pada tahun 1786. Dari sinilah kemudian

Inggris mulai bertapak dengan menguasai satu demi satu negeri-negeri di Malaya untuk tunduk di bawah pengaruh dan kekuasaannya. Setelah Pulau Pinang berhasil diraih pada 1786, Singapura pula berhasil dikuasai pada tahun 1819 yang diikuti kemudian penguasaan Inggris ke atas Perak pada tahun 1874, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan beberapa negeri Melayu yang lain beberapa waktu kemudian.

Inggris pada prinsipnya tidak berhasrat untuk menyatukan Negeri-Negeri Melayu yang terpisah-pisah itu ke dalam satu kesatuan politis. Karena itu, terlihat bahwa sepanjang berlangsungnya imperialisme dan kolonialisme di Malaya, Inggris telah menjalankan kebijakan politik yang bersifat *divide et empera* di mana kekuatan, komunikasi dan interaksi politik antara negeri-negeri Melayu telah dibatasi dan dikontrol dengan segala macam cara. Pemerintahan dalam negeri pula telah diatur atas nama Sultan, walaupun pada kenyataannya mereka telah kehilangan pengaruh dan kekuasaannya, kecuali menyangkut hal ihwal Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dengan kata lain, sepanjang penguasaan Inggris di Malaya, keberadaan dan fungsi Raja-raja Melayu hanyalah sebatas simbol feodal dan penguasa negeri semata.¹ Untuk mengatur sistem pemerintahan di negeri-negeri tersebut, Inggris kemudiannya memperkenalkan tiga corak pemerintahan yang berlainan antara negeri-negeri yang terdapat di Malaya, yaitu Negeri-Negeri Selat (*Straits Settlement*), Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (*Federated Malay State*), dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (*Unfe-*

¹J. M. Gullick, *Indegenious Political System of Western Malaya* (London: University of London, Athlone Press, 1965), hal. 21

derated Malay States).²

Wilayah pengaruh Inggris di Malaya secara umum dapat dibagi atas dua kategori, yaitu daerah jajahan yang dipengaruhi langsung dan yang tidak dipengaruhi langsung. Penjajahan Inggris secara langsung terjadi melalui sejumlah ekspansi-ekspansi militer, selain perjanjian-perjanjian dengan penguasa lokal atau Raja-Raja di negeri Melayu untuk memberikan beberapa konsesi khusus serta hak kekuasaan dan pemerintahan di negeri-negeri Melayu kepada Inggris. Sementara penjajahan secara tidak langsung adalah suatu keadaan di mana negeri-negeri Melayu yang telah mendapat pengaruh Inggris, dibiarkan untuk berkembang dengan status sebagai negeri naungan yang tidak dimasukkan sebagai bagian dari wilayah tanah jajahan Inggris. Negeri-negeri itu tidak tertakluk dibawah wewenang Parlemen Inggris. Rakyat di masing-masing negeri itu hanya tertakluk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negeri tersebut.³

Meskipun demikian, biasanya kedua bentuk pemerintahan itu berjalan secara beriringan, baik secara bersamaan maupun berurutan. Bahkan tidak jarang terjadi imperialisme yang bersifat tidak langsung itupun seringkali berakhir dengan imperialisme yang bersifat langsung. Penja-

²Negeri-Negeri Selat terdiri dari Pulau Pinang, Malaka dan Singapura terbentuk di tahun 1826. Negeri-Negeri Bersekutu yang terdiri dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan terbentuk setelah perjanjian Persekutuan 1896. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu pula terdiri dari Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Lihat B. Simandjuntak, *Federalisme Tanah Melayu 1945 - 1963* (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1985), Khong Kim Hong, *Merdeka: British Rule and The Struggle for Independence in Malaya 1945-1957* (Petaling Jaya:INSAN, 1984), hal. 1-7

³Penjelasan lebih lanjut tentang corak penjajahan Inggris di Malaya, rujuk R. Emerson, *Malaysia: Satu Pengkajian Pemerintahan Secara Langsung dan Tidak Langsung* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1987).

jahan Inggris yang bersifat langsung bermula dengan pembentukan *Negeri-Negeri Selat (Straits Settlements)* pada tahun 1826, yang diberikan status *Crown Colony* atau daerah Tanah Jajahan Kerajaan Inggris. Sebelum tahun 1832 kekuasaan tertinggi Negeri-Negeri Selat sepenuhnya berada di bawah Gubernur Jenderal Inggris di India. Pelaksanaan pemerintahan harian dilakukan oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat yang berkedudukan di Singapura dengan dibantu oleh seorang Residen Konsular masing-masing di Malaka dan Pulau Pinang. Setelah tahun 1867 kekuasaan tertinggi Negeri-Negeri Selat berpindah tangan dari Gubernur Jenderal Inggris di India kepada Sekretaris Kantor Tanah Jajahan yang berkedudukan di London. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh seorang Gubernur dengan dibantu oleh suatu Dewan Legislatif (*Legislative Assembly*) dan Dewan Eksekutif (*Executive Council*).⁴

Di negeri-negeri Melayu yang lain berlangsung suatu corak pemerintahan yang tumpang tindih antara yang bersifat langsung dan tidak langsung. Corak penjajahan yang bersifat langsung itu nampak terutama di negeri-negeri Melayu yang telah diperkenalkan dengan Sistem Residen yang kemudian tergabung dalam *Negeri-Negeri Melayu Bersekutu* seperti Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Di negeri-negeri itu, orang-orang Melayu sekilas diperlihatkan tetap berada di bawah naungan raja-raja Melayu yang berdaulat. Namun pada kenyataannya, mereka telah diperalat

⁴Negeri-Negeri Selat terdiri dari P.Pinang, Malaka dan Singapura dengan pusat pemerintahan yang berkedudukan di Pulau Pinang. Pada tahun 1832 pusat pemerintahannya berpindah ke Singapura. Pada Tahun 1867, NNS yang sebelumnya di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Inggris di India, kemudiannya diletakkan di bawah pengawasan langsung Kantor Tanah Jajahan Inggris di London. *Ibid.*,

oleh Inggris, karena yang sesungguhnya berkuasa di negeri-negeri Melayu tersebut adalah *Residen Inggris* pada masa sistem Residen, dan seorang *Residen Jenderal Inggris* yang membawahi *Komisaris Tinggi (High Commissioner)* yang bertindak sebagai pengambil kebijaksanaan pada masa pemerintahan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.⁵

Demikian halnya di *Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu* seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, dan Johor. Masing-masing negeri diharuskan menerima seorang Residen Inggris yang berfungsi sebagai Penasehat Sultan dalam pengambilan keputusan, selain membantu Raja-Raja untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri. Posisi kekuasaan Residen Inggris di negeri-negeri itu dalam struktur pemerintahan Inggris adalah berada di bawah Residen Jenderal di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Komisaris Tinggi Negeri-Negeri Selat. Meskipun dikatakan bahwa Residen hanya berfungsi sebagai penasehat Sultan, namun pada kenyataannya terlihat bahwa Residen berkuasa penuh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan politik di negeri-negeri Melayu sehingga membelakangi kuasa Sultan, bahkan kuasa Residen Jenderal dan Komisaris Tinggi.⁶

Kebijakan-kebijakan politik kolonial Inggris sepanjang berlangsungnya imperialisme di Malaya kelihatannya menjadi tumpang tindih dalam upayanya untuk mencapai dua tujuan yang pada prinsipnya saling bertentangan. Di satu pihak, Inggris dalam banyak tindakannya berusaha untuk mengeksploitasi perekonomian dan kekayaan di negeri-negeri Melayu yang bersifat menyeluruh. Hal itu hanya akan dapat dicapai setelah keamanan

⁵Simandjuntak, *op.cit.*

⁶*Ibid.*, hal. 9

REKORSAKSI
NEGARA MALAYSIA
15 SEP 1998

dan pemerintahan yang stabil dapat terwujudkan di negeri-negeri tersebut. Di sisi yang lain Inggris diperhadapkan pula dengan tuntutan, beban dan tanggungjawab untuk memperbaiki kehidupan dan melindungi kepentingan penduduk Malaya, terutama keberadaan dan kepentingan orang-orang Melayu sebagai penduduk pribumi dari berbagai tekanan, perkembangan dan perubahan-perubahan sosio-politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.⁷

Pencapaian tujuan-tujuan dari imperialisme itulah yang kemudian memaksa Inggris untuk menjalankan politik 'pintu terbuka' yang didukung oleh konsep ekonomi *laisse faire*. Hal itu baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong kemasukan secara besar-besaran migran-migran asing terutama dari India dan Cina ke Malaya untuk dipekerjakan di daerah-daerah pertambangan timah dan perkebunan karet, dan dalam bidang lain akibat perkembangan pesat di bidang ekonomi yang berlangsung ketika itu. Selain bermanfaat untuk menopang perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung dan menjamin kecukupan tenaga buruh, serta perluasan pasar komoditi ekspor Inggris, hal itu cukup berarti bagi Inggris karena dapat berfungsi untuk mengimbangi kekuatan selain memperlemah kuasa dan daya lawan orang-orang Melayu terhadap pengaruh dan kekuatan Inggris di Malaya.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa Inggris dalam banyak hal telah berhasil dalam menerapkan teori-teori imperialisme di Malaya. Dengan politik kolonial yang bersifat *divide et empera* di bidang politik serta *laisse faire* di bidang ekonomi, Inggris berhasil membawa

⁷William Roff, dalam *The Origin of Malay Nationalism* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1967), hal. 13

beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan sosio-politik dan ekonomi di Malaya pada umumnya. Inggris juga telah berhasil memperlambat kesadaran politik penduduk Malaya pada umumnya, dan orang-orang Melayu khususnya. Kondisi-kondisi seperti itu terus berjalan, sampai terjadinya perubahan-perubahan yang cukup besar setelah pecah Perang Dunia Kedua.

B. Transformasi Ekonomi di Malaya

Sampai menjelang pertengahan abad ke-19, perekonomian Malaya hampir seluruhnya didominasi oleh sistem ekonomi pertanian dengan orientasi subsistensi. Selain itu, ada sedikit usaha-usaha pertambangan dan perdagangan yang sebagian besar hanya tertumpu di kota-kota bagian pantai barat, terutama kota-kota pelabuhan. Dalam pada itu, ekonomi pertanian, terutama orientasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menggarap lahan pertanian secara tradisional seperti bersawah padi, nelayan menangkap ikan, dan berkebun sayur merupakan kegiatan pertanian yang cukup dominan. Sementara pengembangan untuk usaha-usaha investasi di bidang industri masih sangat minimal.⁸

Intervensi Inggris terhadap negeri-negeri Melayu untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaannya dilakukan melalui sejumlah peraturan dan undang-undang, merupakan antara lain langkah-langkah yang telah diambil untuk menjadikannya sebagai sebuah kekuatan yang tidak tertandingi. Bagi Inggris, apabila keamanan dan stabilitas politiknya mulai terwujudkan di Malaya, minatnya terhadap kegiatan-kegiatan dagang terutama di Negeri-Negeri Selat mulai dikembangkan secara giat. Anggaran yang besar telah

⁸J.M. Gullick, *Malaysia* (London: Ernest Benn Ltd., 1969), hal. 65

dialokasikan untuk pengembangan industri di Malaya terutama investasi untuk usaha-usaha pertambangan timah dalam skala yang besar, pembukaan areal-areal baru, serta memperkenalkan teknik-teknik modern yang lebih efisien untuk kegiatan penambangan timah. Dengan demikian, banyak negeri-negeri Melayu terutama di bagian pantai barat telah mengalami perubahan dalam struktur ekonomi yang cukup drastis, dari ekonomi pertanian bertukar kepada usaha-usaha pertambangan timah.

Fase kedua dari perkembangan ekonomi Malaya terjadi di awal abad ke-20, ketika Inggris mulai memperlihatkan kecenderungannya dalam bidang perdagangan dan investasi di bidang pertambangan timah. Keadaan ini di dorong oleh dua hal, pertama, setelah Inggris memulai politik kolonial di Malaya dengan memberlakukan pelbagai aturan dan undang-undang untuk memperkuat pengaruh dan kekuatan politiknya, banyak investor-investor Inggris yang menunjukkan minatnya untuk menanamkan modalnya pada jenis usaha tersebut; kedua, disebabkan oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa dan didukung oleh beberapa penemuan baru yang menggunakan bahan timah menyebabkan permintaan untuk timah melonjak dengan keras. Permintaan timah dunia yang terus meningkat, makin mendorong Inggris untuk mengembangkan industri pertambangan timah di Malaya dalam skala yang lebih besar.

Instalasi permesinan (penggunaan kapal korek) yang pertama telah diperkenalkan di Malaya pada tahun 1912. Dengan menggunakan metode ini usaha-usaha pertambangan dapat dilakukan secara maksimal dan lebih efisien. Dengan demikian para penanam modal Inggris telah mengambil alih kedudukan pemodal-pemodal Cina yang sebelum ini menguasai dan mendomina-

si sebagian besar kegiatan pertambangan timah di Malaya.⁹ Industri timah di Malaya bukan saja telah memberikan keuntungan yang besar kepada para investor Inggris, tetapi juga telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Inggris secara keseluruhan. Sejak 1920, produksi timah Malaya telah menyumbang sekitar 35% total produksi timah dunia.¹⁰

Fase ketiga perkembangan ekonomi Malaya terjadi ketika industri karet mulai dikembangkan di Malaya. Dibandingkan dengan timah, industri karet agak terlambat dikembangkan di Malaya. Sewaktu tanaman itu diperkenalkan buat pertama kali di Malaya pada tahun 1890, karet tidak mendapat perhatian dan kurang menarik minat para investor. Ketika itu kopi merupakan tanaman pertanian yang utama. Tanaman industri karet baru diminati dan mulai dikembangkan ketika harga kopi mengalami penurunan yang drastis untuk waktu-waktu setelah Perang Dunia Pertama, sehingga permintaan karet dunia melonjak dengan keras untuk waktu-waktu setelah itu.

Sehingga tahun 1910, harga produksi karet Malaya meningkat menjadi 12 shiling 9 pence per-paund berbanding hanya 3 shiling pada tahun 1897.¹¹ Setelah itu, areal untuk tanaman industri karet makin diperluas oleh investor Inggris dan Eropa terutama di bagian pantai barat Malaya. Sampai menjelang tahun 1923, produksi karet Malaya menyumbang sebesar

⁹Sebelum tahun 1913, orang Cina menguasai 3/2 daripada kegiatan pertambangan. Namun sampai tahun 1937 jumlahnya hanya sekitar 1/3 dari keseluruhan investasi timah di Malaya. Lihat, Khong Kim Hoong, *Merdeka*, *op.cit.*, hal. 8

¹⁰Produksi timah Malaya meningkat dari 50,000 ton (1920) menjadi 70,000 ton (1924), dan 64,627 ton pada tahun 1939. Lihat Lim Chang Yah, *Economic Development of Modern Malaysia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967), hal. 56, 63, 319

¹¹J. M. Gullick., *Malaysia*, *op.cit.*, hal. 68

57% dari total produksi dunia, dengan jumlah produksi sekitar 341,900 ton pertahun.¹² Sampai tahun-tahun terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, produksi karet Malaya secara keseluruhan mencapai 600,000 ton pertahun yang sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat.

Secara umum sampai menjelang perang Dunia Kedua, timah masih merupakan bagian terpenting dari perkeonomian Malaya. Investor-investor Inggris dan ekonomi kolonial Inggris secara keseluruhan amat bergantung pada timah. Bagaimana pun jika dibandingkan dengan timah, karet sebagai ekspor utama jauh lebih penting. Sebagai perbandingan pada tahun 1916, pendapatan Inggris dari hasil ekspor karet adalah sebesar 26.8% dari total ekspor berbanding timah yang nilainya hanya sekitar 21.5%.¹³ Sejak itu, industri karet telah menjadi bagian yang terpenting dari perekonomian Malaya secara keseluruhan sampai pecah Perang Dunia Kedua.

Sampai menjelang Perang Dunia Kedua Malaya merupakan salah satu wilayah koloni Inggris yang terkaya. Ia merupakan satu-satunya wilayah yang terpenting untuk mendapatkan dollar Amerika bagi Inggris. Perdagangan di Malaya sampai tahun 1938 melebihi dari 17 daerah koloni di Afrika, dan lebih dari seperdua perdagangan Inggris di India.¹⁴

Kenyataan-kenyataan itulah yang kemudian mempengaruhi dan meletakkan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya persoalan-persoalan lain yang jauh lebih rumit dan kompleks setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

¹²Lim Chong Yah, *op.cit.*, hal. 94

¹³Sampai tahun 1937, karet masih merupakan bagian terpenting dari hasil ekspor Malaya, yaitu 54.1% dari total ekspor, berbanding Timah yang hanya 21.5% . *Ibid.*, hal. 97

¹⁴Khong Kim Hoong, *op.cit.*, hal. 9

Selain turut pula mewarnai dan mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan yang radikal dari pola kebijakan politik kolonial Inggris yang jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Perkembangan sosio-politik Malaya untuk waktu-waktu setelah berakhirnya perang menjadi lebih rumit dan kompleks, antara lain ditandai dengan perkembangan gerakan komunis yang mencapai titik puncak seperti yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

C. Tumbuh dan Berkembangnya Masyarakat Majemuk

Terjadinya transformasi ekonomi di Malaya bukan merupakan satu-satunya akibat politik kolonialisme dan imperialisme Inggris di Malaya. Perkembangan-perkembangan lain yang terjadi bersamaan dengan perubahan dan ekspansi dalam struktur ekonomi yang kemudian memberikan pengaruh yang penting terhadap perkembangan sosio-politik di Malaya adalah tumbuh dan berkembangnya struktur masyarakat majemuk. Munculnya tiga kelompok etnis terbesar yaitu Melayu, Cina dan India, sebagian disebabkan oleh gelombang migrasi secara besar-besaran penduduk dari Cina dan India ke Malaya.

Sebelum tahun 1874, kelompok etnis terbesar yang merupakan penduduk pribumi adalah etnis Melayu. Mereka umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan dan pesisir pantai dengan Bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kegiatan perekonomiannya secara umum masih bersifat ekonomi tradisional dengan orientasi subsistensi yaitu mengolah lahan pertanian secara tradisional seperti bersawah padi, berkebun karet dan nelayan tradisional. Sebagian kecil yang lain terlibat dalam sektor perdagangan dan pemerintahan sebagai pegawai kelas menengah dan rendah

pada kantor-kantor pemerintah.¹⁵

Sementara etnis kedua terbesar adalah masyarakat Cina yang sebagian besar mereka merupakan kelompok pendatang. Kelompok imigran Cina yang pertama umumnya terdiri dari pedagang-pedagang yang singgah di Malaya dalam perjalanan dagangnya. Pemukiman-pemukiman awal kelompok ini sebagian besar hanya terjadi terutama di beberapa daerah koloni Inggris seperti Pulau Pinang, Malaka dan Singapura. Tidak seperti kelompok imigran yang datang dari daerah-daerah yang lain seperti yang terjadi di Malaka, kelompok imigran Cina pertama ini telah dapat berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan budaya Melayu pada umumnya.

Pada pertengahan abad ke-19, penduduk Cina dari Negeri-Negeri Selat berhijrah ke daerah-daerah yang umumnya kaya dengan hasil timah seperti di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Sebagian dari mereka merupakan kelompok penanam modal dan tenaga-tenaga buruh yang dipekerjakan di beberapa daerah pertambangan timah milik para bangsawan Melayu di daerah-daerah tersebut. Meskipun jumlahnya kecil, kehidupan mereka diatur oleh sistem norma dan berbagai aturan, selain harus pula menganggotai organisasi-organisasi tertentu seperti *Kongsi-Kongsi Gelap*, di samping berkewajiban untuk memberikan sumbangan serta menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi pada organisasinya.

Perkembangan selanjutnya terjadi setelah Inggris memulai politik campurtangan di negeri-negeri Melayu, imigran-imigran Cina dalam jumlah

¹⁵S. Hussin Ali, *Rakyat Melayu: Nasib dan Masa Depan* (Jakarta: Intisarana Aksara, 1985), hal. 23

yang cukup besar didatangkan ke Malaya. Migrasi orang-orang Cina ke Malaya secara besar-besaran umumnya terjadi melalui suatu sistem yang disebut sebagai *Kongsi atau Credit Ticket*.¹⁶ Ekspansi ekonomi yang dilakukan Inggris melalui pembukaan beberapa daerah pertambangan timah yang baru, telah membawa konsikkuensi logis tentang kebutuhan tenaga buruh. Inggris diperhadapkan dengan masalah keengganan penduduk pribumi Melayu menjadi buruh di pertambangan-pertambangan timah milik Inggris. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat Cina untuk membawa masuk keluarga dan warganya untuk dipekerjakan pada pertambangan-pertambangan timah di Malaya.

Migrasi orang-orang Cina ke Malaya melonjak dengan keras pada akhir abad ke-19. Selain didorong oleh perekonomian Malaya yang berkembang pesat, juga didorong oleh beberapa faktor lain seperti daya tarik daerah 'Nanyang' (wilayah-wilayah di Laut Cina Selatan) serta kondisi di negeri Cina sendiri. Faktor-faktor kondisi sosial ekonomi, tekanan politik, geografis dan demografi di China seperti masalah kelaparan, pengangguran, ledakan penduduk, bencana alam dan beberapa masalah lain yang timbul akhirnya mendorong sebagian besar mereka yang berasal dari daerah China selatan seperti Fukkien, Kwantung, dan Kwangsi untuk bermigrasi

¹⁶Dengan sistem ini buruh-buruh Cina diambil melalui suatu perjanjian. Mereka diberi sejumlah uang pendahuluan untuk biaya dan segala perbelanjaan selama perjalanan. Karena itu mereka terikat pada perjanjian untuk suatu jangkawaktu tertentu, sehingga utangnya dilunasi. Lihat J. Ee, "Chinese Immigration To Malaya 1896 - 1941", *Journal of Southeast Asian History* (Vol.2, No. 1, March 1961), dan Leong Yee Fong, "Permulaan Kesedaran Buruh Cina di Tanah Melayu", dalam Khoo Kay Kim, eds., *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan* (Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1982), hal. 192

ke Malaya.¹⁷

Sampai tahun 1875, sejumlah 31.000 orang migran Cina dilaporkan telah sampai di Singapura. Dua kali kelipatan dari jumlahnya pada tahun 1870 yang hanya berjumlah 14.000 orang. Antara tahun 1875-1927, jumlah mereka yang bermigrasi ke Singapura secara keseluruhan berjumlah hampir 6 juta orang.¹⁸ Bagaimanapun, Singapura bukanlah merupakan satu-satunya daerah pendaratan atau daerah tujuan kelompok imigran Cina. Dari Singapura imigran Cina kemudiannya menyebar ke berbagai belahan Asia Tenggara seperti Siam, Filipina, Indonesia dan Malaya. Meskipun demikian Malaya merupakan daerah tujuan utama. Sampai tahun 1911, jumlah mereka sekitar 693.000 orang, hampir 29.5% dari jumlah keseluruhan penduduk Malaya ketika itu. Jumlah itu meningkat menjadi 856,000 (29.4%) pada tahun 1921, 1.285.000 (33.9%) pada tahun 1931, menjadi 1.884.000 orang pada tahun 1947 atau sekitar 38.4% dari jumlah keseluruhan penduduk Malaya.¹⁹

Sementara kelompok etnis ketiga terbesar adalah India. Sebagian besar mereka berasal dari wilayah India bagian selatan, terutama Madras, dan sebagian yang lain dari India bagian utara terutama daerah Punjabi. Masyarakat India sudah mulai menetap di Malaya sejak awal pemerintahan Inggris di Negeri-Negeri Selat yang sebagian besar dipekerjakan sebagai tenaga-tenaga buruh khususnya di daerah perkebunan. Kebanyakan mereka

¹⁷Untuk uraian lebih lanjut lihat K. G. Tregonning, *A History of Modern Malaya* (New York: David McKay Co., 1964), hal. 174

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Rujuk laporan *Federation of Malaya: 1957 Population Census Report*, hal.3, dan juga *Monthly Statistical Bulletin of West Malaysia, July 1970* (Kuala Lumpur: Departement of Statistic, 1970) hal. 3-4

masuk ke Malaya umumnya melalui *Sistem Kangany*.²⁰

Imperialisme Inggris yang berkembang pesat setelah tahun 1874, di samping kemajuan pesat di bidang pertanian ekspor seperti karet dan kelapa sawit menyebabkan migrasi orang-orang India ke Malaya melonjak dengan keras. Mereka yang berjumlah 75.000 orang pada tahun 1891 meningkat menjadi 120.000 orang pada tahun 1901, 267.159 (1911) lalu menjadi 471.536 pada tahun 1921. Menjelang tahun 1931, mereka secara keseluruhan diperkirakan berjumlah sekitar 621.774 orang.²¹

Masyarakat India di Malaya secara umum kebanyakannya berdomisili di daerah-daerah perkebunan karet milik pemerintah ataupun di perkebunan-perkebunan milik kapitalis Cina dan Eropa. Menjelang awal abad ke-20, sebagian besar mereka telah diserap sebagai tenaga-tenaga buruh kontrak di perkebunan-perkebunan karet dan pertambangan timah. Sebagian yang lain diserap di sektor pemerintahan, khususnya pada Departement Pekerjaan Umum dan Angkatan Bersenjata Inggris. Sebagian kecil mereka yang berpendidikan diserap pula oleh lembaga-lembaga professional sebagai guru, insinyur, pengacara dan staf administrasi pada kantor-kantor pemerin-

²⁰Sistem ini mengatur proses kemasukan tenaga buruh India ke Malaya. Dengan sistem ini, salah seorang imigran yang telah lama bekerja sebagai mandor di perkebunan - perkebunan, diutus ke India untuk mendatangkan tenaga - tenaga buruh dari daerah asalnya untuk dibawa masuk ke Malaya. Buruh-buruh itu tidak terikat dengan perjanjian tertentu, tetapi diharuskan untuk membayar kembali segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan mereka ke Malaya. lihat, M.R. Stenson, *Industrial Conflict in Malaya: Prelude To The Communist Revolt 1948* (London: Oxford University Press, 1970), hal. 26-27

²¹Ooi Jin Bee, *Land, People and Economy in Malaya* (London: Longman, 1967), hal. 117

tah.²²

Sejumlah kecil yang lain terlibat dalam sektor perdagangan terutama mereka yang berasal dari India bagian utara seperti Sindhi, Benggali, Gujerat, Parsais dan Marwais. Mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan dan membuka usaha perdagangan, terutama tekstil di kota-kota besar seperti Pulau Pinang, Singapura, Kuala Lumpur, Ipoh, dan beberapa kota lain di bagian pantai barat.²³ Seperti umumnya masyarakat Cina, kelompok masyarakat India juga menganggap Malaya hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk memperbaiki taraf kehidupan ke tahap yang lebih baik. Setelah berhasil mengumpulkan kekayaan mereka lalu kembali ke daerah asalnya.

Tumbuh dan berkembangnya struktur masyarakat majemuk di Malaya dengan tiga etnis terbesar, yaitu Melayu, Cina dan India dapat dikatakan hasil dari perkembangan dan perubahan-perubahan ekonomi. Selain merupakan dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan perdagangan yang berkembang pesat di Malaya sejak pada paruh kedua abad ke 19. Untuk jangka waktu yang cukup lama, pemerintah kolonial telah memperkenalkan kebijakan *laissez faire* untuk mendatangkan sejumlah tenaga buruh dari Cina dan India. Sewaktu Inggris memberlakukan pembatasan kemasukan imigran asing pada 1930, jumlah mereka telah mencapai lebih dari seperdua jumlah penduduk Malaya secara keseluruhan.²⁴

²²Khong Kim Hoong, *op.cit.*, hal. 13

²³S. Asaratnam, *Indian in Malaysia and Singapore* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1970) hal.32

²⁴Khong Kim Hoong, *op.cit.*, hal. 13

Tiga etnis terbesar di Malaya pada umumnya tidak hanya dipisahkan oleh pengkhususan dalam bidang ekonomi, yaitu orang Melayu identik dengan masyarakat petani di pedesaan, etnis Cina di perkotaan, pertambangan timah dan daerah perkebunan karet, sementara India sebagai masyarakat kelas buruh dibidang pertanian, khususnya di perkebunan-perkebunan karet, tetapi juga dalam hal-hal lain. Mereka dipisahkan juga oleh kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Masyarakat Melayu umumnya menganut Agama Islam yang menggunakan bahasa Melayu dalam pergaulan sehari-hari. Sementara Cina sebagian besar menganut berbagai agama seperti Kungfusisme, Toisme dan Buddhisme, yang bertutur dalam dialek yang beragam seperti Kantonis, Hokkien, Teachew, Hainan dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat India pula umumnya merupakan penganut Agama Hindu yang fanatik dengan menggunakan Bahasa Tamil sebagai bahasa komunikasi dalam pergaulan sehariannya. Perbedaan-perbedaan yang wujud dalam segala hal di kalangan bangsa yang berragam itu, menyebabkan tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kalangan penduduk di Malaya. Kondisi-kondisi itulah yang kemudian memberikan dampak dan pengaruh yang cukup penting terhadap perkembangan politik Malaya beberapa waktu kemudian, terutama dalam perkembangan politik Malaya untuk kurun waktu pasca perang.

D. Gerakan-Gerakan Politik di Malaya Sebelum Perang Dunia Kedua

Perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Malaya yang merupakan dampak dari politik imperialisme Inggris di Malaya sampai menjelang awal abad ke-20, dalam banyak hal telah memberikan warna dan

pengaruh tersendiri terhadap pola perkembangan gerakan-gerakan politik yang terjadi di Malaya sebelum Perang Dunia Kedua. Di samping pengaruh perkembangan-perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia umumnya dan di Asia Tenggara pada khususnya.

Khusus di kalangan orang-orang Melayu, gerakan-gerakan politik yang terjadi secara umum mengalami tiga tahap perkembangan, yaitu tahap keagamaan (1906-1926), tahap sosial-ekonomi (1926-1936) dan tahap sosio-politik (1937-1941).²⁵ Dalam hal ini seperti dikatakan William Roff, pergerakan politik Melayu sebelum Perang Dunia Kedua secara umum dipimpin oleh tiga golongan yang cukup berpengaruh, yaitu golongan reformis Islam yang berpendidikan Arab, kelompok intelektual yang berpendidikan Melayu, dan gerakan-gerakan politik yang dipelopori oleh kelompok elite birokrat Melayu yang sebagian besar mendapat pendidikan Inggris.²⁶

Gerakan-gerakan politik Melayu pada tahap awal perkembangannya banyak mendapat pengaruh terutama dari perkembangan gerakan pembaharuan Islam yang berlangsung di Timur Tengah ketika itu. Sekelompok mahasiswa Melayu yang belajar di Timur Tengah seperti Mesir, Mekah dan Turki telah terpengaruh dengan gerakan-gerakan pembaharuan Islam seperti yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897), Sheikh Muhammad Abduh (1849-1905), Hassan Al Banna (1906-1949), dan Gerakan Turki Muda pada

²⁵Pembagian tahap-tahap perkembangan pergerakan politik Melayu sebelum pecah perang seperti dikemukakan oleh Raden Soenarno. Lebih lanjut lihat Raden Soenarno, "Malay Nationalism 1900-1941", dalam *Journal of Southeast Asian History*, (Vol.I, No:I, 1960), hal. 8-17

²⁶ William Roff, *op.cit.*, hal. 254

awal abad ke 20.²⁷

Gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah itulah yang kemudian berpengaruh terhadap kemunculan gerakan pembaruan Islam di Malaya pada abad ke-20. Beberapa orang mahasiswa yang pernah belajar di Timur Tengah yang dipimpin oleh Syed Sheikh Al Hadi yang pernah belajar dengan Muhammad Abduh, telah mempelopori gerakan tersebut bersama Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al Azhari, Sheikh Muhammad Salim Al Kholili, Haji Abbas Muhammad Taha dan beberapa orang yang lain. Mereka mulai bergerak dengan menerbitkan majalah *Al-Imam* pada tahun 1906.²⁸

Perjuangan kelompok reformis Islam itu memasuki tahap yang lebih penting ketika mereka berhasil mendirikan sekolah-sekolah agama yang bersifat modern. Sistem pendidikan di sekolah-sekolah agama yang sebelumnya hanya memberikan penekanan terhadap belajar Al-Quran dan Fardhu Ain telah mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan munculnya sekolah-sekolah agama modern, dengan penekanan terhadap studi tentang Islam dalam konteks yang lebih luas dan disesuaikan dengan perkembangan dunia modern. Beberapa Sekolah Agama yang berciri baru telah terbentuk seperti *Madrasah Muhammadiyah Kota Bharu (1917)*, *Madrasah Al-Mansyur Islamiyah Pulau Pinang (1918)*, *Sekolah Al-Dinniah Padang Rengas (1924)* dan *Daeratul Maarifiil Wataniah Kepala Batas (1925)*. Selain itu, mereka berhasil menerbitkan beberapa surat kabar dan majalah baru selain *Al-Imam* seperti

²⁷Lebih lanjut lihat Khoo Kay Kim, "Suasana Politik di Tanah Melayu Perang Dunia II", dalam Khoo Kay Kim, eds., *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan* (Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1982), hal. 179. lihat juga Mohd Sarim Haji Mustajab, "Gerakan Islah Islamiyah di Tanah Melayu 1906-1948", *Ibid.*, hal. 149-172

²⁸Mohd Sarim, *op.cit.* hal. 152

Pengasuh (Kota Bharu, 1918), *Al-Kitab* (Kota Bharu, 1920), *Idaran Zaman* (Pulau Pinang, 1925), *Seruan Al-Azhar* (Cairo, 1925) dan *Al Ikhwan* (Pulau Pinang, 1926).²⁹

Tahap kedua perkembangan gerakan politik Melayu terjadi setelah kemunduran kelompok agama pada sekitar tahun 1920-an. Sebagian disebabkan oleh munculnya kelompok pemimpin muda berpendidikan Melayu dan Inggris, terutama kalangan mereka yang merupakan lulusan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. MPSI telah memperkenalkan kelompok muda Melayu dengan gerakan nasionalisme yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia ketika itu, hasil pembacaan beberapa surat kabar dan majalah yang banyak memuatkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia seperti *Persatuan Indonesia*, *Suara Rakyat Indonesia*, *Bintang Timoer* dan *Bintang Hindia*. Dengan pemberitaan seperti itu, pemimpin-pemimpin muda di MPSI, akhirnya telah tertarik dengan perjuangan *Budi Oetomo*, *Sarekat Islam*, *Partai Nasional Indonesia (PNI)*, *Muhammadiyah* dan beberapa organisasi lain.³⁰

Pengaruh gerakan nasionalisme Indonesia makin kuat setelah terbentuknya *Ikatan Pemuda Pelajar* dan *Ikatan Semenanjung Boerneo* pimpinan Abdul Hadi Hasan, Ibrahim Yaakob, Hasan Haji Manan, Muhamad Isa Mahmood, Abdul Karim Rashid dan beberapa orang pemuda lainnya. Organisasi itu selain bertujuan untuk menanamkan kesadaran berbangsa di kalangan orang-orang Melayu (terutama kaum muda), juga bercita-cita untuk menggabungkan

²⁹Khoo Kay Kim, *op.cit.*, hal. 182

³⁰Kamaruzaman Abdul Kadir, *Nasionalisme Dalam Puisi Melayu Modern 1933-1957* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1982), hal. 7

Malaya ke dalam lingkungan negara besar di bawah konsep penyatuan *Indonesia-Raya* atau *Melayu Raya*.³¹

Kesadaran masyarakat Melayu terhadap politik mulai tampak dengan jelas sekitar tahun 1930-an. Antara tahun 1937-1939 telah tumbuh dan berkembang organisasi pergerakan yang bersifat kedaerahan terutama di Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang seperti *Persatuan Melayu Perak* (1937), *Persatuan Melayu Selangor* (1939), *Persatuan Melayu Pahang* (1938), dan *Persatuan Melayu Negeri Sembilan*. Organisasi-organisasi ini umumnya dipimpin oleh kelompok elite dan birokrat Melayu yang berpendidikan Inggris. Hal itu menyebabkan pola dan arah perjuangannya cenderung bersifat moderat dan koperatif. Dengan kata lain perjuangan mereka masih didominasi oleh keberadaan dan kepentingan Raja-Raja Melayu dan sikapnya tidak terlalu menonjolkan penantangan terhadap penjajahan Inggris. Apa yang nampak lebih merupakan desakan-desakan kepada Inggris untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan penduduk pribumi Melayu. Di samping membuat desakan kepada Inggris, untuk memberikan kuasa dan kesempatan yang lebih luas dalam bidang pemerintahan selain perbaikan di bidang pendidikan.³²

Beriringan dengan kemunculan organisasi yang moderat dan konservatif itu, lahir organisasi-organisasi yang lebih radikal dalam sifat dan tujuan perjuangannya. Hal itu ditandai dengan berdirinya *Kesatuan Melayu Muda* (KMM) pada tahun 1937 yang dipimpin Ibrahim Yaakob, Mustafa Hussin dan Ishak Haji Muhammad. Tujuan pokok perjuangan KMM antara lain adalah

³¹ *Ibid.*, hal. 9

³² K.G. Tregonning., *op.cit.*, hal. 280

politik non-kopreratif dan kemerdekaan Malaya secepatnya dibawah konsep penyatuan *Indonesia Raya* atau *Melayu Raya*.³³ KMM terus bergerak sampai Jepang menduduki Malaya pada tahun 1942.

Sementara itu, politik orang-orang Cina di Malaya sebelum Perang Dunia Kedua umumnya lebih banyak tertumpu kepada pergolakan politik yang terjadi di Cina. Kebanyakan mereka masih menganggap Cina sebagai bagian dari tanah airnya. Menjelang abad ke-20, gerakan revolusioner di Cina (anti-Manchu) pimpinan Dr. Sun Yat Sen banyak mempengaruhi kegiatan-kegiatan atau pergerakan politik masyarakat Cina di Malaya. Gerakan itu telah mendapat dukungan penuh karena kebanyakan orang-orang Cina yang berimigrasi ke Malaya umumnya adalah untuk menghindari tekanan keras Dinasti Manchu.

Pengaruh dari gerakan revolusioner di Cina mulai masuk dalam kalangan orang-orang Cina di Malaya dengan terbentuknya organisasi *Chung Ho Tang* yang dipimpin oleh Yu Lieh pada tahun 1901.³⁴ Yu Lieh yang merupakan teman seperjuangan Sun Yat Sen, telah mempelopori gerakan revolusioner di Malaya dan Singapura. Cabang-cabang dari *Chung Ho Tang* kemudian terbentuk di Kuala Lumpur, Perak, Johor dan Seremban. Dalam kunjungannya ke Malaya pada tahun 1906, Dr. Sun Yat Sen kemudian telah meresmikan pembentukan organisasi *Tung Meng Hui* di Singapura yang dipimpin oleh Tan Chor Lam, Teo Eng Hock dan Lim Nee Soon. Beberapa cabang telah terbentuk di beberapa tempat seperti di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kuala Pilah,

³³Raden Soenarno, *op.cit.*, hal. 18

³⁴Ranjit Singh Malhi, *Sejarah Kertas 2 STPM* (Kuala Lumpur: Federal Publication, 1989) hal. 90

Seremban, Ipoh dan di beberapa tempat lain.³⁵

Masyarakat Cina di Malaya telah memberikan bantuan moral, material dan keuangan kepada gerakan revolusioner yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen yang kemudian berhasil mendirikan Republik China melalui revolusi Cina 1911. Setelah itu organisasi *Tung Meng Hui* telah disusun kembali sebagai bagian dari *Parti Koamintang (KMT)* yang cabang pertamanya terbentuk di Malaya pada tanggal 18 Desember 1912. Tujuan KMT antara lain adalah menyatukan negeri Cina dengan memperkuat kekuatan dan persatuan melalui industrialisasi dan modernisasi.³⁶

Konsep seperti yang ditawarkan oleh KMT yang menganggap semua warga Cina diseberang laut sebagai warganegara Cina atau *Hua Chiao* telah menarik minat sebagian besar orang Cina di Malaya terhadap perjuangan KMT. Dalam tahun-tahun 1920-an propaganda-propaganda KMT telah disebarluaskan kepada segenap lapisan masyarakat Cina melalui sekolah-sekolah. Dalam pada itu, KMT pula telah mulai diresapi oleh unsur-unsur komunis akibat terjalannya kerjasama KMT-Komunis di Cina mulai tahun 1922.

Kelompok komunis yang terdapat dalam tubuh KMT di Malaya telah melakukan berbagai aksi permogokan dan kegiatan-kegiatan anti-Inggris. Hubungan yang makin memburuk antara Inggris-KMT berikutan dengan aksi-aksinya itu, menyebabkan KMT di Malaya akhirnya telah dinyatakan sebagai

³⁵Victor Purcell, *Chinese in Malaya*, (London: Oxford University Press, 1948), hal. 209

³⁶P'ing Poh Seng, "The Koamintang in Malaya.," dalam *Journal of Southeast Asian History*, (Vol. 2, No. 1, March 1961), hal. 12

organisasi terlarang oleh Inggris pada tahun 1925.³⁷

Pembubaran gabungan KM Komunis di Cina pada tahun 1927 diikuti kemudian oleh serangan Jepang ke atas Cina pada 1937, banyak mempengaruhi kegiatan politik orang-orang Cina di Malaya pada umumnya. Selain mengakibatkan terjadinya persaingan keras antara KMT dan komunis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Cina di Malaya.

PKM telah terbentuk pada tahun 1930 dengan tujuan utamanya untuk pembentukan sebuah republik komunis di Malaya. PKM telah bergerak di bawah tanah dan hampir seluruh anggotanya terdiri dari orang-orang Cina. Antara tahun 1937-1938, PKM telah melancarkan beberapa aksi pemogokan yang kemudian mengakibatkan penangkapan dan pembuangan beberapa orang pemimpin PKM ke Cina.

Peristiwa pendudukan Jepang ke atas Cina pada tahun 1937 telah menyebabkan perjuangan komunis di Malaya mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Cina di Malaya. PKM mengambil kesempatan itu dengan menjadi pembela kaum buruh dan orang-orang Cina di Malaya dengan membentuk *Anti Japanese Salvation Association*. Sejumlah kegiatan dan aksi anti Jepang telah dilakukan, antaranya dengan memboikot barang-barang produksi Jepang di Malaya, selain berhasil pula mengumpulkan uang sejumlah \$110 juta untuk membantu gerakan anti Jepang yang berlangsung di Cina.³⁸

Pengaruh PKM dalam masyarakat Cina bertambah kuat ketika ia ber-

³⁷ketika dibubarkan hanya empat dari cabang KMT yang terdaftar. Selebihnya banyak yang bergerak dibawah tanah. P'ng Poh Seng mengatakan bahwa kegiatan - kegiatan anti-kolonial telah digerakkan oleh kelompok komunis yang terdapat dalam tubuh KMT. *Ibid.*

³⁸M.R. Stenson, *op.cit.*, hal. 20

hasil memainkan peranannya yang lebih penting dalam pemupukan rasa anti Jepang terhadap orang-orang Cina di Malaya. Perjuangan PKM dan gerakan politik Cina di Malaya mencapai puncak ketika Jepang memulai rencana pendudukan ke atas Malaya pada penghujung tahun 1941. Sewaktu Jepang memulai serangannya di Malaya, PKM telah membentuk *Malayan Peoples Anti Japanese Army (MPAJA)*. Kelompok Koamintang pula telah membentuk *Malayan Overseas Self-Defence Army* dengan tujuannya yang utama untuk melakukan perlawanan terhadap tentara pendudukan Jepang.³⁹

Secara keseluruhan dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi sosio-politik dan perekonomian Malaya sebelum Perang Dunia Kedua telah meletakkan dasar untuk terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan politik yang jauh lebih kompleks di Malaya untuk kurun waktu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun-tahun pertama setelah Malaya mencapai kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Hal itu tampak makin jelas terutama menyangkut masalah perkembangan politik orang-orang Cina di Malaya dalam kaitannya dengan perkembangan gerakan Komunisme yang ditunggangi oleh Partai Komunis Malaya, khususnya kurun waktu antara tahun 1948 dan 1960 seperti yang akan dibahas secara lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya.

Inggris dalam banyak hal dapat dikatakan telah berhasil menerapkan politik imperialisme ke atas Malaya, yang dimulai dengan pemerintahan secara langsung dengan pembentukan *Negeri-Negeri Selat*. Dari situ, secara *de facto* Inggris telah dapat menguasai negeri-negeri Melayu yang lain, melalui pembentukan *Negeri-Negeri Melayu Bersekutu* dan kemudian

³⁹ *Ibid.*, ...

Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dengan demikian, pengaruh dan kekuatannya di Malaya secara umum dapat dikatakan tidak dapat dikalahkan oleh kekuasaan lain di dunia ketika itu.

Dengan pengecualian terhadap PKM dan KMM, tidak ada gerakan-gerakan politik anti kolonial, yang dapat melambangkan aspirasi Malaya secara keseluruhan. Pemikiran-pemikiran tentang kesatuan politik Malaya yang mengacu kepada tujuan politik lebih bersifat perjuangan suatu etnis tertentu, tanpa menampakkan unsur kesatuan antar etnis yang ada. Organisasi-organisasi seperti KMT lebih menekankan tujuannya untuk melindungi kepentingan etnis Cina untuk bersaing dengan penduduk pribumi. Hanya KMM dan PKM yang merupakan dua partai yang secara tegas memperlihatkan kemerdekaan Malaya sebagai motif utama dalam perjuangannya.

Meskipun demikian, tujuan kedua organisasi tersebut secara umum lebih didasari oleh perjuangan yang bersifat kesukuan. Sebagian besar pendukung PKM adalah orang-orang Cina, sementara KMM pula didominasi oleh orang-orang Melayu. Dalam pada itu PKM tidak memiliki jaringan yang luas untuk mendapatkan dukungan penuh orang-orang Cina, dan ia tidak memiliki kekuatan dan kedudukan untuk dapat bersaing dalam menjatuhkan kekuatan dan pengaruh kolonial Inggris. Demikian juga dengan KMM yang jauh lebih terbatas dalam hal dukungan maupun perjuangan. Tetapi seperti yang kita lihat dalam perkembangan selanjutnya, kesemuanya itu telah mengalami perubahan yang cukup drastis setelah pecah perang yang diikuti kemudian dengan pendudukan Jepang yang berlangsung selama kurang lebih tiga setengah tahun. Perkembangan yang lebih menarik terjadi kemudiannya untuk beberapa waktu setelah berakhir Perang Dunia Kedua seperti yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

BAB III

PERKEMBANGAN GERAKAN KOMUNIS DI MALAYA

A. Awal Perkembangan Komunisme di Malaya

Selain pengaruh dari perkembangan politik di Cina, perkembangan komunis di dunia internasional merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gerakan komunisme di Malaya pada sekitar tahun 1920-an. Konferensi Komunis Internasional Ketiga yang berlangsung di Soviet Rusia pada tahun 1919, telah mengambil suatu ketetapan untuk menyebarkan paham komunisme ke seluruh dunia. Sejalan dengan itu, Partai Komunis Cina (PKC) akhirnya terbentuk pada tahun 1921.¹

PKC yang merupakan basis dari gerakan komunis di Asia, secara rahasia berusaha menyebarkan paham komunis ke seluruh wilayah di Asia. Untuk tujuan itu, PKC mulai tahun 1922 telah merangka dan menyusun suatu bentuk strategi untuk menjalin kerjasama dengan Koamintang di Cina yang dikenal kemudian sebagai *Barisan Bersatu*.² Sejak itu, PKC melakukan

¹K.G. Tregonning, *A History of Modern Malaysia and Singapore* (Kuala Lumpur: Eastern University Press, 1974), hal. 225

²Istilah *Barisan Bersatu* seperti yang banyak disebut dalam kajian ini menunjuk kepada pengertian tentang taktik dan strategi komunis. Pada intinya, *Barisan Bersatu* adalah merupakan upaya untuk bergabung dan menjalankan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak di luar komunis, terutama dengan kelompok-kelompok buruh, petani, dan kelompok intelektual yang radikal dan masyarakat kelas menengah ke bawah sedemikian rupa. Dengan gabungan itu, pucuk pimpinan atau ikatan revolusioner tersebut akan berada di tangan proletariat dan partai komunis. Walaupun dalam kajian ini akan ditemukan banyak istilah *Barisan Bersatu*, antara lain *Barisan Bersatu PKC-KMT*, *Barisan Bersatu Comintern*, dan *Barisan Bersatu PKM*, namun konsep *Barisan Bersatu* pada prinsipnya sama, yaitu mengacu pada pengertian seperti tersebut di atas. Lihat Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng: Suatu Kajian Mengenai Barisan Bersatu Komunis di Tanah Melayu 1945-1948* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), hal. 63-64

berbagai upaya untuk mengembangkan pengaruh komunisme dengan cara menyusup masuk ke dalam cabang-cabang KMT, baik yang terdapat di Cina sendiri maupun yang bergerak di luar seperti di Malaya dan Singapura.

Gerakan komunis yang mulai tumbuh dan berkembang melalui sejumlah kegiatannya dalam cabang-cabang KMT yang bergerak di Malaya dan Singapura, semakin mendapat perhatian dengan kedatangan tokoh-tokoh komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka dan Alimin. Pada tahun 1924, Alimin sendiri dalam perjalanannya untuk menghadiri Konferensi Buruh Se-Pasifik yang berlangsung di Canton, singgah di Singapura. Kemudian pada tahun 1925, Tan Malaka selaku wakil dari Comintern untuk wilayah Asia Tenggara mendesak PKC untuk coba mempengaruhi dan menguasai kelompok-kelompok kiri yang radikal di Singapura.³

Beberapa waktu setelah berlangsungnya konferensi buruh tersebut, kegiatan-kegiatan komunis di Malaya menjadi semakin bergairah dan lebih aktif. Agen-agen komunis yang dikirim ke Malaya dan Singapura, berusaha menyusup masuk ke dalam cabang-cabang KMT. Berkat dukungan yang diberikan oleh sebagian besar guru dan siswa sekolah-sekolah Cina, dan pemuda-pemuda Cina, maka didirikan *Liga Pemuda Komunis* di Singapura pada tahun 1926. Organisasi itu memainkan peranan yang cukup penting dalam membeayai beberapa kegiatan kepemudaan, di samping sejumlah kegiatan lain yang disponsori oleh unsur-unsur komunis di Malaya. Salah satu kejayaannya yang terbesar adalah berhasil mempengaruhi dan menguasai *Nanyang General*

³ K.G. Tregonning., *op. cit.*

Labour Trade Union yang berkedudukan di Singapura.⁴

Konflik dan perpecahan yang timbul antara PKC dan KMT yang terjadi pada tahun 1927, telah memberikan pengaruh yang cukup penting terhadap gerakan komunis di Malaya. Persaingan keras antara PKC dan KMT untuk mendapatkan dukungan massa tidak hanya berlangsung di Cina, tetapi juga terjadi di Malaya, terutama dalam upaya mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat Cina. Konflik-konflik yang timbul, disamping persaingan keras antara PKC dan KMT itulah yang kemudian mendorong berdirinya Partai Komunis Nanyang (PKN) pada tahun 1927, yang merupakan cabang dari Partai Komunis Cina yang berkedudukan di Singapura. Partai Komunis Nanyang yang baru terbentuk, bertanggungjawab untuk mengkoordinir segala bentuk kegiatan di Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia, Indocina Perancis, Malaya dan Singapura sendiri. Khusus di Malaya dan Singapura, *Nanyang General Labour Trade Union* dijadikan sebagai pusat kegiatan dan pengembangannya.⁵

Keberadaan PKN memberikan keuntungan yang besar kepada PKC untuk mengembangkan komunisme di Asia karena posisinya yang strategis. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh PKC untuk menyebarkan paham komunisme dengan cara menghantar agen-agennya untuk menyusup masuk ke dalam serikat-serikat buruh, organisasi pemuda, sekolah-sekolah malam dan lain sebagainya. Di samping menerbitkan risalah-risalah tentang pemahaman ideologi komu-

⁴N.J. Ryan, *The Making of Modern Malaya* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1963), hal. 189-190

⁵*Ibid.*

nis seperti yang diterapkan di Uni-Soviet dan di tempat-tempat lain.⁶ Meskipun demikian, gerakan komunis di Malaya ketika itu masih bersifat rahasia dan bergerak untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara menyusup masuk secara pelan-pelan, terutama dalam masyarakat Cina.

Meskipun PKN berhasil menguasai organisasi buruh ini, namun kurang berhasil mempengaruhi dan mendapat dukungan orang-orang Melayu, walaupun beberapa upaya untuk menanamkan pengaruh dengan cara menjalin kerjasama dengan orang-orang Melayu, terutama mereka yang berasal dari Indonesia memang telah dilakukan sejak tahun 1926. Seperti dilaporkan oleh *Political Intelligence Bureau*, antara tahun 1928-1929 beberapa orang pemimpin komunis Cina di Malaya telah beberapa kali bertemu dan menjalin hubungan baik dengan beberapa orang pemimpin Melayu yang berasal dari Indonesia. Beberapa di antara mereka dikenal sebagai Ali, Ahmad dan Abdul Rahman. Mereka yang diketuai oleh Ali, diberi tugas untuk mengupayakan pembentukan suatu cabang komunis di Malaya yang dikhususkan untuk orang-orang Melayu. Cabang Melayu yang bergerak secara rahasia itu, kemudian dikenal sebagai *Liga Menentang Imperialisme*.⁷

⁶Maswari Rosdi, *Sejarah Malaysia Modern* (Kuala Lumpur: Seri Murni, 1990), hal. 192-193

⁷Selain tiga orang ini, terdapat sejumlah nama lain yang berasal dari Indonesia. Antaranya termasuklah Ahmad Baiki Bin Suile (Padang), Salleh Bin Shafie, Ali @ Ali Majid (Bugis), Jamaluddin (Padang), Ahmad @ Abdul Hamid (Jawa) dan Haji Muhammad bin Hashim. Mereka kemudian tertangkap oleh pihak keamanan pada tahun 1930. *Laporan Political Intelligence Bureau* seperti dikutip Khoo Kay Kim dalam, "Keterlibatan Orang-Orang Melayu Dalam Persatuan-Persatuan Sulit", *Jurnal Sejarah*, Universiti Malaya, (Vol.14, 1975/76), hal. 67-68, lihat juga "Suasana Politik di Tanah Melayu Perang Dunia II", dalam Khoo Kay Kim, eds., *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan* (Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1982), hal. 184-185

Organisasi tersebut dari waktu ke waktu telah mengupayakan beberapa langkah dan propaganda-propaganda untuk menyebarluaskan paham komunis kepada orang-orang Melayu. Beberapa propaganda Komunis yang bertujuan mempengaruhi orang-orang Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu, telah disebar-luaskan di Malaya antara tahun 1928-1930. Dilaporkan juga bahwa Ali seringkali melakukan kunjungan ke beberapa sekolah malam yang terdapat di Kampung Baharu dan Coleman Street Singapura untuk menyebarluaskan paham komunis. Antara bulan Mei-Juni 1929, Ali beserta beberapa orang temannya seperti Salleh dan Haji Muhammad juga dilaporkan telah berkunjung ke Shanghai untuk menerima beberapa pengarahan langsung dari pimpinan Komunis di Cina.⁸

Meskipun komunis pada tahap awal perkembangannya berhasil mempengaruhi dan mendapat dukungan sebagian besar masyarakat Cina di Malaya, namun tidak demikian halnya terhadap etnis Melayu dan India. Kekurang-berhasilan mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari orang-orang Melayu sebagian dikaitkan dengan keberadaan mereka sebagai penganut yang taat dan berpegang teguh kepada ajaran Agama Islam yang mengakui wujudnya Tuhan. Sementara terhadap orang-orang India kurangberhasilan itu disebabkan karena kelompok ini lebih banyak menumpukan perhatiannya terhadap perkembangan-perkembangan politik yang berlangsung di India. Mereka juga telah berpuas hati dengan kedudukan dan pekerjaan yang digeluti ketika itu, dan menganggap Malaya bukan sebagai tanah air mereka. Malaya bagi mereka adalah tidak lebih hanya sebagai tempat tinggal yang sementara, sehingga mereka kurang berminat untuk terlibat dalam berbagai persoalan

⁸ *Ibid.*

dan kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di negeri ini.

Keanggotaan PKN yang mayoritas didominasi oleh orang-orang Cina, secara tidak langsung menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak senang pada sebagian besar orang-orang Melayu dan India, terutama di kalangan mereka yang berpendidikan. Oleh sebab itu, pada tahun 1928, Sovyet Rusia telah mengirim agen-agen Comintern dari Biro Timur Jauh Shanghai untuk menyusun kembali keberadaan dan kelangsungan partai-partai komunis di Asia Tenggara. Selain ingin memastikan bahwa segala arahan dan ketetapan yang dibuatnya dapat dipatuhi dan terlaksana dengan baik sesuai yang direncanakan. Keterlibatan Comintern itu berakibat terjadi perubahan nama dari *Partai Komunis Nanyang (PKN)* menjadi *Partai Komunis Malaya (PKM)* pada bulan April 1930. Organisasi ini selanjutnya dikontrol dan dikoordinir secara langsung oleh *Far Eastern Bureau of the Comintern* yang berkedudukan di Shanghai.⁹

Untuk membantu dan memperlancar sejumlah kegiatan PKM, agen-agen Comintern dikirim ke Malaya dan Singapura. Pada bulan April 1931, seorang agen Comintern yaitu Joseph Doroux tiba di Singapura dengan membawa uang sebesar US50 dollar. Namun kedatangannya telah diketahui oleh aparat keamanan, sehingga ditangkap oleh pihak kepolisian Singapura bersama dua orang tokoh komunis Malaya lainnya. Dengan penangkapan agen-agen Comintern itu, banyak informasi penting menyangkut kegiatan-kegiatan PKM dan Biro Shanghai telah diketahui oleh pihak kepolisian. Setelah itu lebih banyak anggota PKM yang bergerak di Malaya, Hong Kong, Singapura dan

⁹Departement of Information, *The Communist Threat To The Federation of Malaya* (Kuala Lumpur: Government Press, 1959), hal. 15

Shanghai terutama pemimpin-pemimpin tertingginya telah ditangkap oleh aparat keamanan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu dengan sendirinya telah menggagalkan banyak dari rencana yang disusun oleh Biro Shanghai.¹⁰

Pembentukan PKM pada prinsipnya tidak terlepas dari cita-cita dan upaya komunis di Malaya untuk mengembangkan paham komunis dalam kalangan masyarakat. Di samping cita-cita dan tujuan politiknya yang pokok untuk membentuk sebuah Republik Malaya yang bercirikan komunis, seperti tercantum dalam Laporan Rapat Buruh Se-Malaya, sebagai berikut:

"... untuk memperjuangkan kebebasan nasional, menyusun program militer bagi menggulingkan imperialisme dan aristokrasi feodal, yang akhirnya mendorong pembentukan sebuah republik komunis di Malaya yang merupakan bagian dari komunis di Soviet, yang didukung oleh golongan proletarist dan petani..." (pen)¹¹

Zaman kemerosotan dan depresi yang melanda perekonomian dunia yang turut dirasakan Malaya pada sekitar tahun 1930-an banyak memberikan keuntungan dan kesempatan yang baik terhadap perjuangan PKM, terutama dalam upayanya menarik simpati massa dan mendapatkan dukungan masyarakat terhadap perjuangannya. Untuk tujuan itu, Shanghai telah mengarahkan PKM agar mengambil beberapa langkah, strategi dan kebijakan-kebijakan baru untuk penambahan anggota dan pengorbitan kader-kader baru. Selain menyusup masuk ke dalam berbagai organisasi-organisasi buruh.

Tanggal 06 Maret 1934 merupakan detik-detik terpenting dalam seja-

¹⁰ *Ibid.*, lihat juga Tan Ding Eing, *Sejarah Malaysia dan Singapura* (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1986), hal. 304-305

¹¹ Hanrahan, *op.cit.*, hal. 43

rah perjuangan PKM selanjutnya. Dari hasil Rapat Pleno kali ke 6, Dewan Pengurus Pusat PKM telah mengumumkan beberapa hal penting menyangkut konstitusi partai, khususnya yang berhubungan dengan masalah keanggotaan dan perencanaan strategi perjuangan selanjutnya. Antara masalah pokok yang dibahas dalam pertemuan itu, termasuklah prinsip-prinsip perjuangan partai, disiplin, tanggungjawab dan kecakapan anggota, peraturan partai, dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah keuangan partai.¹²

Dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti yang tercantum dalam konstitusi partai itu, PKM menjadi semakin kuat dan mulai menyusun serta mensponsori beberapa aksi pemogokan di beberapa serikat buruh. Di antaranya adalah beberapa aksi pemogokan buruh yang terjadi antara tahun 1936-1937. Pemogokan yang terbesar adalah peristiwa pemogokan yang terjadi di Batu Arang Selangor, yang disponsori oleh PKM dengan melibatkan sekitar 6.000 orang buruh dan berhasil pula mengambil alih pertambangan di wilayah tersebut.¹³

Pada tahun 1937, Comintern telah mengarahkan PKM untuk bekerjasama dengan Inggris dan Perancis dalam upaya menantang rezim Fasisme. Hal itu berarti, PKM harus berusaha menghindarkan diri untuk melakukan aksi-aksi revolusioner di samping berbagai tindak kekerasan dan kejahatan lainnya. Hal yang demikian itu, menyebabkan telah terjadi perpecahan di kalangan pemimpin PKM karena kelompok-kelompok radikal dalam organisasi PKM lebih menginginkan untuk melanjutkan perjuangan melalui aksi-aksi yang sifat-

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat M.R. Stenson, *Industrial Conflict in Malaya: Prelude To The Communist Revolt 1948* (London: Oxford University Press, 1970), hal. 14-15

nya revolusioner dalam menghadapi Inggris dan kelompok nasionalis Cina sendiri.

Untuk mengantisipasi hal itu, selain sebagai langkah untuk menghadapi berbagai kemungkinan lain yang bakal terjadi, Comintern mengambil suatu kebijakan dengan mengirim wakilnya yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, yaitu Lai Teck untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik yang timbul di kalangan pemimpin PKM. Kedatangan Lai Teck dalam beberapa hal telah mempengaruhi taktik dan strategi PKM untuk beberapa waktu kemudian. Untuk menyatukan kembali pemimpin-pemimpin PKM, Lai Teck telah menyarankan suatu bentuk kompromi yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelabui Inggris dan kelompok nasionalis Cina dengan cara menjalin kerjasama secara lahiriah semata. Sedangkan kegiatan atau tindakan-tindakan yang bersifat revolusioner dalam arti yang sesungguhnya akan terus digalang dan ditingkatkan, terutama dalam upayanya untuk menguasai kelompok buruh dan perekonomian Malaya ketika itu.

Serangan Jepang terhadap Cina pada tahun 1937, telah berdampak terhadap perjuangan komunis bukan saja di Cina tetapi juga di Malaya. Koamintang (KMT) dan Partai Komunis Cina kembali mengumumkan pembentukan suatu front yang dikenal sebagai *Barisan Bersatu* (PKC-KMT) untuk menghadapi agresi militer Jepang secara bersama-sama. PKM mengambil kesempatan itu dengan memperkuat posisi dan pengaruhnya di Malaya.

Sementara itu, kelompok masyarakat Cina di Malaya telah memberikan perhatian yang serius terhadap agresi militer Jepang ke Cina, dengan menyusun berbagai program anti Jepang bagi membantu perjuangan di Cina sebagai wujud solidaritas mereka. Selain itu, mereka telah mengambil tindakan dengan memblokir barang-barang produksi Jepang. Dalam pada itu

PKM sempat pula menyusup masuk ke dalam kelompok-kelompok itu bahkan turut memegang beberapa jabatan penting dalam beberapa organisasi yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Hal itulah yang kemudian mengantarkan PKM kepada posisi yang lebih mantap menjelang tahun 1939. Sementara itu, Lai Teck sendiri telah diberi kepercayaan oleh PKM untuk menduduki jabatan Sekretaris Jenderal pada tahun 1939.

B. PKM dan Kegiatannya Sewaktu Pendudukan Jepang di Malaya 1941-1945

Serangan Jepang ke atas Malaya antara bulan Desember-Januari 1941, telah memberikan pengaruh dan kesempatan yang lebih baik untuk PKM memperkuat pengaruh dan kekuatannya di Malaya. Ketika Jepang berhasil mendaratkan pasukan tentaranya di bagian utara Malaya pada 8 Desember 1941, PKM telah menawarkan kerjasama dan bantuannya kepada Inggris di Malaya. Tawaran itu untuk beberapa waktu kemudian telah diterima oleh Inggris dalam keadaan terpaksa. Inggris ketika itu diperhadapkan dengan pilihan yang memang mengharuskan ia untuk menjalin kerjasama dengan komunis yang digerakkan oleh *MPAJA (Malayan People Anti Japanese Army)* bagi menghalang agresi militer Jepang ke atas Malaya.

Selama pendudukan Jepang yang berlangsung di Malaya antara tahun 1941-1945, PKM mengalami beberapa perkembangan yang agak menguntungkan. Perlakuan yang keras dan menindas oleh tentara pendudukan Jepang terhadap masyarakat Cina di Malaya, menyebabkan timbul desakan-desakan yang disuarakan oleh kelompok pemimpin Cina supaya masyarakat Cina bersedia

untuk menjalin kerjasama dengan Inggris.¹⁴ Untuk itu, hampir 2000 orang sukarelawan Cina membentuk benteng pertahanan bagi memperlambat gerakan dan serangan Jepang ke atas Malaya.¹⁵ Namun, karena gerakan militer Jepang yang lebih cepat dari dugaan semula, menyebabkan kelompok-kelompok gerilya itu tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya sempat melakukan serangan secara bergerilya terhadap konvoi-konvoi Jepang, selain menghancurkan jaringan keretapi untuk menghalang gerakan tentara Jepang ke arah selatan.

Dalam kondisi perang seperti itu, sebagian kecil pemimpin-pemimpin Cina yang lain telah melarikan diri untuk mencari perlindungan kenegaraan lain seperti India, Thailand dan Indonesia. Sementara pemuda-pemuda Cina yang enggan bekerjasama dan tidak mau tunduk kepada arahan Jepang, telah melibatkan diri secara aktif dalam berbagai gerakan anti-Jepang.¹⁶ Namun dalam suatu pertempuran akhir yang terjadi di Singapura, kelompok sukarelawan dari masyarakat Cina telah mengalami kekalahan akibat personel, peralatan dan persenjataan perang yang kurang memadai.

Lanjutan dari itu, satu gerakan yang bertujuan menyusun kekuatan untuk mempertahankan Singapura dari kejatuhannya ke tangan tentara pendudukan Jepang telah terbentuk di Malaya. Organisasi yang dikenal sebagai *Special Corps 101* itu dipelopori oleh kelompok yang terdiri dari pegawai-pegawai Inggris yang cakap dan berpengalaman dalam perang gerilya.

¹⁴Cheah Boon Kheng, *Red Star Over Malaya* (Singapore:Singapore University Press, 1983), hal. 46

¹⁵R. Clutterbuck, *The Long-Long War: The Emergency in Malaya 1948-1960* (London: Cassel & Co., Ltd., 1966), hal. 15

¹⁶ Cheah Boon Kheng, *op.cit.*, hal. 47

anggota-anggota KMT serta sebagian besar orang-orang Cina yang merupakan anggota PKM.¹⁷

Organisasi tersebut dalam tindakannya beroperasi secara rahasia. PKM telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingannya, dengan mengutus sejumlah 165 orang wakilnya untuk mendapatkan latihan di beberapa pusat latihan yang dikoordinir secara langsung oleh Colonel Gawin dan Spencer Chapman. Latihan tersebut dimulai pada 21 Desember 1941 di sebuah pusat yang dikenal sebagai *101 Special Training School (101 STS)* yang berkedudukan di Singapura. Mereka yang mendapat latihan di *101 STS* inilah yang kemudian menjadi basis untuk terbentuknya pasukan-pasukan gerilya *Malayan People Anti Japanese Army (MPAJA)* pada bulan Maret 1942, yang bergerak terutama di Selangor, Negeri Sembilan dan Malaka.¹⁸

Pada tahap awal perkembangannya, keanggotaan MPAJA selain terdiri dari mereka yang secara sukarela, juga ada yang dipaksa untuk berjuang bersama-sama MPAJA. Keanggotaan MPAJA umumnya terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia 19 tahun ke atas, yaitu kelompok umur yang sudah mulai menyadari kepentingan politik tanah air akibat situasi dan tekanan keras yang dilakukan oleh tentara pendudukan Jepang. Selain itu, MPAJA juga turut dianggotai oleh sebagian besar mereka yang sebelum pecah Perang Dunia Kedua merupakan pekerja-pekerja di perkebunan karet, buruh-buruh di pertambangan timah, pemotong kayu, tukang pangkas rambut dan pekerja-

¹⁷Tey Tiong Lim, "*Sejarah Penglibatan Politik Orang-Orang Cina di Tanah Malayu 1930-1945*", (Thesis B.A (Hons.), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1986), hal. 98

¹⁸R. Clutterbuck, *Riot and Revolution in Singapore and Malaya 1945-1963* (London: Faber & Faber, 1963), hal. 37, Hanrahan, *op.cit.*, hal. 64

pekerja di pertokoan.¹⁹

Pada tahap awal perkembangannya, MPAJA telah memusatkan perhatian dengan melakukan penyerangan terhadap kelompok atau mereka yang dicurigai telah bekerjasama dengan Jepang selama pendudukan. Untuk tugas itu, MPAJA telah mengarahkan korps gerilyanya yang berjumlah empat resimen, ditambah satu lagi resimen pada pertengahan tahun 1942 sebagai langkah untuk memperkuat dan memperlancarkan gerakannya. Setiap resimen dipecah menjadi beberapa kelompok kepada lima hingga enam patroli, yang masing-masing berkekuatan sekitar 400 - 500 orang yang memang dilatih khusus untuk tujuan itu.²⁰

Resimen kelima MPAJA merupakan unit yang terkuat, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berkarisma seperti Chin Peng dan Lau Mah. Selain dilengkapi dengan satu pasukan yang dikenal sebagai *Traitor Killing* yang terbentuk pada penghujung tahun 1942.²¹ Misinya adalah untuk menghancurkan kelompok-kelompok tertentu yang dicurigai telah bekerjasama atau memberikan informasi tentang keberadaan dan perjuangan MPAJA kepada tentara pendudukan Jepang. Mereka yang ditangkap, akan disandera atau langsung dikenakan hukuman mati.

Pada tahap awal perkembangannya, MPAJA banyak mendapat bantuan dan kerjasama dari beberapa organisasi lain terutama dari kelompok *Malayan People Anti Japanese Union (MPAJU)*. Organisasi itu banyak membantu per-

¹⁹ Harry Miller, *The Communist Menace in Malaya* (London: George H. Harrap & Co., 1954), hal. 41

²⁰ They Liong Him, *op.cit.*, hal. 102

²¹ Harry Miller, *op.cit.*, hal. 38

juangan MPAJA terutama dalam hal mempersiapkan penyediaan bahan makanan, pakaian, persenjataan, dan perlengkapan perang lainnya. Selain ditugaskan untuk menghimpun beberapa informasi penting tentang pergerakan tentara pendudukan Jepang.²²

Selain itu, MPAJA dipimpin oleh mereka yang memiliki kelebihan dan kemampuan yang dapat diandalkan dalam memecahkan berbagai persoalan dan hambatan yang timbul. Salah seorang dari mereka adalah Lai Teck, yang dianggap oleh Harry Miller sebagai salah seorang pemimpin yang memiliki sikap dan keberanian yang luar biasa dalam melakukan tindakan dan sikap dalam pengambilan suatu keputusan.²³ Hal itulah yang kemudian telah membantu keberhasilan MPAJA pada tahap awal perkembangannya.

Dengan mengandalkan kekuatan itu, MPAJA yang juga merupakan sekutu PKM berharap akan dapat menguasai Malaya. Dengan demikian dapat menunjang realisasi dari cita-cita yang selama ini diperjuangkan, yaitu mendirikan sebuah gabungan yang dikenal sebagai *National Defence Army*. Hal itu sekaligus merupakan langkah awal bagi mereka untuk mendirikan sebuah Republik Komunis yang dikenal sebagai *People's Republic of Malaya*.²⁴

Dengan dukungan itu, MPAJA memasuki tahap kedua dari perkembangannya selama pendudukan Jepang. Pada tahap ini MPAJA lebih banyak memusatkan perhatian kepada usaha-usaha untuk perluasan pengaruh. Selain meng-

²² *Malayan People Anti Japanese Army (MPAJU)* dianggotai oleh pelbagai kaum, kelas dan agama. Namun mayoritas terdiri dari orang-orang Cina. Anggota MPAJU menjadi penunjuk jalan kepada MPAJA apabila mereka menemui hambatan atau kesulitan, terutama di daerah-daerah yang baru dikuasai. Lihat Cheah Boon Kheng, *Red Star Over Malaya, op.cit.*, hal. 165

²³ Harry Miller, *op.cit.*, hal. 42

²⁴ Hanrahan, *op.cit.*, hal. 62

upayakan langkah-langkah untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan *Korps 136* yang dibentuk oleh Inggris untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Jepang.²⁵

Untuk memperlancarkan gerakan, MPAJA telah mengambil suatu kesepakatan dengan *Korps 136* pada tanggal 01 Januari 1944. Dalam pertemuan itu MPAJA diwakili oleh Lai Teck dan Chin Peng, sementara *Korps 136* diwakili oleh Spencer Chapman, John L.H. Davis, dan Richard Broone. Hasil pertemuan itu Inggris telah menyatakan persetujuan untuk membenarkan tindakan MPAJA yang ketika itu berada di bawah kontrol PKM untuk beroperasi dalam membantu Sekutu menghadapi tentara Jepang selama perang. Sebagai imbalan Inggris akan memberikan bantuan dalam bentuk peralatan, persenjataan, obat-obatan, dan juga latihan bagi kader-kader gerilya MPAJA.²⁶

Meskipun demikian, telah ditegaskan bahwa bentuk kerjasama Inggris dengan MPAJA/PKM itu hanya terbatas dalam hal ketentaraan saja. Kesepakatan tersebut juga secara tegas tidak menyebut kemungkinan-kemungkinan untuk kerjasama atau kesepakatan di bidang lain. Terlebih menyangkut keberadaan PKM atau hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah bagaimana kedudukan atau posisi PKM nanti setelah perang berakhir. Selain bentuk kerjasama di bidang ketentaraan, Inggris hanya menyatakan kesediaan atau kesanggupannya untuk memberikan bantuan keuangan sebesar 3000 paunsterling perbulan untuk sekedar meringankan beban keuangan yang dihadapi

²⁵*Korps 136* merupakan unit gerilya yang dibentuk oleh Inggris pada Mei 1943 yang dipimpin oleh Kolonel John Davis. Gerakannya lebih bersifat memberikan bantuan persenjataan, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan perang lainnya kepada gerilya MPAJA selama perang. Cheah Boon Kheng, *op.cit.*, hal. 73

²⁶Hanrahan, *op.cit.*, hal. 80-81

oleh MPAJA ketika itu.²⁷

Kerjasama yang terjalin antara Inggris dengan PKM/MPAJA itu telah mendorong PKM mengambil ketetapan untuk menjadikan MPAJA sebagai unit kekuatan militer yang bersifat permanen dalam tubuh organisasi PKM. Selain mendorong PKM untuk membentuk suatu unit terbuka (*open unit*) dan unit rahasia (*secret unit*) untuk memperlancarkan gerakan.²⁸

Hal itulah yang kemudian mengantar MPAJA memasuki tahap ketiga dalam perkembangannya selama pendudukan Jepang di Malaya. Jalinan kerjasama MPAJA/PKM dengan Korps 136 makin ditingkatkan dalam upaya memerangi Jepang selama pendudukan. Inggris pula telah membekali mereka dengan sejumlah bantuan, perlengkapan perang dan persenjataan yang memadai. Hal itu secara tidak langsung telah mendorong perkembangan MPAJA selama pendudukan Jepang, dan Partai Komunis Malaya setelah perang berakhir.

Dalam perkembangannya kemudian, terlihat bahwa MPAJA dalam menjalin kerjasama dengan Inggris sesungguhnya tidak jujur. MPAJA malah telah mengambil kesempatan itu dengan memanfaatkan perlengkapan persenjataan yang dibekalkan oleh Inggris selama perang berlangsung untuk kepentingannya sendiri. Hal itu terbukti pada sekitar bulan Maret 1945, ketika Kolonel John Davis dalam suatu pertemuannya dengan Lai Teck telah meminta agar sejumlah pegawai militer Inggris dapat ditempatkan bersama di pusat MPAJA di Perak, sementara pegawai-pegawai Inggris yang berpangkat Letnan Kolonel pula akan ditempatkan di Markas Besar MPAJA. Namun

²⁷Harry Miller, *op.cit.*, hal. 47

²⁸Unit Terbuka (*open unit*) merupakan unit yang berhubungan secara langsung dengan Korps 136, sementara Unit Rahasia (*secret unit*) adalah unit yang tidak menjalin hubungan dengan Korps 136. *Ibid.*

keinginan Inggris itu ditolak oleh pemimpin-pemimpin MPAJA/PKM, karena dibimbangkan dengan penempatan pegawai-pegawai Inggris bersama mereka, rahasia organisasi, cita-cita dan perjuangan mereka selama ini akan terbongkar dengan kehadiran pegawai-pegawai Inggris itu.²⁹

C. Gerakan Komunis di Malaya Pasca Perang 1945-1948

MPAJA dalam beberapa hal, tampaknya tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan serangan-serangan yang cukup berarti terhadap tentara pendudukan Jepang di Malaya. Mereka hanya sempat melakukan serangkaian serangan secara gerilya terhadap tentara pendudukan Jepang, itupun tidak terjadi secara menyeluruh untuk semua wilayah. Gerakan-gerakan anti Jepang yang dikumandangkan oleh gerilya-gerilya MPAJA sebagian besar tertumpu di beberapa tempat yang lebih merupakan daerah-daerah yang menjadi basis dari kekuatan MPAJA.

Terdapat beberapa kelemahan yang merupakan kendala besar menyebabkan gerakan-gerakan anti Jepang yang diperlihatkan oleh MPAJA/PKM selama pendudukan, sehingga gerakannya kurang berhasil seperti yang diharapkan. Masalah intern dalam tubuh MPAJA itu sendiri merupakan kendala terbesar. Lai Teck sendiri malah dicurigai telah menjalin kerjasama secara rahasia dengan pihak Jepang, karena terdapat banyak kejadian di mana pemimpin-pemimpin PKM lainnya tertangkap, namun beliau berhasil meloloskan diri. Seperti kejadian di Batu Caves Selangor pada tanggal 01 September 1942, sebagian besar anggota Dewan Pengurus Pusat PKM/MPAJA yang hadir dalam satu pertemuan telah diserbu oleh tentara pendudukan Jepang. Hanya bebe-

²⁹Cheah Boon Kheng, *op.cit.*, hal. 74

rapa orang saja yang berhasil lolos dari serangan tersebut. Walaupun dicurigai, tetapi karena beliau termasuk pemimpin MPAJA/PKM yang berhasil menyelamatkan diri, Lai Teck akhirnya diberi kepercayaan dan berhasil menduduki jabatan tertinggi dalam kepengurusan Pusat PKM. Itu disebabkan saingan-saingan terdekatnya dalam tubuh PKM/MPAJA makin berkurang akibat serangkaian serangan yang dilakukan oleh Jepang.³⁰

Namun kekalahan Jepang secara mengejut akibat peristiwa pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima oleh tentara-tentara Sekutu pada bulan Agustus 1945, yang diikuti kemudian dengan peristiwa pengakuan kalah Jepang pada 15 Agustus 1945 menyebabkan terjadi kekosongan kekuasaan di Malaya. Selama masa transisi itulah, MPAJA/PKM telah muncul sebagai satu-satunya kekuatan militer lengkap dengan kekuatan personel dan persenjataannya. Dengan kekuatan personel yang dibantu sekitar 10 000 orang, MPAJA telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah pendudukan Jepang di Malaya, terutama daerah-daerah terpencil yang menjadi basis gerakan anti Jepang selama pendudukan.³¹ Gerakan yang dipimpin oleh MPAJA setelah berakhir pendudukan Jepang telah mendapat dukungan dan simpati massa, khususnya dari masyarakat Cina di Malaya.

Dalam melakukan aksinya itu, gerilya-gerilya MPAJA telah keluar dari tempat persembunyiannya di hutan-hutan lalu bergerak menuju ke daerah perkotaan dan perkampungan-perkampungan yang ditinggalkan oleh tentara-tentara pendudukan Jepang. Mereka juga melakukan berbagai aksi dan

³⁰ *Ibid.*, hal. 29, rujuk juga C.C. Too, "PKM dan Percubaan Untuk Merampas Kuasa"; *Dewan Masyarakat* (Vol.5, Bil. 25, Julai 1991), hal. 27-30

³¹ Khong Kim Hong, *Merdeka: British Rule and The Struggle for Independence in Malaya 1945-1957* (Petaling Jaya: INSAN, 1984), hal. 35

tindak kekerasan, sehingga menimbulkan ketakutan, keresahan dan kekacauan pada masyarakat.

Selama bulan September 1945 sampai dengan bulan April 1946, banyak yang tewas dan menjadi korban tindak kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok gerilya MPAJA, terutama terhadap orang-orang Melayu yang tinggal di daerah-daerah terpencil.³² Cheah Boon Kheng menyebutkan, "tiga minggu pertama di antara masa penyerahan Jepang sampai dengan waktu kedatangan tentara Inggris, adalah suatu waktu yang paling kacau-balau."³³ Pasukan Tentara Pendudukan Jepang yang masih bertahan di Malaya ketika itu yang seharusnya mengantisipasi tindak kekerasan dan kekacauan yang timbul, tidak dapat berbuat banyak untuk mengambil tindakan-tindakan yang cukup berarti. Sebaliknya mereka hanya mengurungkan diri di kamp-kamp untuk menghindari terjadinya pergaduhan.³⁴

Hal yang demikian itu menyebabkan perimbangan kekuasaan di Malaya dalam waktu kurang lebih tiga minggu itu didominasi oleh MPAJA, dengan organisasi, kekuatan dan personel yang tersusun rapi dan berdisiplin. Selain dibantu oleh unit-unit bersenjata yang terdiri dari pemuda-pemuda Melayu yang radikal. Namun apa yang mengherankan, MPAJA dan PKM pada masa krisis itu tidak berani mengambil alih kekuasaan untuk selanjutnya mendirikan sebuah Republik Komunis seperti yang dicita-citakannya.

Kesempatan itu telah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh MPAJA yang

³²R. Clutterbuck, *Riot and Revolution, op.cit.*, hal. 40

³³Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng: Suatu Kajian Mengenai Barisan Bersatu Komunis di Tanah Melayu 1945-1948* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), hal. 20

³⁴*Ibid.*

disponsori PKM untuk membalas dendam terhadap kelompok-kelompok yang menentang perjuangannya selama pendudukan. Juga terhadap kelompok-kelompok yang telah bersekongkol dengan Jepang selama pendudukan, terutama orang-orang Melayu. Peristiwa hitam yang merupakan awal dari krisis rasial yang cukup parah antara etnis Melayu dan Cina itulah yang kemudian dikenal dalam catatan sejarah sebagai "Peristiwa Bintang Tiga".³⁵

Lanjutan dari tindakan kekejaman yang dilakukan oleh gerilya-gerilya MPAJA, kemudian telah menimbulkan tindak kekerasan dan bentrokan antar etnis melibatkan orang-orang Melayu dengan kelompok gerilya MPAJA yang didominasi oleh orang-orang Cina. Akibatnya terjadilah pembunuhan dan perkelahian antar etnis melibatkan orang-orang Melayu dengan Cina di berbagai tempat di Malaya, seperti yang terjadi di daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan pada November 1945, di Parit dan Teluk Intan Perak pada 24 Desember 1945, di Batu Malim Pahang pada 11 Februari 1946, dan di Kuala Kangsar Perak pada tanggal 06 Maret 1946.³⁶

Bagi masyarakat Cina, mereka tidak dapat melupakan peristiwa *Sook Ching*, yaitu peristiwa pembunuhan massal orang-orang Cina oleh tentara

³⁵Peristiwa Bintang Tiga adalah peristiwa hitam dalam sejarah Malaysia, di mana gerilya-gerilya MPAJA telah mengambil alih kekuasaan di Malaya selama empat belas hari. Dalam waktu lebih dua minggu itu, gerilya-gerilya MPAJA yang disponsori PKM telah melakukan berbagai tindak kekerasan dan kekejaman dan membunuh orang-orang yang dicurigai bersekongkol dengan Jepang dan menantang perjuangannya selama pendudukan. Masalah ini dibahas secara detail oleh Cheah Boon Kheng dalam karyanya, *Red Star Over Malaya* (Singapore: Singapore University Press, 1983). Lihat juga Abdul Samad Idris, *25 Tahun Merdeka* (Kuala Lumpur: Pustaka Budiman, 1982), hal. 358-362

³⁶*Ibid.*, hal. 361-362. Rujuk juga *Kertas Perintah 14/1988*, Laporan Sidang Dewan Rakyat/Dewan Negara tanggal 14 March 1988, hal. 40-44, dan Chew Hock Thye, *Masalah Perpaduan Nasional* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1974), hal. 31-32

Jepang sewaktu awal pendudukannya di Malaya.³⁷ Pada sisi lain, tindakan untuk membalas dendam yang dilakukan oleh gerilya-gerilya PKM itu hanya menambah kesan negatif terhadap citra organisasi itu pada pandangan masyarakat secara umum, terutama untuk kurun waktu setelah Perang Dunia Kedua berakhir. PKM tampaknya telah mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, hingga dilakukan upaya bagi memupuk kembali keharmonisan dan kepercayaan masyarakat terhadap perjuangan mereka.

Sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PKM tidak mau mengambil alih kekuasaan pada waktu itu, walaupun kesempatan untuk itu jelas sangat meyakinkan. Pertama, pada Januari 1944 PKM telah bersetuju dengan Komandan Tentara Inggris di Asia Tenggara, yaitu Louis Mountbatten sebagai imbalan dengan menerima bekalan persenjataan, uang, dan peralatan lainnya. PKM pula bersedia untuk melakukan kerjasama dan menerima arahan Mountbatten selama perang dan sesudahnya. Hal yang demikian itu menyebabkan PKM terikat dan tidak berbuat sesuatu yang akan menghambat upaya-upaya Inggris untuk kembali berkuasa di Malaya. Sekiranya PKM bersikeras untuk mengambil alih kekuasaan pada waktu itu, ia harus siap dengan risiko untuk bertempur melawan Inggris yang memiliki persenjataan dan personel yang jauh lebih kuat. Faktor lain adalah karena PKM ketika itu terikat dengan kebijakan Comintern yang dikenal sebagai *Barisan Bersatu*, yang menginstruksikan kepada semua partai komunis untuk menjalin kerjasama dengan Sekutu dalam upaya menghadapi Jepang dan kuasa fasisme

³⁷Uraian lebih lanjut tentang operasi *Sook Ching*, rujuk Yoji Akashi, "Japanese Policy Towards the Malayan Chinese 1941-1945", *Journal of Southeast Asian Studies* (Vol.I, No.2, Sept. 1970), hal. 63-89, lihat juga Cheah Boon Kheng, *Red Star Over Malaya*, *op.cit.*, hal. 20-24

lainnya.

Keengganan PKM untuk mengambil alih kekuasaan pada waktu itu juga turut dipengaruhi oleh peranan Lai Teck sendiri sebagai Sekretaris Jenderal PKM, yang dikatakan telah bertindak sebagai "agen bermuka tiga".³⁸ Selama pendudukan Jepang, PKM yang dipimpin oleh Lai Teck bukan saja menjadi lemah dari segi ketentaraan, tetapi juga dari segi organisasi. Dalam banyak tindakannya, Lai Teck lebih banyak bersikap otoriter, dan hanya ingin meminta pendapat dari orang-orang yang dipercayainya saja. Hal itu menyebabkan banyak dari aktivitasnya dalam organisasi PKM dibayangi dengan misteri dan pengkhianatan.

Dalam kondisi seperti itu, Lai Teck mengambil kesempatan dengan memproklamkan kebijakan yang dikenal sebagai *Perjuangan Secara Terbuka* dan *Perjuangan Secara Konstitusional*. Suatu bentuk strategi sederhana yang diatur seperti yang diinginkan oleh Inggris. Lai Teck telah berupaya meyakinkan Dewan Pengurus Pusat PKM bahwa kebijakan itu pada prinsipnya merupakan tafsiran yang sebenar dari kebijakan Comintern, selain berharap dapat dijadikan sekutu oleh Inggris. Dengan demikian, akan memberikan beberapa keuntungan tersendiri terhadap perjuangan PKM nanti setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Dengan kebijakan tersebut, PKM bersetuju memenuhi permintaan Inggris untuk membubarkan MPAJA pada tanggal 01 Desember 1945, walaupun hal itu sebenarnya mendapat penolakan yang keras dari kelompok radikal dalam PKM. Pembubaran MPAJA ditandai dengan peristiwa gencatan senjata dan pembubaran keanggotaan MPAJA. Sementara itu, Inggris pula bersedia

³⁸Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng, op.cit.*, hal. 27

untuk memberikan santunan uang sebesar \$350 untuk setiap anggota MPAJA yang meletakkan senjata. Jumlah senjata yang dapat dikumpulkan melalui pembubaran MPAJA itu adalah sebanyak 5497 buah.³⁹ Meskipun demikian, masih banyak persenjataan yang disembunyikan oleh anggota atau cabang-cabang MPAJA yang menolak untuk membubarkan diri, terutama mereka yang beroperasi di daerah-daerah terpencil dan wilayah perbatasan, yang tidak terdaftar secara resmi dengan pemerintah. Kelompok itulah yang kemudian dikenal sebagai *MPAJA Old Comrades Association (OCA)*.⁴⁰

Dengan demikian PKM dapat bergerak secara konstitusional sebagai sebuah organisasi politik yang diakui keberadaannya. Hal itu mendorong PKM untuk kembali aktif dalam kegiatan politik, selain dengan bebas dapat menyusun kekuatan dengan cara mempengaruhi berbagai aksi pemogokan di kalangan buruh-buruh dan serikat-serikat perkerja yang banyak terdapat di Malaya ketika itu. Zaman setelah berakhirnya perang, di mana stabilitas politik dan ekonomi yang tidak seimbang, merupakan waktu yang tepat untuk PKM mencapai tujuan dan cita-cita politiknya. Kekacauan ekonomi, krisis pangan, tingkat inflasi yang tinggi, pasar gelap dan lain sebagainya yang telah ditimbulkan oleh pendudukan Jepang, selain mengakibatkan penderitaan rakyat, juga telah menimbulkan rasa tidak puas hati masyarakat sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi oleh Komunis bagi melancarkan berbagai aksi yang sifatnya revolusioner.⁴¹ Untuk itu, PKM mengatur suatu bentuk taktik dan strategi lain yang disebut sebagai

³⁹R. Clutterbuck, *Riot and Revolution, op.cit.*, hal. 40

⁴⁰*Ibid.*, hal. 41

⁴¹Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng, op.cit.*, hal. 1-2

Gerakan Massa (Mass Movement). Taktik dan strategi itu pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan bantuan makanan, keuangan, obat-obatan dan lain sebagainya dari penduduk Malaya, terutama dari kelompok masyarakat Cina Min Yuen.⁴²

Sementara itu, perjuangan *secara terbuka dan konstitusional* terus diupayakan, terutama dengan cara mempengaruhi dan menyusup masuk ke dalam beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi pergerakan yang sedang tumbuh dan berkembang ketika itu. Perjuangan dengan taktik tersebut dianggap sejalan dengan kebijakan *Barisan Bersatu Comintern*, yang mengharuskan setiap partai komunis menjalin kerjasama yang baik dengan cara bergabung dengan kelompok buruh, petani, kelompok intelektual yang radikal dan kelas menengah sedemikian rupa. Dengan demikian, pucuk pimpinan gabungan atau ikatan revolusioner tersebut pada gilirannya akan berada di tangan proletariat dan partai komunis.⁴³

Strategi perjuangan melalui *Barisan Bersatu* itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui *Barisan Bersatu Dari Atas* dan *Barisan Bersatu Dari Bawah*. Strategi dengan pendekatan dari atas berarti pihak komunis akan bergabung secara terbuka dan menyusup masuk secara halus ke dalam sebuah organisasi umum. Kemudian menduduki jabatan-jabatan penting dalam organisasi tersebut paling tidak ditingkat Dewan Pengurus Pusat. Dengan posisi itu, komunis akan berhasil menyusup atau meresap ke bawah, sehingga pada gilirannya akan berusaha pula untuk mengambil alih keseluruhan organisasi tersebut.

⁴²Maswari Rosdi, *op.cit.*, hal. 196

⁴³Cheah Boon Kheng, *op.cit.*, hal. 31

Sementara strategi Barisan Bersatu dari bawah adalah pola perjuangan komunis yang dilakukan secara evolusi dan bertahap bagi mendapatkan dukungan dari kelompok kelas bawah atau masyarakat umum dari sebuah organisasi. Dengan pendekatan itu, kelompok ini pada akhirnya diharapkan sudah terpengaruh dengan ideologi dan perjuangan komunis. Dengan demikian, komunis pada glirannya akan dianggap sebagai satu-satunya jalan atau wadah yang tepat bagi memperjuangkan kepentingan mereka. Kelompok-kelompok itulah yang kemudian akan mengangkat tokoh-tokoh dari kalangan komunis untuk memimpin organisasi-organisasi mereka.⁴⁴

Kedua bentuk strategi itu coba diterapkan oleh PKM ke dalam beberapa buah organisasi massa yang sedang tumbuh dan berkembang ketika itu. Umpamanya PKM berhasil menyusup masuk ke dalam organisasi *Malayan Democratic Union (MDU)* dan *Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)* dengan pendekatan strategi Barisan Bersatu dari atas. Sebaliknya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok organisasi buruh, wanita, kepemudaan dan beberapa organisasi lainnya, PKM menggunakan pendekatan dengan strategi Barisan bersatu dari bawah.⁴⁵

Kedua bentuk strategi ini dijelaskan selengkapnya dalam *Secret Plan For Red Malaya*, buku yang harus dipelajari oleh setiap anggota PKM. Pada intinya, buku tersebut menjelaskan perlunya menjalin kerjasama yang baik dengan PKMM dan MDU yang dianggap mempunyai basis, kepentingan dan tujuan perjuangan yang sama dengan komunis, yang mengarah kepada emansi-

⁴⁴*Ibid.*, hal. 63-64

⁴⁵*Ibid.*

pasi dalam menegakkan revolusi demokratik di Malaya. Namun, perkembangan yang terjadi memperlihatkan dukungan massa terhadap kedua organisasi itu tidak berkembang dan sempit, tidak seperti dukungan massa terhadap PKM. Oleh sebab itu, mereka perlu dibantu dan diasuh untuk menjelaskan objektif dan sekaligus menarik dukungan massa. Hanya dengan cara pengembelengan massa saja, maka komunis akan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, seperti tercantum dalam garis besar Barisan Bersatu sebagai berikut;

*"... mungkin perlu bagi anggota partai mengambil bahagian di dalam organisasi feodal, perkauman, dan juga yang anti revolusi. Anggota partai tidak perlu takut kepada gerakan secara terbuka dengan organisasi terbuka yang lain, atau takut terhadap penindasan. Anggota tidak boleh memilih cara sah dalam menjalankan sesuatu atau menggelakkan diri mereka dengan alasan belum sampai masanya atau dengan alasan orang ramai terlalu mundur..."*⁴⁶

Pada sisi yang lain, aksi-aksi revolusioner terus ditingkatkan. Pada bulan Oktober 1945, dilakukan aksi pemogokan oleh pekerja-pekerja Harbour Board. Mereka memblokade dan melakukan sabotase terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang untuk Belanda di Jawa.⁴⁷ Dengan memperalat GLTU, PKM berhasil pula mempengaruhi aksi pemogokan buruh secara besar-besaran di Malaya dan Singapura antara bulan Januari dan Februari 1946. Salah satu yang terbesar adalah pemogokan yang berlangsung pada 29 Januari 1946 yang menuntut pembebasan sekitar 30 orang anggota PKM yang ditahan karena melakukan tindak kriminal. Pemogokan itu diikuti sekitar

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 66

⁴⁷ Rujuk, surat khabar *Straits Times*, tanggal 18-19 January 1946

17.300 orang buruh di Singapura.⁴⁸

Untuk itu, PKM telah memperkuat posisinya dengan membentuk koalisi dengan *Old Comrades Association (OCA)* dan *General Labour Union Trade Union (GLTU)*, lalu bergabung dengan *All Malayan Councils of Joint Action (AMCJA)*. Koalisi itu terdiri dari beberapa organisasi dan partai politik yang menolak proposal yang dikemukakan Komite Kerja tentang rencana pembentukan sebuah negara federasi *Persekutuan Tanah Melayu (The Federation of Malaya)* bagi menggantikan *Malayan Union*. Kelompok yang termasuk dalam AMCJA antara lain *Malayan Democratic Union (MDU)*, *Malayan India Congress (MIC)*, *Pan Malayan Federation Trade Union* dan beberapa organisasi lainnya.⁴⁹ *PUTERA*⁵⁰ yang merupakan gabungan PKMM dan organisasi pergerakan Melayu berhaluan kiri, kemudian turut bergabung dengan AMCJA untuk menghalang rencana pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

Sampai menjelang pertengahan tahun 1947, terjadi kurang lebih 300-360 aksi mogok buruh secara besar-besaran di Malaya dan Singapura, terutama yang melibatkan pekerja-pekerja di perkebunan karet, pertambangan timah, dan buruh-buruh pelabuhan. Sementara aksi mogok itu berjalan, PKM

⁴⁸*Malaya Tribune*, 14 February 1946. Lihat juga Victor Purcell *The Chinese in Malaya* (London: Oxford University Press, 1968), hal. 272

⁴⁹Penjelasan lebih lanjut lihat B. Simandjuntak, *Federalisme Tanah Melayu 1945-1963* (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1985), hal. 54-56, Fatini Yaacob, "Muslihat PKM Dengan Orang Melayu", *Dewan Masyarakat* (Vol.7: Bil 29, Julai 1991), hal. 28-30, dan Khong Kim Hong, *op.cit.*, hal. 109-110

⁵⁰Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang terbentuk pada tanggal 22 Februari 1947, merupakan gabungan organisasi pergerakan Melayu yang radikal seperti *Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)*, *Angkatan Pemuda Insaf (API)*, *Angkatan Wanita Sadar (AWAS)* dan beberapa organisasi lainnya. Rujuk Khong Kim Hong, *op.cit.*, hal. 110-112. Ranjit Singh Malhi, *Sejarah Kertas 2 STPM* (Kuala Lumpur: Federal Publication, 1989), hal. 106-107

berhasil pula mendirikan *Pan Malayan Federation of Labour Trade Union (PMFLIU)*. Tujuan pembentukannya tidak terlepas dari upaya PKM untuk mengontrol dan menyatukan semua organisasi buruh di Malaya bagi mencapai tujuan dan cita-cita politiknya. Hal itulah yang kemudian menyebabkan PKM berhasil untuk menguasai hampir 75% dari keseluruhan organisasi buruh di Malaya dan Singapura sampai menjelang tahun 1948.⁵¹

Selain itu, PKM turut mencampuri urusan politik dengan melakukan suatu bentuk pertantangan antara organisasi-organisasi pergerakan dengan pemerintah Inggris. Untuk itu, PKM telah berusaha untuk menghalang segala bentuk perundingan yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi-organisasi pergerakan. Karena itu, PKM telah menolak keras rencana Inggris untuk membentuk *Persekutuan Tanah Melayu* pada tahun 1948, karena dipandang dapat menggagalkan cita-cita PKM untuk membentuk sebuah negara yang bercorak komunis di Malaya .

Meningkatnya kegelisahan kaum buruh, kegagalan kampanye perjuangan secara konstitusional yang dilakukan oleh koalisi *PUTERA-AMCJA* yang ditandai dengan peresmian Persekutuan Tanah Melayu pada 1948, di samping kegagalan Lai Teck untuk mengambil alih kekuasaan, mendorong Chin Peng mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin PKM di Singapura pada 16-21 Maret 1948. Hasil dari pertemuan itu telah mengambil suatu ketetapan baru untuk melakukan perjuangan bersenjata atau melakukan revolusi bersenjata untuk mencapai cita-cita dan perjuangan PKM di Malaya. Namun belum ada kepastian tentang kapan tindakan itu akan dimulai, karena hal

⁵¹ *Malayan Union Sekretariat File, 162/D/1946*, lihat juga Lu Cheng, "Report on The Trade Union Movement in Malaya: World Trade Union Movement December 1949, hal. 46

tersebut sangat tergantung pada kondisi dan perkembangan-perkembangan selanjutnya yang akan terjadi.⁵²

Rencana itu sebetulnya sudah mulai dicanangkan setelah berakhirnya Konferensi Pemuda Se-Asia Tenggara yang berlangsung di Calcutta 19-25 Februari 1948. Konferensi yang disponsori oleh Comintern itu berlangsung setelah Kongres Kedua Partai Komunis India berakhir. Dengan demikian, sedikit banyak hasil yang dicapai dalam konferensi dan kongres itu turut mempengaruhi ketetapan yang diambil Chin Peng ketika itu, karena rapat pimpinan PKM di Singapura, hadir juga Lawrence Sharkey *Presiden Komunis Australia* yang singgah dalam perjalanannya dari Culcutta.⁵³

Dalam pertemuan itu, Sharkey dilaporkan telah menyampaikan kritiknya yang tajam terhadap kebijakan PKM pasca perang, terutama tentang pembubaran MPAJA. Selain itu, beliau juga menginformasikan kepada PKM bahwa prioritas kebijakan Comintern yang baru telah dibuat oleh seorang ahli teori dari Soviet, yaitu Andrei Zhadnov pada bulan September 1947 di Polandia. Beberapa pokok pikiran yang dilontarkan Andrei Zhadnov pada prinsipnya menegaskan bahwa Comintern akan mengakhiri segala bentuk kerjasama dengan pihak sekutu.⁵⁴

Pemikiran-pemikiran Andrei Zhadnov itu secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa dunia kini terbagi kepada dua blok kekuatan, yaitu blok imperialisme dan anti imperialisme. Zhadnov mengimbau kepada semua partai Komunis untuk melakukan perlawanan terhadap rencana-rencana impe-

⁵²Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng, op.cit.*, hal. 179

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Khong Kim Hong, *op.cit.*, hal. 137

rialisme yang ingin memperluaskan pengaruh di berbagai belahan dunia.⁵⁵ Hal itu merupakan imbauan sekaligus desakan kepada PKM untuk mengakhiri perjuangan secara konstitusional, sebaliknya harus segera mempercepat perjuangan secara revolusi untuk mencapai kemerdekaan Malaya.⁵⁶

Di samping itu, keputusan untuk melakukan Revolusi bersenjata juga dipengaruhi oleh kurang berhasilnya kebijakan Barisan Bersatu seperti yang telah dicanangkan oleh Lai Teck.⁵⁷ Kebijakan tersebut yang bersifat bekerjasama dengan Sekutu (Inggris) berlangsung agak lamban, sehingga menimbulkan rasa tidak puas dan tidak senang sebagian besar anggota PKM yang menginginkan perjuangan yang lebih radikal dalam mencapai cita-cita dan tujuan politik di Malaya.

Rapat Pimpinan PKM yang berlangsung di Singapura telah menghasilkan tiga resolusi penting yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perjuangan PKM selanjutnya. Pertama menetapkan bahwa perjuangan kemerdekaan Malaya akan mengambil bentuk *Perang Revolusi Rakyat*. Kedua, PKM harus mengambil banyak pelajaran dan mengoreksi kesalahan yang selama menjadi kendala utama dalam perjuangannya, seperti kasus pembubaran MPAJA agar tidak terulang kembali. Selain itu, juga dilakukan penerimaan pemerintahan sendiri sebagai ganti kemerdekaan sepenuhnya yang menggesa massa agar bersedia melakukan suatu perjuangan kemerdekaan dengan menepikan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Short Anthony, *The Communist Insurrection in Malaya 1948-1960* (London: Frederick Muller Ltd., 1975), hal. 45-46

⁵⁷ Zainal Abidin Wahid, "Dharurat: Akibat-Akibatnya", dalam Zainal Abidin Wahid, eds., *Sejarah Malaysia Sa-Pintas Lalu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1971), hal. 132

sistem perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Sementara yang ketiga, ditegaskan pula perlunya dikembalikan disiplin partai pada posisi yang benar.⁵⁸

Ketiga resolusi di atas telah memantapkan perjuangan dan cita-cita PKM untuk melakukan revolusi bersenjata. Sebagai langkah awal, revolusi bersenjata akan lebih ditumpukan di Singapura, yaitu dengan cara menutup atau memblokade pelabuhan, melumpuhkan sistem jaringan transportasi dan komunikasi, menghancurkan badan dan lembaga-lembaga pemerintahan, dan merusakkan sumber perekonomian vital. Selain berusaha untuk menimbulkan kekacauan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi secara keseluruhan.

Resolusi Maret 1948 merupakan momentum tepat yang kemudian telah membawa era baru terhadap sejarah perjuangan Partai Komunis Malaya pada umum-nya. Titik tolak dari pernyataan di atas, adalah bermulanya langkah PKM untuk melaksanakan revolusi bersenjata dalam memperjuangkan cita-cita politiknya. Resolusi itu sekaligus mendorong PKM untuk mempersiapkan segala sesuatu yang lebih mantap, baik yang bersifat fisik maupun politis. Taktik dan strategi yang lebih keras untuk melakukan revolusi bersenjata itulah yang mendorong Inggris mengumumkan Undang-Undang Darurat pada tahun 1948.

⁵⁸Cheah Bonn Kheng, *Komrad Bertopeng, op.cit.*, hal. 180

BAB IV

TANTANGAN DAN PERJUANGAN: PARTAI KOMUNIS MALAYA 1948-1960

A. Latarbelakang Pengumuman Keadaan Darurat

Pada tahun 1946, *Pemerintahan Tentara Inggris di Malaya (British Military Administration)* membatalkan undang-undang buruh *Trade Dispute and Trade Union Act 1927* yang selama ini membatasi kebebasan dan keterlibatan kaum buruh secara aktif dalam serikat-serikat pekerja di Malaya. Pembubalan itu secara tidak langsung memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum buruh untuk terlibat secara aktif dalam serikat-serikat pekerja dan bertindak lebih agresif, sehingga mendorong PKM untuk menanamkan pengaruhnya dalam kesatuan-kesatuan buruh dan bergerak dengan bebas dalam mencapai cita-cita dan tujuan politiknya di Malaya.¹

Setelah Lai Teck keluar dari kepengurusan pusat Partai Komunis Malaya dalam suatu rapat Dewan Pengurus Pusat PKM ke-9 yang berlangsung dalam bulan Mei 1947, PKM telah melipatgandakan corak aktivitas atau aksi-aksi yang lebih bersifat revolusioner. Aksi-aksi mogok yang dilakukan, seringkali berakhir dengan bentrokan yang melibatkan pihak aparat keamanan dalam menghadapi tindak kekerasan.

¹Uraian lebih lanjut tentang perkembangan Undang - Undang Buruh yang mengatur keterlibatan buruh dalam serikat-serikat pekerja di Malaya sebelum perang dan tahun-tahun pertama setelah Perang Dunia Kedua, lihat Leong Yee Fong, "Perkembangan Kesatuan Pekerja dan Dasar Kolonial di Malaya", dalam Cheah Boon Kheng, Abu Talib Ahmad, eds., *Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain* (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1990), hal. 264-272

Sampai menjelang pertengahan tahun 1947, terjadi lebih dari 300 aksi pemogokan terutama yang melibatkan buruh-buruh di perkebunan karet dan pertambangan timah di Malaya. Aksi mogok yang disponsori oleh PKM itu mengakibatkan sekitar 694,036 orang kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 1947. Sementara pada tahun 1948, mereka yang dihilangkan pekerjaan oleh majikan diperkirakan berjumlah sekitar 370.464 orang.² Aksi-aksi mogok yang dilakukan oleh kaum buruh itu, sering dipandang oleh majikan dan kelompok kapitalis sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan kepentingan ekonomi mereka di Malaya. Hal itulah yang kemudian mendorong mereka membuat desakan kepada pemerintah untuk mengambil langkah dan upaya tertentu bagi mengantisipasi aksi-aksi mogok dan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh kaum buruh. Selain mendesak pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendaftarkan setiap serikat buruh yang bergerak aktif di Malaya ketika itu.

Aksi-aksi militan yang terjadi di Malaya antara tahun 1947 dan 1948, tidak hanya terjadi di kalangan kaum buruh yang menyuarakan tantangan mereka terhadap Inggris, tetapi juga melibatkan organisasi kongsi-kongsi gelap Cina, seperti yang terjadi antara kongsi gelap *Ang Bin Hoay* dan kelompok *Old Comrades Assosiation* (OCA) yang pro-komunis. Hal itu menyebabkan api perkelahian dengan mudah tersulut di mana-mana. Situasi dan kondisi kacau-balau yang kurang menguntungkan itu, akhirnya mendorong Inggris untuk memberlakukan kembali undang-undang yang mengatur dan

²Federation of Malaya, *Communist Terrorism in Malaya: The Emergency June 1948 - June 1952* (Kuala Lumpur: Departement of Information, 1952), hal. 18

mengontrol keberadaan serikat-serikat buruh dan organisasi lainnya di Malaya.³

Walaupun bagaimanapun, undang-undang buruh yang diberlakukan kembali oleh Inggris itu telah mendapat tantangan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan organisasi politik seperti *Malayan Democratic Union (MDU)*, yang merupakan salah satu bagian dari *Barisan Bersatu PKM*. Pada tanggal 13 April 1947, MDU mengajukan permohonan agar dapat dikecualikan dari undang-undang tersebut, dengan alasan antara lain bahwa walaupun undang-undang tersebut bertujuan untuk mengantisipasi perkelahian dan kekacauan yang terjadi, namun undang-undang tersebut tidak memuat atau mencantumkan cara atau tindakan yang harus diambil untuk memecahkan persoalan tersebut.⁴ Permohonan tersebut mendapat dukungan dari kelompok-kelompok yang tergabung dalam *Barisan Bersatu PKM* lainnya seperti koalisi *AMCJA-PUTERA*. Permohonan itu tampaknya diterima, karena dalam perkembangannya kemudian Inggris kelihatan bersikap toleran terhadap mereka, dan diizinkan kembali organisasi-organisasi politik untuk bergerak secara bebas mulai tanggal 12 Juni 1947.⁵ Kebijakan Inggris itu memberikan peluang kepada *Barisan Bersatu PKM* kembali bergiat memperluas pengaruh dalam masyarakat secara aktif dan bebas.

Kondisi perburuhan yang kian memburuk di Malaya antara bulan April-Juni 1948, telah mendorong pemerintah kolonial Inggris untuk mengam-

³Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng: Suatu Kajian Mengenai Barisan Bersatu Komunis di Tanah Melayu 1945-1948* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1982) hal. 170

⁴*Ibid.*, hal. 171

⁵*Ibid.*, hal. 172

bil beberapa kebijakan yang dirasakan perlu untuk dilakukan segera bagi mengantisipasi sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi buruh seperti PMFTU. Untuk tujuan itu, Undang-Undang Perburuhan yang ada telah ditinjau kembali. Ketetapan telah diambil untuk mendaftarkan semua organisasi dan serikat-serikat pekerja bagi membolehkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan dan kegiatan mereka agar tidak dikuasai oleh kelompok komunis seperti PKM.

Gubernur Jenderal Malcolm Mc Donald membentuk sebuah panitia yang ditugas menimbang rencana untuk melakukan pelarangan dan mencabut status PKM sebagai organisasi legal. Langkah yang diambil oleh Inggris itu, menyebabkan serikat-serikat pekerja yang mendapat pengaruh dari Comintern mengalami hambatan dalam proses pendaftaran. Hal itu menimbulkan rasa kurang puas, tidak senang dan kemarahan dari kelompok-kelompok buruh, yang diikuti kemudian dengan terjadinya aksi mogok dengan alasan pemerintah telah menindas hak asasi dan kebebasan berorganisasi, serta menyuarakan tuntutan dan hak mereka yang hanya dapat disalurkan melalui serikat-serikat pekerja.⁶

Aksi-aksi mogok yang dilancarkan itu telah menimbulkan kacau balau yang berakibat langsung terhadap perekonomian negara, terutama kelangsungan hidup para buruh itu sendiri. Sementara itu, MDU menuduh bahwa kegagalan dari kebijakan pemerintah akibat kelalaiannya, menimbulkan kesusahan, kegelisahan, dan kekurangan kebutuhan bahan pangan, sehingga kesejahteraan rakyat dan para buruh terabaikan. Bersamaan dengan itu,

⁶Kong Kim Hoong, *Merdeka: British Rule and The Struggle For Independence in Malaya 1945-1957* (Petaling Jaya: INSAN, 1984), hal. 128

harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak keras. Hal yang demikian itu menyebabkan kaum buruh mulai menuntut kenaikan upah dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Di lain pihak, PKM dituding sebagai penyebab timbulnya gangguan keamanan, kekacauan, perkelahian, pemogokan dan situasi kacau balau yang makin memburuk. Dengan kata lain, keberadaan dan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh PKM seringkali dijadikan 'kambing hitam' terhadap semua kejadian di Malaya.

Sementara itu, bentrokan yang terjadi antara kelompok buruh dan aparat keamanan mencapai titik yang cukup parah, sehingga memaksa pemerintah kolonial Inggris campurtangan. Beberapa tindakan telah diambil, antara lain dengan mendirikan beberapa kantor atau pos-pos polisi yang letaknya berhampiran dengan areal-areal perkebunan karet yang rawan, seperti perkebunan Dublin di Kedah yang sangat rawan terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Dalam bulan Juni 1948, bentrokan dan perkelahian menjadi semakin kritis terutama di Perak akibat insiden di perkebunan Lima Blas dan Kelapa Bali,⁷ dan insiden yang terjadi di Johor. Kejadian di Johor dinyatakan oleh MDU sebagai *Pembunuhan Massal Segamat*, yaitu peristiwa pembunuhan beberapa orang buruh yang terjadi di perkebunan Chang Kang Swee.⁸ Pihak kepolisian diminta bantuannya untuk meredakan pertikaian dan bentrokan itu. Sementara PKM menuntut agar pemerintah segera mengusut dan mengadili pelaku dan pendalang peristiwa tersebut.

⁷*Straits Times*, 29 May 1948

⁸Antara lain faktor penyebab terjadinya peristiwa itu adalah karena keengganan para buruh untuk meninggalkan perkebunan yang telah diambil alih oleh sebuah perusahaan Eropa. Lihat, berita yang dimuat dalam *Malaya Tribune*, tanggal 5 Juni 1948

Beberapa insiden yang terjadi, menyebabkan kelompok-kelompok buruh yang disponsori PKM menjadi semakin radikal, agresif dan militan yang hampir mencapai puncaknya. Hal itu sekaligus merupakan tantangan dan ujian terhadap kekuatan pertahanan mereka.⁹ Selain melakukan serangan balas terhadap direktur perkebunan tersebut, serangan balas juga dilakukan terhadap pihak aparat keamanan sendiri. Hal itu menambah keyakinan Inggris bahwa PKM benar-benar bertanggungjawab terhadap berbagai tindak kekerasan dan kekacauan yang timbul selama ini.¹⁰

Kelompok buruh dan penduduk sipil yang dianggap tidak mau bekerjasama dengan PKM menjadi sasaran tindak kekerasan dan kekejaman mereka. Klimaks dari serangkaian tindak kekerasan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh komunis di Malaya, adalah peristiwa pembunuhan yang melibatkan tiga orang direktur sebuah perusahaan perkebunan karet di daerah Sungai Siput (Perak) pada 15 Juni 1948. Peristiwa itu memaksa Inggris untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas dengan mengumumkan pemberlakuan *Undang-Undang Darurat Negeri (State Emergency)* di Perak. Namun, karena berbagai tindak kekerasan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok militan komunis di Malaya terus berkembang di hampir kesemua daerah, akhirnya mendorong Inggris mengambil kebijakan politik yang lebih tegas untuk mengumumkan *Undang-Undang Darurat* yang berlaku untuk seluruh Malaya mulai tanggal 17

⁹Departement of Information., *op.cit.*, hal.1

¹⁰Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng, op.cit.*, hal. 178

Juni 1948.¹¹

B. Kebijakan Pemerintah : Tantangan Bagi Perjuangan Komunis

B.I Periode 1948-1949

Undang-Undang Darurat dalam konteks taktik dan strategi Partai Komunis Malaya, menunjukkan suatu kondisi yang penuh kegelisahan, ketakutan dan kecemasan akibat terjadinya berbagai tindak kekerasan dan kecacauan yang dilakukan oleh kelompok komunis militan.¹² Keputusan pemerintah untuk mengumumkan Undang-Undang Darurat didorong oleh semakin gencar dan mengganasnya tindakan kelompok gerilya yang tergabung dalam Partai Komunis Malaya. PKM telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memperlemah kekuatan sosio-politik dan perekonomian negara seperti pem-

¹¹Terdapat beberapa perbedaan tanggal Undang-Undang Darurat diumumkan di Malaya. Sebagian sumber menyebut 17 Juni 1948, lihat Edgar O'Ballance, *The Communist Insurgent War 1948 - 1960* (London: Faber & Faber Ltd., 1966), hal. 82. Sumber lain menyebut tanggal 18 Juni 1948. Rujuk Osman Mamat, *Darurat di Terengganu 1948-1960* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981), hal. 2-3, Tan Ding Eing, *Sejarah Malaysia dan Singapura* (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1986), hal. 306. Sementara dokumen arsip *Emergency Regulations Ordinance 1948*, menyatakan 12 Juni 1948 untuk pengumuman Undang-Undang Darurat Negeri. Undang-Undang ini berlaku secara bertahap, dari *Emergency Regulations Ordinance 1948* menjadi *Emergency Regulations 1948* yang diumumkan oleh High Commissioner pada 15 Juli 1948. Lihat Federation of Malaya, *Emergency Regulations Ordinance 1948* (No. 10, 1948) dan *Emergency Regulations 1948* (G.N. No. 1953, July 15, 1948), No. 12, Vol. I), dalam Rhoderick Dhu Dhenick, "The Emergency Regulations of Malaya: Causes and Effect", *Journal of Southeast Asian History* (Vol. 6 No. 2, September 1965), hal. 18-19

¹²Kamus Dewan mendefinisikan istilah "Darurat", sebagai situasi dan kondisi yang mencemaskan atau keadaan di mana terjadi kecacauan secara mendadak dan berterusan dalam jangka masa tertentu, yang dilakukan oleh pihak lawan (musuh). Kondisi semacam itu kemudian menimbulkan keresahan, kesusahan, kesengaraan dan penderitaan yang tidak terduga, seperti kelaparan, gangguan keamanan dan stabilitas nasional, terjadinya kecacauan ekonomi dan lain sebagainya. Lihat Teuku Iskandar, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), hal. 236

bunuhan, pemogokan buruh, dan berbagai tindak kekerasan serta kekejaman lainnya sehingga menimbulkan kerusuhan dan mengganggu stabilitas nasional.

Undang-Undang Darurat memberikan hak dan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menangkap siapa saja yang dicurigai (lama waktu penahanan minimal setahun) tanpa melalui proses pengadilan. Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Darurat, membentuk pasukan khusus yang terdiri dari kesatuan tentara dan polisi yang dapat mengambilalih hak milik bangunan atau kendaraan, mengontrol sepenuhnya sistem jaringan komunikasi dan transportasi, melarang pertemuan-pertemuan dan rapat umum, organisasi dan partai-partai politik, memberlakukan jam malam, dan hukuman keras kepada mereka yang memiliki senjata api.¹³

Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meredam pengaruh dan mengantisipasi berbagai tindak kekerasan dan kekacauan yang didalangi oleh komunis. Untuk tujuan itu, kekuatan pertahanan di Malaya dibantu oleh pasukan *Polisi Khusus* yang berkekuatan sekitar 24000 personel. Korps ini dilatih khusus oleh mantan perwira dan pegawai polisi yang berpengalaman luas dalam perang di Palestina. Setelah pelatihan, korps ini digerakkan untuk membantu pertahanan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, terutama di wilayah-wilayah perkebunan karet, pertambangan timah, dan daerah pedalaman lain yang merupakan daerah rawan

¹³Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat di Malaya antara tahun 1948 - 1960, lihat laporan yang dikeluarkan oleh Departement of Information, Federation of Malaya, *Communist Banditry In Malaya The Emergency* (Kuala Lumpur: Departemen of Information, 1956) hal. 2. lihat juga Federation of Malaya *Emergency Regulations 1948*, dalam Rhoderick Dhu Renick, *op.cit.*, hal. 1-39

ancaman Komunis. Selain itu, aparat-aparat pemerintah dan orang-orang Inggris yang berdomisili di daerah-daerah tersebut, dibekali dengan persenjataan yang memadai, berupa senapan dan mobil perisai. Kebijakan itu secara tidak langsung menjamin keamanan orang-orang Eropa yang tinggal di sana, sehingga rencana PKM membentuk *kawasan bebas (liberated area)* tidak dapat dilaksanakan.¹⁴

Unsur-unsur kepolisian mengalami reorganisasi, diperkuat dan diperlengkap dengan berbagai keterampilan dan peralatan seperti persenjataan modern dan sistem jaringan telekomunikasi yang lebih baik terutama di daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, hubungan antara kepolisian dalam berbagai tingkat terutama tingkat pusat, daerah dan kampung dapat dipercepat. Pada bulan Agustus 1948, pasukan *Polisi Pengawal* yang pertama telah dikirim dari Inggris ke Malaya. Pada bulan Oktober tahun yang sama menyusul pula *Pasukan Pengawal* yang kedua. Unit ini ditugaskan memburu gerilya komunis secara lebih serius terutama di daerah pedalaman. Kekuatan kepolisian ini dipimpin langsung oleh Kol. William Nicol Gray dari kepolisian Inggris di London.¹⁵

Kebijakan lain adalah memperkenalkan sistem pendaftaran penduduk untuk skala nasional. Melalui sistem ini, setiap orang warga Malaya yang berumur dua belas tahun ke atas diharuskan mendaftarkan diri untuk mendapatkan *Identity Card* (Kartu Tanda Penduduk), yang harus selalu dibawa setiap berpergian. Kartu ini sering diperiksa dalam operasi-operasi men-

¹⁴Gene Z. Hanrahan, *The Communist Struggle in Malaya* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1971), hal. 124

¹⁵Gwee Hock Aun, *The Emergency In Malaya 1948-1960* (Penang: Sinaran Brothers Ltd., 1966), hal. 42

dadak yang dilakukan dari masa ke masa. Mereka yang didapati tidak memilikinya akan dicurigai sebagai pendukung gerilya komunis. Menurut Edgar O'Ballance sistem kartu tanda penduduk itu memaksa gerilya-gerilya komunis mundur ke hutan yang jauh di pedalaman karena takut ditangkap oleh aparat keamanan.¹⁶

Pada tanggal 6 September 1949, berhubung semakin gencarnya tindakan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan pihak gerilya komunis, pemerintah buat pertama kalinya menawarkan pengampunan kepada gerilya yang bersedia menyerahkan dirinya. Hal ini dilakukan, mengingat kebanyakan anggota gerilya dipaksa berjuang oleh pihak komunis. Untuk tujuan itu, berjuta-juta risalah tentang informasi tersebut disebar secara meluas dengan cara menggugurkannya dari pesawat udara. Menjelang akhir tahun 1949, sebanyak 116 orang gerilya menyerah diri kepada aparat keamanan.¹⁷

B.II Periode 1950-1954

Operasi melawan komunis diperkuat oleh pemerintah ketika Letjen Sir Harold Briggs menjadi Direktur operasi pada tanggal 21 Maret 1950.¹⁸ Selama masa jabatannya, Sir Harold Briggs mengambil suatu kebijakan yang dikenal sebagai *Rencana Briggs*. Kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan khusus, yaitu program yang diatur untuk memindahkan penduduk sipil (khususnya masyarakat Cina) yang tinggal di daerah pinggiran hutan yang

¹⁶Edgar O'Ballance, *op.cit.*, hal. 83-84

¹⁷Tan Deng Eing., *op.cit.*, hal. 310

¹⁸Short Anthony, *The Communist Insurrection in Malaya 1948-1960* (London: Frederick Muller, Ltd., 1975), hal. 234

rawan gangguan komunis ke daerah-daerah pemukiman baru untuk memudahkan aparat keamanan melakukan pengawasan.¹⁹

Selain faktor keamanan dan pengawasan, kebijakan itu bertujuan menghindarkan penduduk sipil, terutama orang-orang Cina untuk memberikan bantuan makanan, perobatan dan informasi kepada *Min Yuen*.²⁰ Operasi ini kemudian dikenal sebagai *Gerakan Kelaparan*. Pengawasan yang ketat juga dikenakan untuk setiap kegiatan seharian yang lain seperti pembelian, penjualan, penyimpanan dan distribusi bahan pangan, untuk memastikan bahan-bahan makanan tidak sampai ke tangan komunis.²¹ *Rencana Briggs* merupakan salah satu faktor terpenting menyebabkan kegagalan perjuangan PKM, karena langkah itu bukan saja melumpuhkan kelompok *Min Yuen* tetapi juga memaksa gerilya-gerilya komunis keluar dari hutan untuk selanjutnya melakukan pertempuran dengan aparat keamanan.

Hal lain yang tercantum dalam *Rencana Briggs* itulah adalah pembentukan unit *Pasukan Pengawal Kampung (Home Guards)*, yang dimulai pada

¹⁹Rhoderick Dhu Renick, *op.cit.*, hal. 5-10

²⁰*Min Yuen* merupakan salah satu kelompok yang berada dibawah pengawasan cabang dan daerah (organisasi PKM) yang secara langsung melakukan kontak dengan massa, terutama dengan penduduk Cina yang tinggal di daerah pinggiran hutan. Kelompok *Min Yuen* lokal dikenal dengan beberapa nama, seperti Korps Perlindungan Buruh, Korps Pertahanan, Kesatuan Petani dan lain sebagainya. Fungsi umum *Min Yuen* mirip pula dengan nama-namanya di atas seperti pengumpulan dana untuk MRLA, mempersiapkan kader-kader baru, informasi, partisipasi untuk kesejahteraan gerilya, sabotase dan usaha-usaha propaganda. Penjelasan lanjut lihat Harry Miller, dalam *The Communist Menace In Malaya*, (New York: Praeger, 1954), hal.143

²¹Sampai menjelang tahun 1953, pemerintah berhasil menempatkan sekitar 67.930 penduduk sipil (sebagian besar etnis Cina) pada 546 buah Kampung Baru. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merealisasikan program itu mencapai sebesar \$133 juta. Lihat, Laporan Federation of Malaya, *Progress Report on The Development Plans of The Federation of Malaya 1950-1952*, seperti dikutip Rhoderick Dhu Renick, *op.cit.*, hal. 12

bulan September 1951. Pasukan ini merupakan unit bantuan sukarela yang dibentuk sebagai unsur di luar pemerintahan untuk mewujudkan kerjasama dan partisipasi rakyat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum, terutama di daerah-daerah yang rawan komunis. Dengan demikian, unit ini lebih bersifat pasukan pertahanan sipil.²² Keanggotaan pasukan ini terbuka kepada mereka yang berusia antara 18 sampai dengan 55 tahun. Meskipun keberadaannya dinyatakan sebagai suatu unit bantuan sukarela, namun pemerintah melalui Undang-Undang Darurat 1951 berwenang dalam kondisi tertentu menunjuk siapa saja yang dirasakan layak untuk ditugaskan sebagai anggota *Pengawal Kampung* dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.²³ Sampai menjelang akhir 1953, kekuatan *Pasukan Pengawal Kampung* diperkirakan berjumlah hampir 210.000 orang, yang tersebar di seluruh Malaya.²⁴

Kebijakan lain adalah melakukan reorganisasi dalam tubuh kepolisian yang diperkuat dengan berbagai keterampilan dan keahlian, selain upaya untuk penambahan personel yang dilakukan sejak tahun 1952. Sampai penghujung tahun 1952, kekuatan *Kepolisian Persekutuan* dan *Pasukan Polisi Khusus* yang terlibat dalam operasi darurat secara keseluruhan diperkirakan berjumlah hampir 67.000 personel.²⁵

²²Federation of Malaya, "Peraturan Darurat (Home Guards) 1951", dalam *The Emergency Regulations Ordinance 1948* (Federation of Malaya, No.10/1948), hal. 103-106. Lihat juga Osman Mamat, *op.cit.*, hal. 34

²³*Ibid.*

²⁴Short Anthony, *op.cit.*, hal. 412

²⁵*Ibid.*, lihat juga N.J. Ryan, *The Making of Modern Malaya* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1963), hal. 96

Pemerintah Inggris mengupayakan beberapa langkah untuk memperkuat kekuatan militernya di Malaya, antara lain dengan penambahan sebanyak tiga belas batalyon, terdiri dari kesatuan tentara Inggris, Melayu, dan Gurkha. Pasukan ini dipersiapkan untuk mengantisipasi berbagai tindak kekerasan dan ancaman komunis. Bantuan pertahanan dan kekuatan militer juga didatangkan dari negara-negara Commonwealth seperti New Zealand, Australia, Rhodesia, Fiji dan beberapa negara lain. Selain dibantu oleh *Angkatan Udara Inggris (Royal Army Force)* yang dilengkapi dengan pesawat-pesawat tempur, terutama untuk menghancurkan daerah basis pertahanan dan kekuatan gerilya komunis yang sulit dijangkau oleh kesatuan angkatan darat.²⁶

Selain itu pemerintah terus melancarkan serangan terhadap daerah basis kekuatan gerilya komunis. Pendaratan tentara, perbekalan makanan, dan bantuan persenjataan dipercepat dengan menggunakan helikopter bantuan *Angkatan Udara Inggris (RAF)*. Sementara angkatan laut memperketat pengawasan di wilayah pesisir pantai untuk menghindari kegiatan penyelundupan persenjataan, makanan dan personel gerilya-gerilya komunis ke Malaya.²⁷ Peningkatan kerjasama regional dan perjanjian-perjanjian telah ditandatangani antara pemerintah Malaya dan Thailand. Kesepakatan dan kerjasama dibuat untuk mengizinkan pasukan tentara dan pesawat-pesawat angkatan udara dapat melintasi tapal batas internasional, dalam operasi memburu gerilya-gerilya komunis yang melarikan diri ke daerah perbatasan

²⁶Gwee Hock Aun, *op.cit.*, hal. 43

²⁷*Ibid.*, hal. 44

kedua negara.²⁸ Langkah-langkah ini membolehkan pemerintah untuk melakukan serangan-serangan yang lebih agresif dan efektif, di samping dapat menjamin tidak ada bahan-bahan makanan dan persenjataan yang tersalur ke pihak komunis. Hal itu secara tidak langsung telah memberikan pengaruh yang cukup penting terhadap posisi gerilya-gerilya PKM, sehingga menjadi makin terdesak.

Kebijakan terpenting lainnya yang dilaksanakan oleh Jen. Templer sepanjang periode 1950-1954 adalah dengan mencanangkan "Perang Psikologi". Kebijakan ini pada prinsipnya bertujuan untuk memenangkan "hati dan pikiran rakyat", selain upaya untuk mengekalkan rasa persatuan dan kesatuan rakyat menghadapi ancaman komunis.²⁹ Untuk tujuan itu, beberapa perubahan dalam Undang-Undang Darurat telah dibuat pada awal tahun 1952, untuk memberikan sedikit kelonggaran kepada etnis non-Melayu (khususnya Cina) mendapatkan hak kewarganegaraan. Sampai bulan September 1952, hak kewarganegaraan diberikan kepada hampir 1.200.000 orang Cina dan 180.000 etnis India.³⁰ Dengan perubahan Undang-Undang ini, orang-orang Cina yang memperoleh hak kewarganegaraan secara keseluruhan telah meningkat menjadi 55%, berbanding hanya 10% sebelum perubahan Undang-Undang Darurat

²⁸Tan Ding Eing, *op.cit.*, hal. 312

²⁹Kebijakan "Perang Psikologi" ini pada prinsipnya didasari oleh beberapa pemikiran, antara lain bahwa satu-satunya cara untuk membendung kegiatan komunis di Malaya adalah menghindari dukungan masyarakat (terutama orang Cina) terhadap kegiatan dan perjuangan komunis. Karena itu, dukungan masyarakat ini untuk mensukseskan upaya-upaya pemerintah cukup menentukan. Lihat R. Clutterbuck, *Riot and Revolution in Singapore and Malaya* (London: Faber & Faber Ltd., 1973), hal. 190, lihat juga wawancara dengan Tan Sri C.C. Too, "Komunis Tidak Mati" dan "Hanya Jerangkap Samar PKM", dalam *Dewan Masyarakat* (Bil.9, September 1991), hal. 28-30

³⁰R. Clutterbuck, *op.cit.*, hal. 191

dibuat.³¹ Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan tanggungjawab tiap individu sebagai warganegara, sehingga mereka diberi peluang dan kesempatan yang lebih luas untuk memilih calon Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat daerah dalam Pemilu pada tahun 1952.³²

Untuk meningkatkan kesadaran rakyat memberikan informasi tentang kegiatan komunis, Jenderal Templer menawarkan pemberian hadiah yang lumayan kepada mereka yang memberikan informasi yang layak tentang kegiatan komunis kepada pemerintah. Pada awalnya, tawaran pemberian hadiah tersebut hanya sebesar \$50-\$100. Namun karena kurang mendapat perhatian, pada tahun 1951 jumlahnya ditambah menjadi \$250.000 kepada mereka yang berhasil menangkap atau membunuh Sekretaris Jenderal PKM, Chin Peng. Sementara uang sebesar \$200.000 bagi mereka yang berhasil menangkap atau membunuh anggota Dewan Pengurus Pusat PKM, di samping beberapa hadiah dan imbalan menarik lainnya untuk tindakan yang sama terhadap anggota gerilya komunis.³³ Selain itu, gerilya-gerilya komunis yang ditawan atau tertangkap oleh tentara pemerintah juga akan diberikan imbalan, apabila mereka bersedia untuk memberikan informasi tentang tempat persembunyian, jumlah serta kekuatan gerilya komunis yang masih bergerak di hutan.

Pada bulan Juni 1953, Jenderal Templer sekali lagi mencanangkan suatu kebijakan baru dengan memperkenalkan konsep *kawasan Hitam* dan

³¹Tan Ding Eing, *op.cit.*, hal. 311

³²Short Anthony, *op.cit.*, hal. 345-346

³³R. Clutterbuck, *op.cit.*, hal. 180

*Kawasan Putih*³⁴ *Kawasan hitam* yang dimaksud adalah wilayah yang masih rawan terhadap serangan gerilya komunis, sementara *kawasan putih* adalah kawasan yang dianggap telah bebas dan aman dari ancaman komunis. Daerah-daerah tersebut dapat menjalani kehidupan mereka secara normal kembali. Malaka diumumkan sebagai *kawasan putih* yang pertama pada penghujung tahun 1953.³⁵ Menjelang Mei 1954, lebih banyak daerah mendapat status *kawasan putih* seperti Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan.

B.III Periode 1955-1960

Kebijakan-kebijakan pemerintah pada periode sebelum ini, dalam beberapa hal tampaknya telah memberikan pengaruh dan melumpuhkan gerakan komunis. Jenderal Templer yang sebelumnya menjabat *High Commissioner*, diganti oleh Sir Donald MacGillivray. Sementara Direktur Operasi dijabat oleh LetJen. Bourne. Kehidupan gerilya di hutan mulai menderita dan senantiasa dibayangi oleh kekalahan. Hal ini yang kemudian mengantarkan kondisi sosial, politik dan ekonomi di Malaya mulai membaik, yang ditandai dengan pengumuman lebih banyak *kawasan putih*.

Kondisi itulah yang kemudian mendorong pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Hasil Pemilu 1955 ternyata memberikan kemenangan mayoritas kepada Partai Perikatan, yaitu aliansi *UMNO* (*United Malay National Organisation*), *MCA* (*Malayan Chinese Association*)

³⁴Gwee Hock Aun, *op.cit.*, hal. 78

³⁵R.Clutterbuck, *op.cit.*, hal. 194

dan *MIC (Malayan Indian Congress)*³⁶ Hasil yang diluar dugaan ini sekaligus memberikan gambaran bahwa dalam kehidupan sosio-politik di Malaya ketika itu telah terwujud rasa kesatuan dan persatuan dalam masyarakatnya yang terdiri dari berbagai etnis. Kemenangan besar *Partai Perikatan* yang lebih unggul dari partai-partai lain, termasuk partai unggulan PKM seperti *Partai Buruh* dan *Partai Progresif Perak* yang gagal memperoleh kursi, jelas menunjukkan bahwa PKM tidak mendapat dukungan dari penduduk Malaya secara keseluruhan.

Kemenangan besar *Partai Perikatan* yang membawa kepada pengangkatan Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri terpilih, merupakan langkah awal kehidupan demokrasi dan pembentukan pemerintahan sendiri di Malaya. Selain memberikan pukulan terhadap perjuangan PKM, hal itu sekaligus memberikan keyakinan kepada pemerintah kolonial Inggris tentang kemampuan rakyat Malaya mengatur pemerintahan sendiri. Pemilu 1955 juga merupakan suatu petanda makin membaiknya kondisi sosial, politik dan ekonomi Malaya. Hal itulah yang mendorong Inggris tidak ragu-ragu untuk menunaikan tuntutan kemerdekaan Malaya yang kian memuncak, sebagai lanjutan dari gerakan nasionalisme yang tumbuh dan berkembang pasca perang Dunia Kedua.

Tunku Abdul Rahman bercita-cita tinggi untuk menamatkan Undang-

³⁶Partai Perikatan memenangkan Pemilu 1955 secara mayoritas dan berhasil memenangkan 51 dari 52 kursi yang dipertandingkan. Hanya satu kursi dimenangkan Partai Islam Se-Tanah Melayu (PAS). Sementara partai-partai lain seperti Persatuan Kebangsaan Perak, Liga Melayu Perak dan Partai unggulan PKM seperti Partai Buruh, Partai Progressif Perak dan calon bebas gagal memperoleh kursi. Lebih lanjut tentang Pemilu 1955, menyangkut calon, jumlah udni, hasil, daerah dan lain-lain sebagainya, baca K.J. Ratnam, *Faham Perkauman dan Proses Politik di Malaya* (Kuala Lumpur: Universiti of Malaya Press, 1969,) hal. 218-234

Undang Darurat di Malaya. Karena itu setelah Pemilu 1955, kabinet mengambil beberapa kebijakan baru antara lain dengan menawarkan pengampunan massal kepada gerilya-gerilya komunis yang bersedia menyerahkan diri, pada tanggal 09 september 1955.³⁷ Untuk tujuan itu, berjuta-juta risalah yang memuatkan informasi tentang hal ini telah disebarakan secara meluas dengan cara menggugurkannya dari pesawat udara, terutama di daerah-daerah yang dikenal sebagai *kawasan hitam*. Mereka yang bersedia menyerah diri akan memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan dari pemerintah, selain dibimbing untuk memulai kembali kehidupan baru yang layak dan normal.³⁸ Kebijakan ini mendapat tanggapan dari sejumlah gerilya komunis, sehingga mendorong sejumlah 21 orang gerilya untuk menyerah diri pada bulan Oktober 1955. Antara mereka terdapat beberapa orang anggota Dewan Pimpinan Pusat PKM seperti Ah Kwang, Chen Kuen dan lain-lain.³⁹

daerah Baling (Kedah) sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan yang akan berlangsung pada 28-29 Desember 1955. Meskipun demikian, perundingan itu gagal karena Chin Peng tetap menolak desakan pemerintah untuk membubarkan PKM.⁴⁰

Walaupun bagaimanapun, tawaran pengampunan massal tersebut ditarik kembali oleh pemerintah mulai tanggal 08 Pebruari 1956. Kabinet Tunku Abdul Rahman juga tidak mau lagi melakukan segala bentuk jalan perundingan dengan pihak PKM, kecuali jika Chin Peng menyerah diri. Malah pemerintah terus melanjutkan upaya dari segi ketenteraan untuk menghancurkan gerakan komunis. Dalam bulan Februari 1956, Angkatan Udara Inggris melakukan serangan dan membom markas komunis di Johor. Sebanyak 14 orang gerilya komunis tewas dalam kejadian itu, termasuk dua tokoh pentingnya yaitu Goh Peng Tuan dan Yeung Kwo.⁴¹

Langkah-langkah pengawasan terhadap proses distribusi barang-barang kebutuhan pokok, terutama makanan juga terus diupayakan oleh pemerintah dengan cara melakukan pencatutan makanan. Setiap kepala keluarga hanya dibenarkan membeli barang-barang makanan kebutuhan pokok seperti beras tidak lebih dari dua kati (1.5 kilogram) untuk memenuhi keperluan keluarga selama seminggu. Langkah ini bertujuan untuk menghindari bekalan makanan dan kebutuhan pokok lainnya sampai ke tangan komu-

⁴⁰Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu dikenal kemudian sebagai "Rundingan Baling". Pemerintah dalam rundingan itu diwakili Tunku Abdul Rahman, David Marshall, Tan Cheng Lock dan Too Joo Hing. Sementara itu, PKM diwakili oleh Chin Peng, Rashid Maidin dan Chen Tien. Lihat, Arkib Negara Malaysia, *Hari Ini Dalam Sejarah Vol III* (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 1983), hal. 105-110

⁴¹Abdul Samad Idris, *op.cit.*, hal. 373, Anthony Short, *op.cit.*, hal. 482

nis.⁴²

Sampai menjelang kemerdekaan pada tahun 1957, diperkirakan lebih dari 3.200 orang penduduk Malaya telah ditempatkan di *kawasan putih*. Namun, terdapat beberapa daerah yang masih rawan sehingga tetap berstatus *kawasan hitam* seperti di daerah Perak Tengah, perbatasan Thailand, Johor dan di beberapa tempat lain.⁴³ Karena itu, beberapa waktu setelah kemerdekaannya, upaya-upaya untuk menghancurkan gerakan komunis masih terus berlanjut. Meskipun demikian, jumlah gerilya komunis yang terbunuh, tertangkap, ataupun yang menyerah diri kepada pemerintah terus meningkat dari hari ke hari. Posisi dan kekuatan gerilya komunis makin terdesak, terutama setelah Tun Abdul Razak yang juga Deputy Perdana Menteri menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan pada bulan Juli 1958. Dalam operasi-operasi yang dilakukan sepanjang tahun 1958-1960, pemerintah berhasil melumpuhkan kegiatan dan kekuatan komunis, serta merampas seperangkat persenjataan milik gerilya komunis. Antaranya berhasil menyita sejumlah 180 buah senjata api, 18.000 peluru dan 80 buah bom tangan milik gerilya komunis, selain 118 orang gerilya menyerah diri.⁴⁴ Dalam suatu operasi di Perak, seorang anggota Dewan Pimpinan PKM Cabang Perak yaitu Kong Szu

⁴²*Ibid.*, hal. 483

⁴³Daerah-daerah ini masih berstatus "kawasan hitam", karena jumlah gerilya komunis yang beroperasi masih dalam jumlah yang cukup besar. Di daerah Perak Tengah diperkirakan masih terdapat sekitar 550 orang, perbatasan Thailand sekitar 550 orang, dan Johor 500 orang. Sementara di tempat-tempat lain diperkirakan berjumlah hampir 300 orang. Lihat, Samad Idris, *op.cit.*, hal. 372

⁴⁴Short Anthony, *op.cit.*, hal. 495

tewas, sementara Chow Fong (seorang intel PKM) menyerah diri.⁴⁵

Secara keseluruhan, beberapa langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya memberantas ancaman komunis selama Darurat, mulai menampakkan hasil beberapa waktu kemudian. Dengan demikian, lebih banyak *kawasan putih* berhasil diwujudkan di beberapa daerah yang selama ini merupakan daerah rawan komunis. Pengaruh dan kekuatan Partai Komunis Malaya yang mulai melemah pasca Pemilu 1955 pada satu sisi, dan makin membaiknya kondisi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Malaya pada sisi yang lain, merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong pemerintah untuk menarik kembali pemberlakuan Undang-Undang Darurat yang secara resmi dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Juli 1960.⁴⁶

C. Strategi dan Taktik Partai Komunis Malaya (PKM) 1948-1960

C.I Periode 1948-1949

Menjelang tahun 1948, Partai Komunis Malaya mulai memasuki era baru dalam perkembangannya, ditandai dengan perubahan kebijakan untuk membentuk Republik Komunis di Malaya melalui suatu upaya revolusi bersenjata.⁴⁷ Perubahan bentuk strategi dan taktik itu, sebagian didorong oleh meningkatnya kegelisahan kaum buruh akibat kegagalan perjuangan secara konstitusional yang diterapkan oleh PKM sebelumnya. Strategi *Revolusi Bersenjata* yang diprakarsai oleh Chin Peng itu, mulai diterapkan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Arkib Negara Malaysia, *op.cit.*, hal. 112, lihat juga "Proclamation of the Ending of The Emergency", *Sunday Times*, tanggal 31 Juli 1960

⁴⁷ Hanrahan, *op.cit.*, hal. 108

setelah PKM gagal menghalang rencana pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada 01 Febuari 1948. Kegagalan itu mendorong Ching Peng mengadakan suatu rapat khusus bersama Dewan Pimpinan Pusat PKM pada tanggal 17-21 Maret 1948. Ketetapan untuk merealisasi suatu revolusi bersenjata demi terbentuknya sebuah *Republik Malaya* seperti yang telah disepakati oleh pimpinan tertinggi PKM yang hadir dalam pertemuan itu.⁴⁸

Revolusi seperti yang direncanakan oleh PKM itu, pada prinsipnya akan mengacu pada taktik dan strategi yang dipakai Moe Tze Tung sewaktu revolusi di China, yang terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah menyerang dan memaksa orang-orang Eropa keluar dari daerah perkebunan karet dan pertambangan timah yang umumnya terletak di pedalaman. Selain itu, pegawai-pegawai Inggris yang berada di kota-kota kecil atau di daerah pedalaman juga akan menjadi sasaran serangan gerilya komunis.

Pada tahap kedua, kawasan-kawasan yang ditinggalkan oleh Inggris kemudian akan diumumkan lalu dijadikan sebagai *kawasan bebas (liberated area)*, di mana gerilya militan akan dikader dan dilatih demi penambahan kekuatan personel. Pada tahap ketiga, diduga pemerintah akan terdesak meninggalkan kota-kota kecil dan daerah-daerah pedalaman, yang kemudian akan diambil alih oleh tentara gerilya. Pada tahap akhir, suatu pertempuran yang seru antara gerilya dan tentara-tentara pemerintah diperkirakan terjadi di kota-kota besar dan Singapura. Revolusi itu direncanakan akan dipimpin langsung oleh Law Yew, selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat PKM.⁴⁹

⁴⁸Cheah Boon Kheng, *Komrad Bertopeng, op.cit.*, hal. 179

⁴⁹R.Clutterbuck, *op.cit.*, hal. 170

Untuk itu, kebijakan militer gerilya harus mengacu kepada taktik serangan dengan memakai strategi pertahanan, dan operasi-operasi harus dilakukan melalui semua jaringan strategi baik di dalam maupun di luar negeri. Setiap pertempuran harus dilakukan seefektif dan setepat mungkin untuk menekan biaya perang. Hal ini merupakan suatu taktik keras yang mengharuskan pemanfaatan sumber secara optimal, dengan mengoperasikan lebih banyak gerilya dalam melakukan perlawanan. Periode ini juga sering disebut sebagai era "perang untuk memperoleh material" dan "perang penghematan perbelanjaan", yang bertujuan melumpuhkan perekonomian Malaya, sebaliknya untuk memperkuat ekonomi gerilya komunis.⁵⁰ Hal ini ditegaskan dalam perintah komunis yang antara lain mengatakan bahwa:

"... pada kenyataannya, imperialis Inggris memperoleh keuntungan ekonomi yang cukup besar hasil dari perkembangan industri karet dan timah, sehingga memberikan pemasukan Dollar Amerika dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun daerah penghasilannya sebagian besar terletak di daerah-daerah hutan yang jauh di pedalaman, yang merupakan daerah basis perjuangan gerilya komunis. Karena itu, mereka perlu disingkirkan. Apabila daerah ini dikuasai, gerilya komunis dapat mengembangkan kekuatan dan pengaruhnya di situ" (Pen) 51

Untuk itu, serangkaian serangan yang dilakukan antara Mei-Juni 1948, adalah didasarkan pada taktik gerilya di mana serangan dilakukan secara mendadak dan penyerangnya menghilang tanpa sempat diidentifikasi dengan jelas. Tugas ini akan dilakukan oleh unit *Corps Special Services* atau *Lau Tong Tui*.⁵² Sementara itu, Law Yew selaku Ketua Dewan Pimpinan

⁵⁰Hanrahan, *op. cit.*, hal. 110

⁵¹*Ibid.*

⁵²Short Anthony, *op. cit.*, hal. 95

Pusat PKM dalam suatu rapat khusus pada 11 Juni 1948, telah menginstruksikan penjualan semua tanah milik persatuan komrad, memusnahkan semua catatan menyangkut keanggotaan dan keorganisasian, dan mengarahkan suatu mobilisasi dan pengungsian ke daerah-daerah hutan. Setelah itu, komunikasi antara mereka hanya akan disampaikan lewat komunikasi lisan saja, agar tidak dapat diidentifikasi oleh aparat pemerintah.⁵³

Dengan taktik itu, gerilya-gerilya PKM mulai melakukan perang sipil pada akhir bulan Juni 1948, di samping mensponsori beberapa aksi mogok yang dilakukan secara besar-besaran di Singapura dan Malaya antara Mei hingga Juni 1948. Sementara aksi mogok berjalan, gerilya-gerilya PKM terus melakukan aksi-aksi revolusioner seperti menyerang pekerja-pekerja yang enggan bekerjasama, menghancurkan sarana komunikasi dan transportasi. Selain tindakannya merusak dan menghancurkan perkebunan-perkebunan karet dan pertambangan-pertambangan timah. Klimaks dari berbagai tindak kekerasan, kekejaman dan kekacauan yang dilakukan oleh komplotan gerilya PKM itu, merupakan salah satu faktor pendorong terpenting mulai diberlakukan Undang-Undang Darurat di Malaya pada pertengahan tahun 1948.

Meskipun Undang-Undang Darurat secara tegas menyatakan keberadaan PKM sebagai sebuah organisasi terlarang, namun tidak menghalang PKM untuk melanjutkan aksi-aksi yang bersifat revolusioner. Tercatat sebanyak 67 kasus pembunuhan terjadi sepanjang bulan Juli 1948, sebagian besar melibatkan PKM sehingga organisasi ini dituding sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kejadian-kejadian tersebut.⁵⁴ Tudingan itu malah

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ N.J. Ryan, *op.cit.*, hal. 193

mendorong PKM semakin gencar melakukan serangkaian serangan terhadap tentara pemerintah dengan menghancurkan sejumlah sarana dan prasarana umum, merusak kantor-kantor polisi dan jaringan sistem telekomunikasi dan transportasi, serta melakukan aksi-aksi pemogokan buruh, dan lain sebagainya.

Berbagai tindakan kekerasan, kriminal dan kekacauan yang ditimbulkan oleh gerilya-gerilya PKM itu didukung oleh kekuatan personel dan persenjataan yang memadai yang diperoleh dari Inggris selama pendudukan Jepang yang disalurkan melalui *Malayan Peoples Anti Japanese Army* atau *MFAJA*.⁵⁵ Hal yang demikian itu telah mendorong gerilya-gerilya PKM untuk semakin berani melakukan serangan secara terbuka terhadap Inggris. Meskipun demikian, untuk menghindari penyergapan pihak aparat keamanan, banyak dari anggota dan pemimpin-pemimpin PKM melarikan diri dan bersembunyi ke dalam hutan.

Serangkaian serangan yang dilakukan oleh aparat keamanan, telah menimbulkan kerugian baik material maupun personel yang cukup besar di pihak gerilya-gerilya komunis. Antara mereka termasuklah Lau Yew, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKM yang tewas dalam suatu pertempuran di Kajang Selangor pada tanggal 16 Juli 1948.⁵⁶ Meskipun demikian, hal tersebut tidak melemahkan semangat gerilya PKM. Dalam suatu pertemuan khusus yang diselenggarakan oleh Biro Politik yang berlangsung pada tahun 1949, pim-

⁵⁵Maswari Rosdi, *Sejarah Malaysia Modern* (Kuala Lumpur: Sri Murni, 1989), hal. 200

⁵⁶Rujuk laporan *Communist Banditry in Malaya: The Emergency June 1948-June 1951* (Kuala Lumpur: Departement of Information, Federation of Malaya, 1956), hal. 32, Khong Kim Hoong, *op.cit.*, hal. 149

pinan tertinggi PKM menetapkan strategi baru untuk merevisi kelemahan dan kekurangan mereka selama ini. Kondisi geografis Malaya yang relatif kecil dan sempit, namun mempunyai jaringan telekomunikasi dan transportasi yang padat telah memberikan keuntungan kepada tentara pemerintah, sebaliknya merugikan taktik dan strategi PKM. Hal itu disebabkan karena tentara-tentara pemerintah dengan mudah dapat bergerak lebih cepat dan tepat dalam mematahkan serangan dan memenangkan setiap pertempuran yang terjadi dengan kelompok gerilya PKM.

Hal yang demikian itu merupakan hambatan dan kendala yang cukup besar kepada gerilya komunis dalam mengatur strategi dan memenangkan setiap pertempuran. Karena itu, basis gerilya adalah masalah yang paling fundamental, sehingga keperluan untuk melindungi basis tersebut merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan bagi mencapai kemenangan. Kekuatan gerilya itu, kemudian akan digunakan untuk latihan yang dalam setiap percobaan pertempuran akan secara pelan-pelan menguasai tentara pemerintah. PKM cukup menyadari bahwa hal itu bukanlah merupakan suatu tugas yang mudah untuk dapat dilaksanakan.⁵⁷

Untuk memecahkan tiap permasalahan yang timbul, percobaan bagi memperbaiki konsep taktik untuk memperkuat keorganisasian gerilya telah dibuat dengan memberi perhatian khusus kepada "taktik yang relatif," yaitu bagaimana bertindak dan melakukan serangan-serangan secara cepat dan menepati sasaran. Untuk tujuan itu, *Tentara Pembebasan Bangsa-Bangsa Malaya (Malayan Races Liberation Army-MRLA)* telah dibentuk pada tanggal 01 Februari 1949. Lebih dari 60% anggotanya terdiri dari mantan pimpinan

⁵⁷ *Ibid.*

tertinggi MPAJA, 20-30% terdiri dari kelompok gerilya PKM sendiri, dan selebihnya terdiri dari penduduk lokal berbangsa Cina dan kelompok Min Yuen. Keseluruhan anggota MRLA diperkirakan berjumlah hampir 4000 orang yang terbagi atas sepuluh resimen yang tersebar di seluruh Malaya. Sekitar 10% dari mereka terdiri dari wanita. Dengan menggunakan nama *Tentara Pembebasan Bangsa-Bangsa Malaya*, PKM berharap minat orang-orang Melayu dan India akan bertambah untuk mendukung dan menganggotainya.⁵⁸

Dengan terbentuknya MRLA, aksi-aksi revolusioner makin diperhebat dan diperluas, terutama di areal-areal perkebunan karet dan pertambangan timah. Tindakan lain adalah merusakkan kantor-kantor dan pos polisi, menghancurkan jaringan sistem komunikasi dan transportasi, selain membunuh individu-individu dan pihak-pihak tertentu yang dicurigai telah bersekongkol dengan tentara pemerintah dalam menantang kekejaman gerilya komunis. Bersamaan dengan itu, *Pasukan Pembunuh* mulai difungsikan kembali, tapi dalam jumlah yang lebih besar. Dengan cara itu, mereka percaya akan memperoleh hasil dan kejayaan yang sama seperti yang diperoleh pada waktu perang Dunia Kedua yang lalu.

Pada pertengahan tahun 1949, Dewan Pimpinan Pusat PKM memutuskan suatu bentuk kebijakan baru yang lain dengan menempatkan dan mengfungsikan kelompok Min Yuen secara aktif dan bersifat militan bagi membantu kekuatan gerilya.⁵⁹ Dengan pembentukan suatu *Unit Khas* dan *Kelompok Ker-*

⁵⁸Uraian lebih lanjut tentang Tentara Pembebasan Bangsa-Bangsa Malaya (MRLA), lihat laporan yang dikeluarkan oleh Departement of Information, Federation of Malaya, *Communist Terrorism in Malaya: The Emergency June 1948 - June 1952* (Kuala Lumpur: Departemen of Information, Federation of Malaya, 1952), hal. 9

⁵⁹Hanrahan, *op.cit.*, hal. 119

ja, kini Min Yuen dipercayakan sebagai *Pasukan Pembunuh*. Dengan demikian Min Yuen semakin berperanan dalam menghasut dan mempengaruhi massa yang bersimpati terhadap perjuangan komunis untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan tentara pemerintah, sehingga lebih banyak aksi revolusioner dan tindak kekejaman dilakukan oleh kelompok Min Yuen.

C.II Periode 1950-1954

Aksi revolusioner pada tahap pertama perjuangan gerilya PKM kurang berhasil dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah keberhasilan dari serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan pemerintah terutama dari segi ketentaraan. Dalam setiap pertempuran, perkiraan-perkiraan tentara pemerintah hampir selalu menepati sasaran. Sampai menjelang tahun 1952, jumlah gerilya PKM yang hilang diperkirakan lebih dari 4000 orang, 2/3 dari mereka tewas dalam pertempuran, termasuk beberapa orang anggota Dewan Pimpinan Pusat PKM. Kekuatan tentara pemerintah jauh lebih besar, selain memiliki sejumlah peralatan dan persenjataan yang lebih lengkap. Selain itu kebijakan pemerintah dengan memindahkan anggota-anggota kelompok Min Yuen ke daerah pemukiman baru melalui program *Kampung Baru*, secara tidak langsung telah melemahkan pengaruh dan kekuatan gerilya PKM, terutama dalam hal suplai bahan makanan, obat-obatan, informasi dan kader-kader baru.

Dengan demikian, PKM mulai menyadari segala kelemahan taktik dan strategi mereka selama ini. Akibatnya PKM mulai melakukan beberapa perubahan, pembaruan, dan merevisi kembali taktik dan strategi yang selama ini dianggap kurang menepati sasaran. Dalam suatu rapat Dewan Pimpinan Pusat PKM yang berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1951, PKM menetapkan

suatu kebijakan baru, sekaligus merupakan suatu perubahan dalam taktik dan strateginya dalam upayanya untuk memenangkan perjuangan dan revolusi di Malaya.⁶⁰

Taktik dan strategi Maa Tze Tung yang diterapkan sebelumnya oleh PKM, telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Malaya. Karena itu, perjuangan mereka sekarang harus berusaha untuk memperluas pengaruh dengan menyusup masuk ke dalam berbagai organisasi sosial politik yang secara terbuka menunjukkan penantangan mereka terhadap pemerintah kolonial Inggris. Ching Peng sendiri telah menyarankan agar tokoh-tokoh politik Melayu radikal diangkat untuk menganggotai Dewan Pimpinan Pusat PKM. Antara mereka yang terpengaruh, adalah Abdullah C.D., Rashid Maidin, Shamsuddin Salleh dan Musa Ahmad.⁶¹ Kebijakan untuk mempengaruhi orang-orang Melayu menyertai perjuangan PKM ini disadari oleh Lau Lee, seorang tokoh PKM yang menyatakan bahwa:

"...pertentangan kita terhadap agama Islam serta pendekatan kita yang anti-agama menyebabkan orang-orang Melayu menjadi marah. Kita tidak boleh cuba meyakinkan golongan petani Melayu dengan alasan bahwa komunis memberi kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan ajaran Islam. Masanya belum tiba bagi kita menyampaikan ideologi kepada orang-orang Melayu. Oleh itu, kita mesti bersikap lembut dengan orang Melayu bagi memupuk semangat nasionalisme, supaya dalam saat sekarang mereka benar-benar anti-British sehingga sanggup berjuang ke arah kemerdekaan. Mari kita hadapi bahwa dengan tidak ada sokongan dan perpaduan dari orang Melayu, maka sangat sulit bagi kita untuk mencapai tujuan yang akan diperjuangkan..."⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 221

⁶¹ Lebih lanjut rujuk, Fatini Yaacob, "Muslihat PKM Dengan Orang Melayu", dalam *Dewan Masyarakat* (Vol.7, Bil. 29, Julai 1991), hal. 28-30

⁶² Mengutip ungkapan yang dikemukakan oleh Lau Lee, salah seorang tokoh PKM, dalam Abdul Samad Idris, *op.cit.*, hal. 372

Hal ini dapat dicapai dengan membentuk suatu front atau jaringan khusus dalam semua komunitas dan kelas masyarakat yang mendapat dukungan dari golongan borjuis dan kelompok kapitalis. Sebaliknya, tindak kekerasan yang dapat menimbulkan kebencian dan kemarahan golongan petani dan kaum buruh haruslah dihindarkan. Percobaan untuk menembus masuk ke dalam jaringan ketentaraan seperti dalam pasukan tentara, polisi dan aparat pemerintah juga harus dilakukan.⁶³

Dalam upayanya untuk menarik dan menghimpun kekuatan massa, tindak kekerasan yang dilakukan selama ini seperti merusak dan menghancurkan sarana dan prasarana umum, merampas KTP, membakar kampung-kampung baru, menyerang kantor-kantor polisi, dan lain sebagainya harus diupayakan untuk dihindari. Demikian juga kegiatannya menghancurkan perkebunan karet, pertambangan timah dan pabrik-pabrik akan dikurangi, karena hal itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi simpati kelompok tani dan buruh yang hilang mata pencaharian utama akibat tindakan-tindakan semacam itu. Sebaliknya langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan kelompok itu akan lebih ditingkatkan untuk mendapatkan dukungan dan simpati mereka terhadap perjuangan komunis untuk memenangkan revolusi di Malaya.

Massa akan diawasi dan 'dilindungi' oleh para Min Yuen yang diserahi tanggungjawab untuk menkonsolidasi organisasi, namun tetap menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan dan keselamatan PKM. Mereka yang gagal melaksanakan tugasnya akan mendapat hukuman, namun tidak sampai dibunuh

⁶³Hanrahan, *op.cit.*, hal. 221

atau disakiti, sebaliknya hanya akan dinasehati, didenda atau dikritik. Jika massa tidak dapat menerima pendapat atau terjadi pertentangan antara kelompok Min Yuen dan massa pendukungnya, maka mereka haruslah pintar mengubah orientasi. Dari situlah pimpinan partai dapat menguji hubungan dan kerjasama di antara sesama mereka. Selain itu, mereka harus menggunakan kebijakannya sendiri untuk menghindari kesulitan atau kendala yang mungkin timbul. Dengan demikian, mereka dituntut untuk memahami kondisi massa, dan hal tersebut haruslah dibicarakan dalam setiap pertemuan di antara mereka.

Kebijakan baru PKM itu dikenal sebagai *Front Merah*, di mana karakteristik sebenar dari tindak kekerasan telah mendapatkan bentuk dari ide perang, kekuatan militer, mendapatkan bahan makanan dan mempengaruhi atau mencari dukungan serta simpati massa.⁶⁴ Gerilya komunis kini bergerak dalam jumlah yang lebih kecil, tidak melebihi dua belas orang agar dengan mudah dan cepat dapat menghilangkan diri ke dalam hutan apabila berhadapan atau mendapat serangan dari pasukan pemerintah.

Selain itu, PKM menetapkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan kelompok aborigin dengan memeralat suku Sakai yang umumnya tidak memahami politik dan perjuangan komunis, karena berdomisili di daerah-daerah hutan yang jauh dari pantauan pemerintah.⁶⁵ Hal itu dilakukan dengan cara memberikan ancaman dan mengeksploitasi pengetahuan mereka yang lebih menguasai situasi dan kondisi hutan yang menjadi basis gerakan komunis. Ini sangat membantu gerilya-gerilya PKM dalam mengatur tak-

⁶⁴*Ibid.*, hal. 123

⁶⁵*Ibid.*

tik dan strategi PKM dalam upayanya memenangkan tiap pertempuran dengan tentara pemerintah.

Untuk menyatukan golongan borjouis yang terdiri dari berbagai kelompok, ras, suku dan agama, gerilya-gerilya komunis telah mendesak kelompok ini untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan revolusi, terutama dari segi material yaitu dengan cara membayar iuran bagi tabung PKM. Besarnya jumlah sumbangan, tergantung jenis usaha yang ditekuni berdasarkan keluasan perkebunan karet dan pertambangan timah, serta hasil yang diperoleh. Jika enggan untuk berbuat demikian, mereka akan diserang sebagai suatu tanda peringatan. Sementara untuk kelompok kapitalis yang lebih besar akan dikuasai oleh PKM, dan diperintahkan agar meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya.⁶⁶

Mulai bulan Desember 1953, gerilya PKM harus mengupayakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri karena bantuan dari kelompok Min Yuen makin berkurang, akibat pembentukan kampung-kampung baru oleh pemerintah. Berbagai langkah telah diambil, antara lain dengan mengolah tanah untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran di hutan.⁶⁷ Meskipun demikian, mereka menghadapi kendala yang cukup besar karena seringkali kebun dan tanaman mereka dimusnahkan oleh tentara pemerintah dengan cara menyemprotkan racun dari udara.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh PKM untuk melakukan perubahan dan perbaikan strateginya, namun mereka terus menderita kekalahan. Hal itu sebagian disebabkan oleh makin gencarnya gerakan operasi

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 223

⁶⁷ Tan Ding Eing, *op. cit.*, hal. 311

pemberantasan komunis, yang dipimpin oleh Sir Gerald Templer ketika itu. Sebaliknya dukungan massa terhadap perjuangan PKM mulai makin berkurang, malah banyak di kalangan gerilya komunis yang mengambil keputusan untuk menyerah kepada pemerintah, dan kembali ke pangkal jalan karena mulai merasakan perjuangan mereka tetap tidak memberikan hasil.

C.III Periode 1955-1960

Menjelang tahun 1955, PKM mulai diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang baru. Hal itu dalam beberapa hal, banyak dipengaruhi antara lain oleh taktik dan strategi Comintern, dan suasana politik di Malaya menjelang Pemilu 1955, serta upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan yang hampir mencapai titik puncak ketika itu. PKM telah menggunakan kesempatan itu untuk muncul bagi menebus martabat mereka, dengan keluar dari daerah persembunyian mereka dan mengatakan bahwa gerakan revolusi bersenjata PKM akan menyumbang peranan yang lebih besar dalam rangka mencapai kemerdekaan Malaya.

Prinsip-prinsip pokok perjuangan PKM ketika itu, adalah memperjuangkan keberadaan PKM sebagai satu-satunya partai politik yang dapat mewakili inspirasi massa dalam upaya melawan kolonialisme Inggris, sebaliknya bukan dalam kapasitasnya sebagai penantang atau oposisi terhadap koalisi UMNO-MCA-MIC. Dengan kata lain, PKM berupaya untuk turut memberikan andil dan berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik menurut prinsip-prinsip demokrasi parlementer. Sekaligus bercita-cita untuk membentuk sebuah tatanan dunia baru sesuai dengan doktrin Comintern yang mulai mencanangkan propaganda *Perdamaian Bersama (Peaceful Coexistence)*. Meskipun demikian, hal itu pada pada prinsipnya lebih merupakan suatu

muslihat PKM, dalam memperjuangkan cita-cita dan tujuan politiknya di Malaya. Hal itu sejalan dengan konsep komunis seperti diungkapkan oleh Yeong Kua selaku wakil Sekretaris Jenderal PKM, sebagai berikut;

"... Taktik kita pada hari ini adalah melakukan kerjasama dengan pemerintahan Tunku dalam upaya mengusir imperialis dan kolonial Inggris. Setelah negara ini berada dalam keadaan aman, dengan cepat kita akan menyusun langkah selanjutnya untuk menggulingkan pemerintahan Tunku yang diktator, kemudian merubah kediktatoran tersebut dalam semua ras dan strata..." (Pen)⁶⁸

Dengan demikian, PKM mulai mencanangkan taktiknya yang baru itu dengan menawarkan keterbukaannya kepada partai-partai politik yang secara umum mewakili inspirasi massa. Namun, dalam waktu yang sama Dewan Pengurus Pusat PKM telah mengarahkan anggota-anggotanya agar secara rahasia dapat menyusup masuk ke dalam organisasi-organisasi sosial politik non-komunis. Hal itu pada prinsipnya bertujuan untuk memperkenalkan agitasi dengan cara menganggotai organisasi *United People's Democratic Front*, yang menunjukkan rasa simpati dan turut mendukung perjuangan PKM dan sekutu-sekutunya. PKM juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba menyembunyikan identitas dan tujuannya. Untuk itu, PKM berusaha untuk bersikap netral terhadap sesama organisasi yang menjadi partner atau sekutu *front* sekaligus menjamin serta menjaga wibawanya, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Yeong Kua sebagai berikut;

"...jika kami tidak menggunakan kegiatan yang bersifat terbuka dan legal, kami akan terjepit dalam pergerakan yang sempit dan terbatas. Hal ini mengakibatkan massa tidak terkoordinir dengan

⁶⁸Mengutip ucapan yang pernah dikemukakan oleh Yong Kua selaku Sekjen PKM seperti dimuat dalam laporan *The Communist Threat To Independent Federation of Malaya* (Kuala Lumpur: Government Press, 1959), hal. 17

baik, dan menyeretnya ke posisi yang lebih bahaya..." (Pen)⁶⁹

Dengan demikian, gerakan-gerakan dan upaya-upaya kampanye subversif PKM mulai dilakukan di luar daerah hutan, dengan medan yang tidak terbatas. Meskipun demikian untuk lebih mengembangkan pengaruh dan kekuatannya, PKM memiliki kelompok sasarannya yang utama, yaitu dengan cara memberikan perhatian secara khusus terhadap organisasi politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi-organisasi buruh atau serikat-serikat pekerja yang masih bergerak aktif ketika itu.

PKM melihat bahwa Pemilu 1955 merupakan kesempatan untuk menyusun kekuatan partai, agar dapat bersaing dan mengalahkan partai-partai politik yang bergerak aktif ketika itu. Untuk tujuan itu, perhatian khusus telah diberikan kepada partai-partai politik yang termasuk dalam front sosialis, seperti *Partai Rakyat*, *Partai Buruh*, *People's Progressive Party* dan *Socialist Youth League*. Mereka akan melakukan kampanye-kampanye yang menyebarluaskan propaganda-propaganda kepada massa yang bersimpati terhadap perjuangan PKM. Dengan taktik dan strategi yang diterapkan itu, status legal yang dimiliki oleh sekutu PKM, secara tidak langsung telah diperalat untuk memenangkan Pemilu 1955.

Melalui organisasi-organisasi massa itu, PKM secara tidak langsung akan dapat mengarah dan menumpukan perhatian massa agar dapat memilih calon yang diunggulkan oleh sekutu-sekutu PKM. Apabila kondisi menunjang dan cukup memungkinkan, mereka akan berusaha untuk menempatkan tokoh-tokoh pemimpin massa untuk berkampanye bagi sekutu PKM dan meminta agar

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 19

massa menggunakan hak pilihnya untuk hanya memilih calon dari PKM dan sekutu-sekutunya saja. Sebaliknya, tidak memilih calon dari partai politik yang lain yang ikut bertanding dalam pemilu tersebut.

Selain itu, PKM juga meminta agar massa dan siswa-siswa memboikot dan melakukan beberapa kekacauan dan gangguan umum, di samping sejumlah bentuk kampanye yang lain untuk mempengaruhi massa agar memilih calon yang diunggulkan oleh PKM selama Pemilu 1955 berlangsung.⁷⁰ Selain itu, PKM juga telah menjanjikan terbentuknya sebuah pemerintahan yang adil, makmur dan merata, dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat secara umum, terutama rakyat kelas bawah sekiranya PKM memenangkan pemilu tersebut.

PKM dalam propaganda-propagandanya turut mengupayakan agar pemberlakuan Undang-Undang Darurat terus berlanjut. Dengan demikian, PKM akan mempunyai waktu dan kesempatan yang lebih luas untuk menanamkan pengaruh dan kekuatannya dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kesempatan itu dapat dimanfaatkan oleh PKM sebaik mungkin untuk menarik dukungan massa dengan alasan hak dan kebebasan mereka selama ini telah dibatasi sedemikian rupa oleh pemerintah selama pelaksanaan Undang-Undang Darurat tersebut.

Pada periode ini, menguasai organisasi-organisasi buruh juga masih merupakan sasaran dan target PKM dalam upayanya merealisasikan cita-

⁷⁰Antara lain bentuk - bentuk kampanye yang telah dilakukan oleh PKM dalam upayanya memenangkan pemilu adalah membayar individu-individu tertentu untuk memilih PKM, menyediakan fasilitas transportasi selama Pemilu, dan melakukan ancaman kepada calon pemilih, di samping berusaha mencari dan menonjolkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh calon dan partai lawan. *Ibid.*, hal. 20

cita membentuk sebuah negara republik yang bercorak komunis di Malaya. Hal yang demikian itu didukung pula oleh perkembangan gerakan kaum buruh yang kembali membaik setelah sekian lama terhenti, terutama di kalangan buruh Cina untuk kembali aktif dalam serikat-serikat pekerja menjelang tahun 1955. Kesadaran dan kesempatan untuk menganggotai kembali kesatuan pekerja antara lain disebabkan oleh terjadinya beberapa perkembangan yang cukup menunjang dalam bidang sosial, politik dan ekonomi di Malaya ketika itu. Antara lain ditandai dengan kenaikan harga karet, makin maraknya kegiatan politik pasca Pemilu 1955, konflik dan pertantangan ideologi dan politik hasil pemilu, selain pergerakan ke arah pembentukan pemerintahan sendiri yang hampir mencapai titik puncak. Selain itu, kegelisahan kaum buruh yang makin meningkat di Singapura dan kuatnya pengaruh pemimpin-pemimpin buruh di Malaya, serta keadaan darurat yang yang mulai membaik, di samping membaiknya kondisi kehidupan rakyat dalam berbagai bidang merupakan sejumlah faktor pendorong yang membawa kepada perubahan taktik dan strategi PKM dalam mencapai cita-cita dan tujuan politiknya di Malaya.⁷¹

Peningkatan kembali keanggotaan orang-orang Cina dalam serikat-serikat buruh di Malaya, erat kaitannya dengan kemunculan kelompok kecil anggota serikat pekerja yang radikal dan militan yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam organisasi-organisasi buruh di Malaya ketika itu. Dari sinilah anggota PKM mulai memainkan peranannya yang lebih penting, misalnya dengan menduduki beberapa jabatan terpenting dalam organisasi

⁷¹Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, lihat *Laporan Tahunan Pejabat Buruh 1955* (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia), hal. 59

seperti Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas terlihat bahwa potensi-potensi yang dimiliki oleh sebagian kecil buruh-buruh Cina telah dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan massa melakukan berbagai aksi revolusioner.

Beberapa orang pemimpin Cina yang terlibat dalam urusan mengelola serikat-serikat pekerja itu termasuklah Ooi Thiam Siew, Tan Thuan Boon, Kua Boo Sun, Yin Choa Han dan V. David. Sebagian besar mereka merupakan kelompok kelas menengah yang berpendidikan Inggris yang menjalin hubungan dan kerjasama yang erat dengan beberapa orang tokoh penting partai politik radikal di Malaya ketika itu. Sebagian besar mereka juga merupakan anggota Partai Buruh, yang bertanggungjawab dalam mengorientasikan partai ke arah ideologi sayap kiri. Mereka inilah yang kemudian berhasil membawa masuk kelompok intelektual di Malaya, khususnya dari kalangan orang-orang Cina untuk menganggotai dan terlibat secara langsung dalam perjuangan PKM beberapa waktu kemudian.⁷²

Hasil dari Pemilu yang berlangsung pada tahun 1955 ternyata telah memberikan kemenangan yang cukup besar pada partai pemerintah, yaitu *Partai Perikatan* yang merupakan koalisi UMNO-MCA-MIC.⁷³ Hal itu memberikan pengaruh yang cukup penting terhadap pola perkembangan taktik dan strategi PKM. Keunggulan *Partai Perikatan* satu sisi, dan kecundangannya partai-partai unggulan PKM dalam Pemilu 1955, memperlihatkan tanda-tanda

⁷²Leong Yee Fong, "Perkembangan Kesatuan Sekerja dan Dasar Kolonial di Malaya", dalam Cheah Boon Kheng, Abu Talib Ahmad, eds., *Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain* (Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1990), hal. 279

⁷³Lihat Abdul Samad Idris, *op.cit.*, hal. 368, dan Gwee Hock Aun, *Emergency In Malaya 1948-1960*, *op.cit.*, hal. 88

makin berkurangnya dukungan dan simpati massa terhadap gerakan komunis di Malaya. Kemenangan besar Partai Perikatan dalam Pemilu 1955, itulah yang kemudian mendorong Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri melakukan berbagai upaya dan mencari jalan penyelesaian untuk bagi menamatkan Undang-Undang Darurat di Malaya beberapa waktu kemudian.

Untuk tujuan itu, pemerintah mengambil beberapa langkah dan upaya yang dirasakan tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian Malaya ketika itu. Antara lain kebijakan yang diambil, adalah dengan menawarkan pengampunan secara massal terhadap gerilya komunis pada tanggal 09 September 1955.⁷⁴ Tawaran tersebut telah mendapat reaksi yang cukup baik di kalangan gerilya-gerilya PKM. Sampai bulan Oktober 1955, sejumlah 21 orang gerilya PKM telah menyerah diri kepada pemerintah, termasuk beberapa pemimpin Melayu yang berpengaruh seperti Ahmad Bin Salleh dan Sulaiman Bin Ibrahim.⁷⁵ Sebahagian besar dari mereka yang menyerah, telah turut berpartisipasi membantu pemerintah berkampanye dalam upaya memujuk gerilya-gerilya yang masih bergerak di hutan supaya keluar dari tempat persembunyiannya, dan menghentikan perjuangan yang sia-sia lalu kembali ke pangkal jalan. Di samping turut membantu dalam menyebarkan risalah-risalah dan selebaran yang menyeru gerilya untuk menyerah, seperti yang dilakukan oleh Ching Kuen seorang asisten platoon komander MRLA cabang Perak yang berbunyi:

⁷⁴Ibrahim Mahmood, dalam *Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu: Suatu Penyingkapan Kembali Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu Menuju Kemerdekaan* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981), hal. 476

⁷⁵*Ibid.*, hal. 478

"... Saudara-saudaraku. Pemimpin-pemimpin kita sedang asyik berasmara di dalam pondok rahasia mereka. Tetapi jika anda mau memiliki teman wanita, anda harus menunggu hingga wanita tersebut lepas dari tangan mereka. Inilah yang dikenal sebagai 'disiplin' oleh pimpinan PKM, menindas gerilya-gerilya dari golongan rendah. Jika sakit dan memerlukan bantuan, anda tidak akan mendapatkan pelayanan yang selayaknya. Anda akan menyaksikan bagaimana mudahnya pimpinan kita mendapatkan pakaian baru, makanan dan perlengkapan lainnya. Makanan mereka enak-enak. Oleh itu, saya menasehatkan kepada semua saudara-saudaraku, menyerahlah! Setelah menyerah, saya dengan bebas dapat pergi ke Taiping, Kuala Lumpur dan Setiawan dan bertemu kembali dengan gerilya-gerilya yang duluan menyerah sebelum saya. Mereka telah bertemu kembali dengan orangtua, kakak, isteri dan anak-anak mereka..." (Pen) ⁷⁶

Hal yang demikian itu ternyata telah menimbulkan kebimbangan di pihak pimpinan tertinggi PKM. Dukungan dan simpati massa yang makin berkurang terhadap perjuangan PKM, menyebabkan para pemimpin PKM senantiasa dibayangi oleh kekalahan. Melihat situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan itu, akhirnya mendorong Chin Peng selaku Sekjen PKM mengutus surat kepada Tunku Abdul Rahman menyatakan kesediaannya untuk mengadakan suatu pertemuan dengan pihak pemerintah, bagi merundingkan hal Darurat sebagai langkah menciptakan keamanan dan stabilitas nasional.

Persyaratan yang telah dikemukakan oleh Chin Peng, antara lain menyebut harus diberlakukan gencatan senjata sementara waktu selama proses perundingan berlangsung. PKM dalam pernyataannya mengakui kejujuran pemerintah. Pada sisi yang lain, kesediaan Tunku Abdul Rahman untuk berunding dengan PKM pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh rasa yakin dan optimis beliau bahwa Darurat dapat boleh diselesaikan tidak hanya melalui pendekatan militer, tetapi juga dapat diupayakan melalui pendekatan

⁷⁶Sebagian dari apa yang diungkapkan oleh Chin Kuen, seperti dikutip oleh Harrahan, *op.cit.*, hal. 126

diplomasi.

Dalam pertemuan di Baling pada 28-29 Desember 1955, PKM menuntut pemerintah untuk mengakui keberadaan PKM sebagai sebuah partai legal dan diizinkan untuk kembali aktif dalam berbagai kegiatan politik di Malaya. Meskipun demikian, Chin Peng secara tegas menolak untuk mengatakan pertemuan itu sebagai isyarat untuk PKM 'menyerah diri'. Beliau sebaliknya menganggap pertemuan itu hanya sebagai langkah untuk 'meletakkan senjata'.⁷⁷ Tuntutan-tuntutan itu ditolak oleh pemerintah, karena pernyataan itu jelas menunjukkan perjuangan PKM pada prinsipnya bukanlah untuk memerdekakan Malaya dan menciptakan keamanan seperti yang dicanangkan oleh PKM. Tindakan itu sebaliknya hanya ingin mengembangkan paham Komunisme dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan politiknya untuk membentuk sebuah *Republik Malaya* yang bercorak Komunisme.

Gagalnya upaya mencari jalan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan dan titik temu dalam Rundingan Baling itu, menyebabkan PKM kembali melanjutkan perjuangan secara bergerilya di hutan. Meskipun demikian, gerakan-gerakan di kalangan siswa-siswa tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh PKM. Beberapa waktu setelah gagalnya Rundingan Baling, siswa-siswa Cina yang berpendidikan telah menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan gerakan pelajar-pelajar berhaluan kiri yang berkedudukan di Singapura, selain bekerjasama dengan organisasi-organisasi buruh yang radikal di Malaya dan Singapura ketika itu. Dalam bulan Oktober 1957, satu pertemuan yang dihadiri sekitar lima puluh orang siswa

⁷⁷Arkib Negara Malaysia, *Hari Ini Dalam Sejarah Vol. III* (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 1983), hal. 108-109

dari beberapa buah Sekolah Menengah Cina di Pulau Pinang, dan dan sekitar dua puluh orang anggota *Kesatuan Pekerja Fabrik dan Pekerja-Pekerja Am*, telah membicarakan lebih lanjut hubungan kerjasama bagi kedua belah pihak. Kesepakatan telah diambil untuk menerbitkan beberapa surat khabar di sekolah-sekolah tertentu, dalam upaya mengembangkan pengaruh komunisme dalam gerakan-gerakan pelajar dan kaum buruh.⁷⁸

Sementara itu, di kalangan anggota Partai Buruh yang sebagian besar terdiri dari pegawai-pegawai kesatuan buruh yang radikal dan militan, telah berusaha mempertingkatkan fahaman kiri politik mereka. Untuk itu, Partai Buruh Cabang Selangor yang dipimpin Tan Thuan Boon telah mendesak dan menggesa pemerintah supaya mengakui keberadaan PKM sebagai salah sebuah organisasi yang bergerak secara legal sekaligus membatalkan Undang-Undang Darurat. Desakan-desakan yang disuarakan oleh Partai Buruh itu, dalam beberapa hal mencerminkan cita - cita PKM sebagaimana yang tercantum dalam *Manifesto September 1957*. Manifesto itu pada intinya dikeluarkan oleh PKM dengan tujuannya yang prinsipil yaitu untuk memperkuat *Barisan Bersatu*. Selain menyatukan tenaga rakyat untuk memberikan tekanan dan desakan terhadap pemerintah supaya secepatnya mencabut pemberlakuan Undang-Undang Darurat dengan sejumlah persyaratan yang bersifat lebih memihak kepada PKM.⁷⁹

Sementara pada sisi yang lain, pemerintah terus meningkatkan upaya untuk melanjut dan makin memperhebat operasi memberantas ancaman

⁷⁸Keterangan lebih lanjut, rujuk *Laporan Kegiatan Subversif di Malaya, Bulan Oktober 1957, Bagian II*, dalam Fail Setiausaha Pahang A/9 (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia)

⁷⁹*Ibid.*

dan kegiatan komunis dalam segala bentuk kegiatannya di Malaya. Sampai menjelang tahun 1960, pengaruh dan kekuatan PKM makin melemah, sehingga lebih banyak *kawasan putih* berhasil diwujudkan oleh pemerintah. Kondisi sosial, politik, dan perekonomian Malaya yang makin membaik untuk beberapa waktu pasca Pemilu 1955, ditambah oleh kenyataan makin berkurangnya ancaman, tindak kekerasan, dan kekacauan umum yang ditimbulkan oleh kelompok gerilya Komunis, akhirnya mendorong dan mempengaruhi pemerintah untuk menamatkan Undang-Undang Darurat di Malaya yang secara resmi dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Juli 1960.

BAB V

TINJAUAN AKHIR

Berdasarkan gambaran tentang gerakan komunis di Malaya yang telah diutarakan dalam pokok-pokok bahasan terdahulu secara umum, tampak bahwa pengaruh ekstern banyak berpengaruh terhadap perumusan taktik dan strategi yang diterapkan PKM untuk mengembangkan pengaruh dan kekuatannya dalam rangka memenangkan revolusi untuk membentuk sebuah republik komunis di Malaya, terutama antara tahun 1948-1960.

PKM dalam beberapa hal nampaknya berada pada posisi terikat yang mengharuskan ia untuk mendengarkan instruksi-instruksi yang dibuat oleh Comintern, khususnya tentang kebersamaan dan kekompakan mereka ketika mengumumkan ketetapan dan kebijakan revolusi bersenjata. Sedangkan strategi dan taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Moa Tze Tung dalam revolusi di Cina, tetap dipinjam sebagai kerangka acuan untuk menyusun taktik dan strategi perjuangan mereka. Meskipun demikian, penerapan taktik dan strategi yang diatur PKM seringkali mengalami perubahan dengan pola yang beragam dan senantiasa dimodifikasi dan direvisi, agar selaras dan sesuai dengan situasi dan kondisi semasa di Malaya.

Secara umum, strategi dan taktik yang diterapkan oleh PKM banyak diwarnai oleh penyusupan masuk secara rahasia ke dalam organisasi-organisasi massa, terutama organisasi buruh dan pemuda yang berstatus legal. Dengan taktik ini, komunis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengaruh dan kekuatan sambil menekan mereka sehingga secara tidak langsung dan tanpa disadari massa tersebut harus tunduk dan mengakui kekua-

saan serta kekuatan PKM. PKM pada gilirannya memperoleh kesempatan untuk menguasai pucuk pimpinan organisasi-organisasi massa. Dengan demikian, organisasi tersebut pada akhirnya hanya memiliki kekuatan yang bersifat semu semata, karena kekuasaan sebenar berada di tangan tokoh-tokoh PKM itu sendiri.

Penerapan strategi dan taktik Barisan Bersatu, memberi peluang kepada PKM untuk mensponsori sejumlah aksi revolusioner yang ditandai dengan terjadinya revolusi bersenjata. Untuk itu, aksi-aksi pemogokan buruh, gerakan-gerakan protes yang dalam kondisi tertentu mengarah pada tindak kekerasan dan kekejaman, menyerang pekerja-pekerja yang enggan bekerjasama, menghancurkan sarana komunikasi dan transportasi, dan beberapa tindakan lain dengan merusak dan menghancurkan perkebunan-perkebunan karet dan pertambangan timah yang bertujuan menimbulkan kekacauan ekonomi. Serangkaian serangan yang dilancarkan oleh PKM ini dikenal sebagai 'perang untuk memperoleh material', yaitu dengan cara mengoperasikan dan mengandalkan kekuatan gerilya dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya banyak korban berjatuh. Berbagai tindak kekerasan, kekejaman dan kekacauan yang dilakukan oleh komplotan gerilya PKM itu mendorong Inggris untuk memberlakukan Undang-Undang Darurat di Malaya pada pertengahan tahun 1948.

Dalam upaya memenangkan revolusi di Malaya, dukungan massa dan kekuatan gerilya merupakan alat terpenting dalam perjuangan PKM. Oleh itu, mereka perlu dimanfaatkan sebaik mungkin bukan saja sebagai potensi yang dapat menyediakan kekuatan militer, tetapi juga sebagai agen suplai bagi pemenuhan kebutuhan pangan, obat-obatan, dan informasi-informasi yang berharga terutama menyangkut perkembangan tindakan dan kebijakan

pemerintah. Untuk tujuan itu, PKM telah membentuk suatu jaringan khusus yang dikenal sebagai kelompok "Min Yuen". Kelompok ini berperanan penting dalam perjuangan PKM, terutama pada tahap-tahap awal revolusi. Dukungan kekuatan itu memungkinkan PKM dapat melakukan serangan yang efektif dengan menerapkan 'taktik yang relatif', yaitu bagaimana bertindak dan melakukan serangan secara cepat dan menepati sasaran.

Meskipun demikian, strategi dan taktik yang diterapkan oleh PKM tidak sepenuhnya berhasil seperti yang direncanakan, walaupun upaya-upaya untuk pembaharuan dan perbaikan telah dilakukan sedemikian rupa. Dalam kondisi yang mulai melemah, PKM sampai pada suatu titik yang mengharuskan ia melakukan perubahan taktik dan strategi secara total. Untuk itu diperkenalkan kebijakan *Red Front*, yaitu meninggalkan semua aksi revolusioner dan tindak kekerasan lain. Sebaliknya menerapkan taktik dan strategi yang sedikit lunak guna mendapatkan dukungan untuk menghimpun kekuatan massa. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan itu, PKM juga mencoba mengambil siasat melalui upaya rundingan damai guna mengkonsolidasi kekuatan dan menyusun taktik dan strategi perjuangan yang lebih mantap. Meskipun demikian, PKM tetap gagal untuk memperbaiki kedudukan dan kekuatannya, sehingga harus tunduk kepada kekuatan pemerintah.

Di lain pihak, pemerintah tidak tinggal diam untuk mengantisipasi gerakan komunis yang kian memuncak terutama antara tahun 1948-1960. Dalam beberapa hal, pemerintah tampaknya mengambil banyak pelajaran dari serangkaian aksi dan tindak kekerasan yang dilakukan gerilya Komunis. Pengumuman Undang-Undang Darurat merupakan langkah pertama yang diambil untuk mengantisipasi gerakan komunis. Dalam kaitan itu, Inggris mengupayakan beberapa langkah dan kebijakan yang diselaraskan dengan taktik dan

strategi PKM. Dengan Undang-Undang Darurat, keberadaan PKM yang sebelumnya merupakan salah sebuah organisasi legal, secara otomatis dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sehubungan dengan itu, operasi memberantas kegiatan komunis mulai dilanjutkan dan diperhebat dengan beberapa kebijakan lain baik yang bersifat ofensif maupun yang bersifat defensif.

Untuk menunjang perberlakuan Undang-Undang Darurat, kekuatan militer diperkuat dan diperbesar melalui penambahan personel dan penambahan beberapa kesatuan angkatan bersenjata yang dilengkapi dengan berbagai keterampilan, peralatan dan persenjataan modern, pembentukan beberapa korps keamanan dan sukarela, dan pengiriman bantuan militer dari negara-negara Commonwealth, serta dilakukan upaya reorganisasi dalam jajaran kepolisian. Selain memperkenalkan sistem pendaftaran penduduk melalui sistem *Identity Card* untuk memudahkan upaya-upaya pengawasan dan memberantas kegiatan komunis.

Operasi pemberantasan komunis makin diperhebat oleh pemerintah melalui program *Rencana Briggs*. Beberapa hal pokok yang tercantum melalui kebijakan ini adalah program pemindahan penduduk sipil (khususnya masyarakat Cina) yang tinggal di daerah pinggiran hutan yang rawan dari ancaman komunis ke daerah-daerah pemukiman baru. Selain untuk memudahkan pengawasan, hal itu bertujuan menghindari kelompok ini memberikan bantuan kepada kelompok Min Yuen. Kebijakan lain adalah pembentukan unit *Pengawal Kampung (Home Guards)* yang merupakan unit sukarela, sebagai upaya mewujudkan kerjasama dan partisipasi rakyat menciptakan keamanan dan ketertiban umum.

Kebijakan-kebijakan lain adalah melalui pencanangan "Perang Psikologi". Kebijakan ini memberikan pukulan yang cukup hebat sehingga ber-

hasil melumpuhkan kegiatan dan perjuangan komunis di Malaya. Kebijakan yang diambil dengan pengumuman "kawasan hitam" dan "kawasan putih", di samping beberapa langkah lainnya seperti menawarkan pengampunan massal, imbalan hadiah yang menarik untuk mereka yang bersedia memberikan informasi tentang kegiatan komunis, kelonggaran untuk memperoleh hak kewarganegaraan, dan membuka kesempatan yang lebih luas kepada gerilya-gerilya PKM yang menyerah untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan kegiatan politik, secara tidak langsung memberikan pukulan terhadap kekuatan dan perjuangan PKM, sehingga posisinya makin terjepit dan mulai melemah karena banyak dari anggota-anggota gerilya yang menyerah kepada pemerintah.

Langkah lain yang diambil adalah melaksanakan kegiatan Pemilu pada tahun 1955. Kebijakan ini secara tidak langsung telah memberikan pengaruh yang cukup penting terhadap taktik dan strategi PKM dalam mencapai tujuan dan cita-cita politiknya. Kemenangan mayoritas Partai Perikatan pada satu sisi dan kekalahan total kelompok Barisan Bersatu PKM dalam Pemilu 1955 pada sisi yang lain, ternyata memberikan pengaruh dan pukulan yang cukup hebat terhadap perjuangan dan kekuatan PKM. Pemilu 1955 merupakan langkah awal untuk kehidupan politik demokrasi dan pembentukan pemerintahan sendiri. Hal yang demikian itu menyebabkan posisi dan kekuatan PKM makin terdesak. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu, di samping beberapa kebijakan pemerintah yang lebih tegas untuk menghancurkan komunis antara tahun 1948-1960, semakin menampakkan hasil setelah Malaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Beberapa waktu setelah itu, kekuatan dan pengaruh PKM dalam masyarakat makin melemah dengan kondisinya semakin terdesak.

Hasil studi ini jelas memperlihatkan bahwa taktik dan strategi PKM untuk memperkuat kedudukan dan menanamkan pengaruhnya dalam masyarakat seringkali disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Malaya ketika itu. Selain disesuaikan pula dengan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghancurkan gerakan komunis. Demikian pula pemerintah di pihak yang lain, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi gerakan komunis, seringkali didasarkan pada perkembangan kekuatan komunis dan senantiasa diselaras dan disesuaikan dengan pola perubahan yang terjadi dalam strategi dan taktik serta siasat yang dirangka oleh PKM.

Dengan demikian tampak bahwa antara kebijakan pemerintah dengan taktik dan strategi PKM saling mempengaruhi dan berhubungan erat. Keduanya saling mengisi dan melengkapi antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, perubahan dalam taktik dan strategi komunis akan diikuti pula oleh perubahan dalam kebijakan-kebijakan dan upaya pemerintah untuk menghancurkan komunis. Demikian sebaliknya, perubahan dalam kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah akan berakibat perubahan dalam taktik dan strategi yang akan disusun dan diterapkan oleh pihak komunis. Kedua pihak, pemerintah di satu pihak dan komunis pada pihak yang lain, saling mengatur taktik dan strategi serta siasat yang tepat dan mantap dalam mencapai tujuan dan sasarnya masing-masing.

Meskipun demikian, sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan PKM antara tahun 1948-1960 menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang tidak sedikit, untuk mencapai tujuan dan cita-cita politiknya membentuk sebuah "Republik Malaya" yang bercorak komunis. Hal itu bukan saja di-

sebabkan oleh makin gencarnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menghancurkan komunis, tetapi juga disebabkan sarana dan prasarana yang kurang menunjang, selain disebabkan oleh masalah-masalah intern yang dihadapi oleh PKM ketika itu.

Kegagalan taktik diplomasi PKM melalui upaya perundingan damai dengan pemerintah dan kegagalannya memenangkan Pemilu 1955, menyebabkan pengaruh dan kekuatannya mulai melemah. Pengaruh dan kekuatan PKM yang mulai melemah pasca Pemilu 1955 pada satu sisi, dan makin membaiknya kondisi kehidupan sosial, politik dan perekonomian Malaya pada sisi yang lain, merupakan sejumlah faktor penting yang mendorong pemerintah membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Darurat yang secara resmi dinyatakan berakhir pada tanggal 31 Juli 1960.

Pembatalan Undang-Undang Darurat pada tahun 1960, memberikan petunjuk awal bahwa PKM pada kenyataannya sedang menuju kehancuran. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor penting, seperti kelemahan-kelemahan strategi dan taktik, peralatan dan persenjataan yang kurang memadai, dan jumlah keanggotaan serta dukungan massa yang makin berkurang. Dalam kondisi yang mulai melemah, PKM akhirnya mengambil ketetapan untuk terus melanjutkan perjuangan secara bergerilya di daerah-daerah hutan, demi mencapai tujuan dan cita-cita politik di Malaya suatu hari nanti. Kapan cita-cita itu akan terrealisasi dan dalam bentuk yang bagaimana merupakan persoalan pokok yang secara prinsip merupakan suatu pertanyaan besar yang masih belum terjawab. Dengan demikian kewaspadaan nasional terhadap bahaya laten komunis masih perlu ditingkatkan agar peristiwa hitam ini tidak terulang, proses pembangunan seperti yang diraih oleh bangsa hari ini, dapat dilanjutkan dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Arsip dan Penerbitan Resmi

Arkib Negara Malaysia, *Hari Ini Dalam Sejarah*. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 1980.

_____. *Hari Ini Dalam Sejarah (Vol. III)*. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 1983.

Dr. Mahathir Mohamad. *Wawasan 2020: The Malaysia Way Forward*. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri, 1991.

Departement of Information, Federation of Malaya. *Communist Terrorism in Malaya: The Emergency 1948 June 1952*.

Federation of Malaya, *Emergency Regulations Ordinance 1948* (No.10,1948)

Federation of Malaya, *Emergency Relugalation 1948* (G.N No.1953, July 15, 1948), No. 12, Vol.I

Federation of Malaya. *Progress Report on the Development Plans of The Federation of The Malaya 1950-1952*.

Federation of Malaya Annual Report 1956 (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia)

Federation of Malaya. *Communist Banditry in Malaya: The Emergency June 1948-June 1952*. Kuala Lumpur: Departement of Information, 1956.

Federation of Malaya: 1957 Population Cencus Report.

Federation of Malaya. *The Communist Threat To The Independent Federation of Malaya*. Kuala Lumpur: Government Press, 1959.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia, *Kertas Perintah No 14/1988*, Laporan Sidang Dewan Rakyat/Dewan Negara, 14 March 1988.

Laporan Kegiatan Subversif di Malaya, Bulan Oktober 1957, Bahagian II, dalam Fail Setiausaha Pahang, A/9 (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia)

Laporan Tahunan Pejabat Buruh 1955 (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 1955)

Lu Cheng. *Report on The Trade Union Movement in Malaya: World Trade Union Movement*, Dec. 1949 (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia)

Malayan Union Secretariat File, 162/D/1946

Monthly Statistical Bulletin of West Malaysia July 1970 (Kuala Lumpur: Departement of Statistic, 1970)

Surat Kabar

Berita Harian, Tanggal 03 Desember 1989

Malay Tribune, 14 February 1946, 05 June 1948

Straits Times, 18-19 January 1946, 29 May 1948

Sunday Times, 31 July 1960

Buku-Buku

Abdul Kadir, Kamaruzzaman. *Nasionalisme Dalam Puisi Melayu Moden 1933-1957*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982.

Abdul Samad Idris, Tan Sri Datuk. *25 Tahun Merdeka*. Kuala Lumpur: Pustaka Budiman, 1982.

Ali, S Hussin. *Rakyat Melayu: Nasib dan Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Inti Sarana, 1985.

Anthony, Short. *The Communist Insurrection in Malaya 1948-1960*. London: Frederick Muller Ltd., 1975.

Asaratnam, S. *India in Malaysia and Singapore*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1970.

Cheah Boon Kheng. *Komrad Bertopeng: Suatu Kajian Mengenai Barisan Bersatu Komunis di Tanah Melayu 1945 - 1948*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982.

_____. *Red Star Over Malaya*. Singapore: Singapore University Press, 1983.

Cheah Boon Kheng, Abu Talib Ahmad, eds.. *Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain*. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1990.

Chew Hock Thye. *Masalah Perpaduan Nasional*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974.

Clutterbuck, R. *Riot and Revolution in Singapore and Malaya 1945-1963*. London: Faber & Faber Co., Ltd., 1963.

- _____. *The Long-Long War: The Emergency in Malaya 1948-1960*. London: Cassel & Co., Ltd., 1966.
- Eisenstard, S. N. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit C.V. Rajawali, 1986.
- Emerson, R. *Malaysia: Suatu Pengkajian Pemerintahan Secara Langsung dan Tidak Langsung*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosiologi Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkhiem dan Max Weber*. Jakarta: University of Indonesia Press, 1986.
- Gullick, J. M. *Indegeneous Political System of Western Malaya*. London: University of London Press, 1965.
- _____. *Malaysia*. New York: Praeger Publisher, 1969.
- Gwee Hock Aun. *The Emergency in Malaya 1948-1960*. Penang: Sinaran Brothers Ltd., 1966.
- Harrahan, Gene. Z. *The Communist Struggle in Malaya*. Kuala Lumpur: Univ. of Malaya Press, 1971.
- Hart, Michael. H. *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Iskandar, Teuku. *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 1986.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Khoo Kay Kim. "Suasana Politik Tanah Melayu Perang Dunia II", *Malaysia: Sejarah Proses Pembangunan*, eds., Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1982.
- Khong Kim Hoong. *Merdeka: British Rule and The Struggle For Independence in Malaya 1945-1957*. Petaling Jaya: Institute for Social Analysis (INSAN), 1984.
- Leong Yee Fong. "Permulaan Kesedaran Buruh Cina di Tanah Melayu", *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan*, eds., Khoo Kay Kim. Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1982.
- _____. "Perkembangan Kesatuan Pekerja dan Dasar Kolonial di Malaya", *Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain*, eds., Cheah Boon Kheng, Abu Talib Ahmad. Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1990.
- Lim Chong Yah. *Economic Development of Modern Malaysia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967.

- Mahmood, Ibrahim. *Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu (Suatu Penyingkapan Kembali Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu Menuju Kemerdekaan)*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981.
- Malhi, Ranjit Singh. *Sejarah Kertas 2 STPM*. Kuala Lumpur: Federal Publication, 1989.
- Mamat, Osman. *Darurat di Terengganu 1948-1960*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981.
- Mohd Sarim Mustajab. "Gerakan Islah Islamiyah di Tanah Melayu 1906-1948", *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan*, eds., Knoo Kay Kim. Kuala Lumpur: Malaysian Historical Society, 1982.
- Miller, Harry. *The Communist Menace in Malaya*. London: George H. Harrap & Co., 1954.
- O' Ballance, Edgar. *The Communist Insurgent War 1948-1960*. London: Faber & Faber Co., Ltd., 1966.
- Ooi Jin Bee. *Land, People and Economy in Malaya*. London: Longman, 1967.
- Purcell, Victor. *The Chinese in Malaya*. London: Oxford University Press, 1948.
- Ratnam, K.J. *Paham Perkauman dan Proses Politik di Malaya*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969.
- Roff, William. *The Origin of Malay Nationalism*. London: Oxford University Press, 1967.
- Rosdi, Maswari. *Sejarah Malaysia Modern*. Kuala Lumpur: Pustaka Sri Murni, 1990.
- Ryan, N. J. *The Making of Modern Malaya*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1963.
- Sargent, Lyman Tower. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Suatu Analisis Komparatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987.
- Simandjuntak., B. *Federalisme Tanah Melayu 1945-1963*. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1985.
- Smith, Anthony. D. *The Concept of Social Change: A Critique of The Functionalist Theory of Social Change*. London: Routhledge & Kegan Paul, 1971.
- Stenson, M. R. *Industrial Conflict in Malaya: Prelude to The Communist Revolt 1948*. London: Oxford University Press, 1970.

Tan Ding Eing. *Sejarah Malaysia dan Singapura*. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1986.

Tey Tiong Lim. "Sejarah Penglibatan Politik Orang-Orang Cina di Tanah Melayu 1930-1945", Thesis B.A (Hons), Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986.

Tregonning, K. G. *A History of Modern Malaya*. New York: David McKay & Co., 1964.

_____. *A History of Modern Malaya and Singapore*. Kuala Lumpur: Far Eastern University Press, 1974.

Wahid, Zainal Abidin, eds. *Sejarah Malaysia Sa-Pintas Lalu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1971.

Artikel-Artikel dan Majalah

- C.C. Too. "PKM dan Percubaan Untuk Merampas Kuasa", dalam *Dewan Masyarakat* (Vol.5, Mei 1991), hal. 27-30
- C. C. Too. "Terjanjian Damai Haadnyai: Hanya Jerangkap Samar PKM", dalam *Dewan Masyarakat*, (Vol.9, September 1991), hal. 28-30
- Fatini Yaacob. "Muslihat PKM Dengan Orang Melayu", dalam *Dewan Masyarakat*, (Vol.7, Julai 1991), hal. 28-30
- J. Ee. "Chinese Immigration to Malaya 1896 - 1941", *Journal of Southeast Asian History*, (Vol.2, No. 1, March 1961).
- Khoo Kay Kim. "Keterlibatan Orang-Orang Melayu Dalam Persatuan-Persatuan Sulit", *Jernal Sejarah* Universiti Malaya Kuala Lumpur, (Vol.14, 1975/1976), hal. 67-68
- P'ng Poh Seng. "The Koamintang in Malaya", *Journal of Southeast Asian History*, (Vol. 2, NO. 1, March 1961)
- Raden Soenarno. "Malay Nationalism 1900-1941", *Journal of Southeast Asian History*, (No. 2, No. 1, 1960), hal. 8-17
- Rhoderick Dhu Dhenick. "The Emergency Regulations of Malaya: Cause and Effect", *Journal of Southeast Asian History*, (Vol.6, No.2, September 1965), hal. 18-19
- Yoji Akashi. "Japanese Policy Towards The Malayan Chinese in Malaya 1941-1945", *Journal of Southeast Asian Studies* (Vol.1, No.2, September 1970), hal. 61-89

LAMPIRAN 1BEBERAPA HAL POKOK YANG TERCANTUM DALAM
"THE EMERGENCY REGULATIONS 1948"

1. Pemerintah berwenang menahan dan menangkap siapa saja yang dicurigai (lama waktu penahanan minimal setahun) tanpa melalui proses pengadilan.
2. Mengontrol kawasan-kawasan tertentu yang dianggap rawan.
3. Membentuk dan memperkuat pasukan pertahanan dan keamanan yang secara khusus ditugaskan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum.
4. Pemerintah berwenang untuk mengambil alih hak milik bangunan dan kendaraan.
5. Mengontrol sepenuhnya sistem jaringan telekomunikasi dan transportasi
6. Memperkuat pengawasan, pengintipan dan penilaian terhadap tahanan-tahanan politik tanpa waran.
7. Melarang pertemuan-pertemuan, rapat-rapat umum, dan membubarkan organisasi-organisasi dan partai-partai politik.
8. Memberlakukan jam malam di daerah-daerah tertentu yang dianggap perlu
9. Hukuman keras kepada sesiapa yang memiliki senjata api tanpa izin.

Sumber: Dikutip dan diolah dari *The Emergency Regulations 1948* (G.N. No. 1953, July 15, 1948), No.12, Vol.1 (Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur), dan dari Federation of Malaya, *The Communist Banditry in Malaya: The Emergency* (Kuala Lumpur,

LAMPIRAN 2

CASUALTIES IN THE EMERGENCY 1948-60

	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	Total
GUERRILLAS ELIMINATED:														
Killed	374	619	648	1079	1155	959	723	420	307	240	153	21	13	6711
Captured	263	337	147	121	123	73	51	54	52	32	22	8	6	1289
Surrendered	56	251	147	201	257	372	211	249	134	209	502	86	29	2704
Total	693	1207	942	1401	1535	1404	985	723	493	481	677	115	48	10704
SECURITY FORCES ELIMINATED (i):														
Police	89	164	314	380	207	58	53	47	25	5	3	1	—	1346
Soldiers	60	65	79	124	56	34	34	32	22	6	7	—	—	519
Total	149	229	393	504	263	92	87	79	47	11	10	1	—	1865
RATIO OF ELIMINATIONS - GUERRILLAS/ SECURITY FORCES														
	4	5	2½	3	6	15	11	9	10	44	68	115	—	5·7
CIVILIANS KILLED AND MISSING:														
Killed	315	334	646	533	343	85	97	62	30	22	3	3	—	2473
Missing	90	160	106	135	131	43	57	57	26	2	—	3	—	310
Total	405	494	752	668	474	128	154	119	56	24	3	6	—	3283
TOTAL POLICE, SOLDIERS AND CIVILIANS KILLED AND MISSING														
	554	723	1145	1172	737	220	241	198	103	35	13	7	—	5148
WOUNDED (ii):														
Police	119	170	321	454	278	53	89	60	32	11	6	8	—	1601
Soldiers	92	77	175	237	123	64	65	43	47	22	13	1	—	959
Civilians	149	200	409	356	158	15	31	24	36	7	—	—	—	1385
Total	360	447	905	1047	559	132	185	127	115	40	19	9	—	3945

Notes (1) No police or soldiers are listed as 'captured' or 'missing'. Any who were were assumed killed.

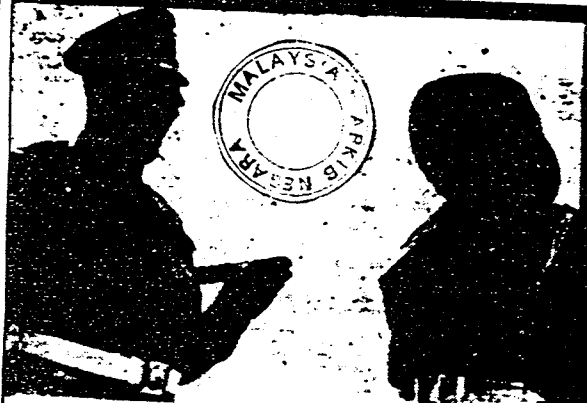
(2) Estimates of guerrillas wounded are not shown as they are unreliable. The total recorded was 2,819.

Sumber: R. Clutterbuck, *Riot and Revolution in Singapore and Malaya 1945-1963* (London: Faber & Faber Ltd., 1973), hal. 188-189

"BRIGGS BERSEDIA UNTUK BERPERANG"
SUNDAY TIMES, 07 MEI 1950

BRIGGS READY FOR BATTLE

Control over remote areas



THIS is not a fighting match. It is a momentary encounter between the Military Academy's Sandhurst graduate, Lt. Wain, and a member of the Malay Regiment, Lt. Wain, at the same camp in one of the Malay States.

Sunday Times Staff Reporter
KUALA LUMPUR, Saturday.
THE Director of Anti-Bandit Operations, Lieut-Gen. Sir Harold Briggs, has set in motion a long-term plan for bringing closer the end of the Emergency. One of its most important provisions will bring under active administration many areas which have never before experienced it.

The plan is believed to call for a large expansion in the Police Force as well as a considerable increase of administrators of the District Officer level.

Officers Commanding Police Districts and District Officers will be sent out side by side to every populated area in the country. The Federation, State and Settlement Governments are finding the men required.

Gen. Briggs, it is believed, has laid down the tasks of the Police, the Army and the Civil Government. The Army will do the fighting. The Police and Government together will bring consolidation and security.

The re-settling of squatters will proceed since as soon as plans have been completed by each State or Settlement Government.

All the activity aims at limiting the bandits where it will best maintain their help. It may also eradicate the fear of bandits by people in present remote areas.

The presence of Police and Government officers will help to bring people with information about bandits to the security forces.

Eventually all this may force the bandits to emerge from their jungle haunts. If this happens the fight will be taken to them.

Surrendered and captured bandits have again spoken of the harassing tactics of the security forces had had on them.

Attacks from the air and also ground operations have kept them moving constantly.

In Kelantan, for instance, the five men who surrendered after the security forces' attack on the battle of the main trunk road three miles north of Kelantan on Sunday, said they had been forced from their jungle hideouts by continuous air and ground operations.

They had never settled for more than three or four days before they were on the move again.

Also significant is the fact that bandits do not appear to be any more building big camps.

They only have time to put up makeshift shelters, or to take steps of death, immediately with latex, over branches of trees to provide shelter.

Bandits' haunts also carry rubber macaotops of the kind used in rubber cuts

'Raise volunteer jungle force' call

Sunday Times Special Correspondent
FEDERATION of Malaya authorities have asked the British Government to consider urgently the possibility of raising a volunteer special force for action in Malaya, the Sunday Times understands. The men wanted are those with wartime experience of jungle fighting. It is proposed that they should be offered attractive pay and conditions for a short term service, probably a year.

CAPT. HUSSEIN IS NEW UMNO SECRETARY

Sunday Times Staff Correspondent
KUALA LUMPUR, Sat.
DATO KHALID ALKHALID, Deputy Chief Rural Welfare Officer for the Federation, has resigned from the office of Secretary-General of UMNO. His successor is Capt. Hussein bin Omar, chief of the Data Onn bin Ja'afar office of the localisation. An UMNO spokesman said that Datu Khalid resigned because he had to leave for the United Kingdom shortly for a special course of training in rural welfare work. He will be away about a year. Owing to pressure of work in the office, the Assistant State Secretary, has also resigned from his post as Assistant Secretary to UMNO. His duties have been taken over by Datu Orang Kaya Mergat Yusoff.

Malay star falls on kris in belt

Sunday Times Staff Reporter
THE Malay star Osman Osman was seriously wounded during the making of a new Shear Shear. His forehead was hit and a bone was seen waving from his chest. He is in the General Hospital. The accident happened about three o'clock in the morning. Osman was taking a nap in "Dewan Muzium" calling his forehead and Malay costume and a bone in his forehead. The Sunday Times was told last night that it was too early to say whether the accident will affect production. The picture is almost completed.

Representatives of planting, mining and other commercial interests are expected to urge the formation of a "special" force of this type when they meet the Secretary of State for the Colonies and the War Minister at the end of this month. The strength of the special force should, it is estimated, be about one thousand men—a target regarded as reasonable if a vigorous recruiting campaign is carried out in the United Kingdom. They point out that there must be thousands of veterans of the Burma Campaign still young, able-bodied and eager for adventure. The Director of Operations, Sir Harold Briggs—himself a Burma veteran—is believed to strongly favour the raising of a special force.

Decision Awaited

Progress in the raising of a volunteer force to fight in Malaya has also been made in Australia but no definite news is likely to be taken until final decisions on Australian aid to Malaya have been taken. Australian sources have suggested that if Australia is to send troops to Malaya some form of National Service is bound to be introduced there. But they must be used only by regular troops sent to Malaya. Recent Press reports in Britain have suggested that if a special force was raised and Australian aid were forthcoming the number of troops in Malaya might be substantially reduced.

SMILING broadly, the 21-year-old, a Singaporean, who was captured by the Malays on the Cape after the battle in Singapore, which was concluded in February—Sunday Times picture.

FAMOUS **DECCA** OVERTURES.

DAWN SEARCH

JULY 8 IS VARSITY DAY

LAMPIRAN 5

**TAKTIK PENYELUNDUPAN DOKUMEN-DOKUMEN KOMUNIS
SELAMA PERIODE DARURAT DI MALAYA 1950**

DATO KRAMAT REPORT No. 469/50

PHOTOGRAPH OF THE PINEAPPLE

TAKEN IN 3 DIFFERENT POSITIONS

STATION: DATO KRAMAT POLICE STATION, PENANG.
REPORT NO. 469/50. DATE: 10 TH MARCH, 1950.

P R É C I S

DURING THE EVENING OF THE 10 MAR 50 AN INFORMER OF DETECTIVE 672 OBSERVED AN ELDERLY CHINESE LEAVE A COFFEE-SHOP NEAR THE MAGAZINE CIRCUS.

2. THE INFORMER SUSPECTING THE CHINESE TO BE A STRANGER TO PENANG IMMEDIATELY INFORMED DETECTIVE 672 WHO TRAILED THE SUSPECT ALONG DATO KRAMAT ROAD TO SIAM ROAD WHERE HE WAS STOPPED BY DETECTIVE 672. THIS DETECTIVE SEARCHED THE SUSPECT AND IN A RATTAN BASKET CARRIED BY THE LATTER, CLOTHING AND TWO PINEAPPLES WERE FOUND.

3. CAREFUL EXAMINATION OF THE TWO PINEAPPLES BY DETECTIVE 672 REVEALED THAT ONE OF THEM HAD BEEN CUT IN HALF AND CAREFULLY JOINED TOGETHER AGAIN BY MEANS OF STICKS, INSERTED IN THE TWO HALVES OF THE FRUIT.

4. ON OPENING THIS PINEAPPLE THE DETECTIVE FOUND IT TO BE HOLLOWED AND TO CONTAIN A NUMBER OF PACKETS OF COMMUNIST DOCUMENTS.

5. DETECTIVE 672 PROMPTLY PLACED THE SUSPECT, LENG CHOY (L 23) UNDER ARREST AND TOOK HIM TO HEADQUARTERS COUNTRY DIVISION FOR INVESTIGATION BY THE C.I.O.

6. EXAMINATION OF THE DOCUMENTS HIDDEN IN THE PINEAPPLE REVEALED SECRET INFORMATION OF AN OPERATIONAL AND POLITICAL NATURE REGARDING TO M.C.P. ACTIVITIES IN NORTH PERAK, SOUTH KEDAH AND THE SETTLEMENT OF PENANG.

7. THOUGH IT IS CLEAR THAT LENG CHOY HAD ACTED AS A BANDIT COURIER, IT WAS FOUND, FOLLOWING CONSULTATION WITH THE D. R. A. PENANG, THAT THERE WAS NO CASE TO PROSECUTE. HE HAS THEREFORE BEEN DETAINED UNDER THE EMERGENCY REGULATIONS.

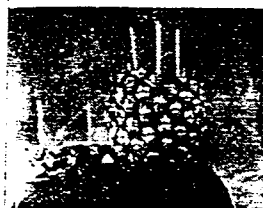
POSITION 1

THIS POSITION SHOWS THE PINEAPPLE AS IT APPEARED IN THE RATTAN BASKET BEFORE EXAMINATION BY DETECTIVE 672.



POSITION 2

THIS POSITION SHOWS THE SAME PINEAPPLE ALREADY CUT INTO TWO WITH STICKS PIERCED INTO THE TWO PARTS TO ENABLE THE TWO PARTS TO BE ASSEMBLED BACK TO RESEMBLE A GENUINE PINEAPPLE.



POSITION 3

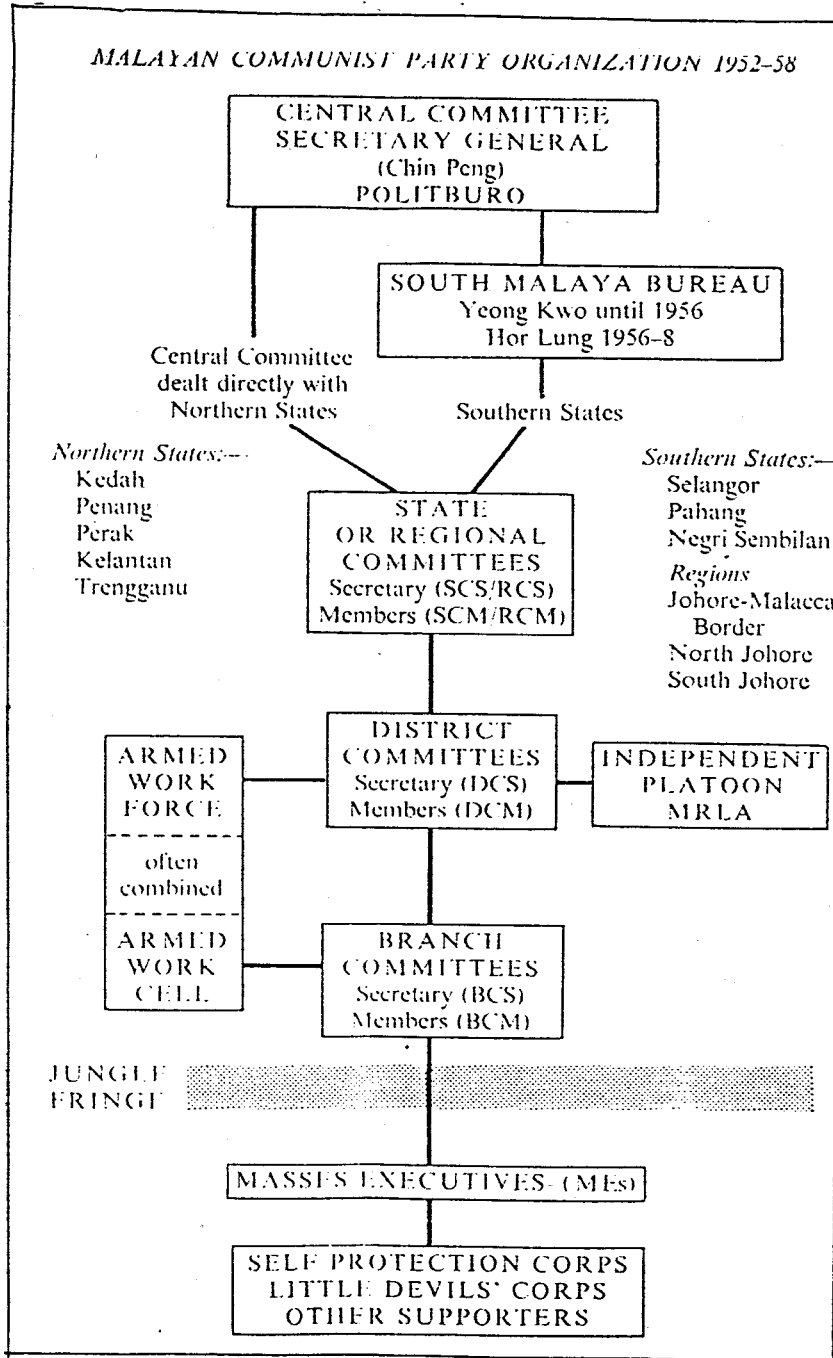
THIS POSITION SHOWS THE SAME PINEAPPLE MADE HOLLOW INSIDE TO CONCEAL THE DOCUMENTS.



Gambar di atas menunjukkan cara yang digunakan oleh komunis untuk menyelundup dokumen-dokumen berharga Partai Komunis Malaya. Taktik itu dapat dikesan dengan tertangkapnya seorang agen komunis di Pulau Pinang. Dokumen-dokumen komunis yang dirampas mengandungi berbagai informasi tentang sejumlah kegiatan dan rencana-rencana PKM di Perak Utara, Kedah Selatan dan Pulau Pinang.

Sumber: Arkib Negara Malaysia, *Hari Ini Dalam Sejarah Vol. III* (Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia, 1983), hal. 101

LAMPIRAN 6



Sumber: R. Clutterbuck, *Riot and Revolution in Singapore and Malaya 1945-1963* (London: Faber & Faber Ltd., 1973), hal.196

LAMPIRAN 3

ککائسن کومپونیسہ دتانه ملايو

اوجاڻن ۲ سر هنري گرنهي کيه. سي. عيم. جي. فورمجاڻي نيگمي بغدادچاڻو
درفد اوجاڻن ۲ بع دلفظکن درفد يونن ائسوبر 1948 هفک بولن نوسبر 1949.

اوجاڻن بھدلفظکن ددالم استماده لتيفکن فد 6 ائسوبر 1948.

کواجيئن دان فکرجان يھفرتام باکي کراچان ايت اياله مرته سفاي
نکري امان، فندوق ۲ نکري مناروه کفرجان کفدان، کادان ددالم نکري تنف،
اورغرامي بيس منجانکن فکرجان هاري ۲ دان فرلمگان دان فکرجان
تديبران داف دجانکن دغن سفون. جاشله کيت ساله فهم اتس نجان ۲
کومپونيسہ ايت: ميرک هندق مرومکن اقتصاد نکري اين، مندورغکن کراچان
ممنجانکن واغ بھبوله دگوناکن باکي سکوله ۲ دان رومهاکيت ۲ کفد فوليس
دان لاسوکن ۲ کلامتن دانجوک هندق برکواس ددالم نکري ساکي قوم
فوليتق مسيع کيت برعزم بهوا کيت تيدق اکن ميريکن ميرک بھمراجيللا
مفانيم ساوا اورغرامي ايکوت سوک هاني مهاج. کيت اداله منتيکن ماس
مهاج اکن مھمھوسکن ميرک تائي بيراف لساکه لاکي اداله برکتوغ کفد
بتوان ۲ درفتر اورغرامي بع تامو اکن رهيا ۲ مريکيت دالم فد ايت ساي
سدر بهوا ميرک ۲ بھرجواغ دياريسن هداقن اداله منجانکن کواجيئن دغن
براني دان ددالم کادان بع سوسه دان ساي هارف فکرجان مريکيت اکن
سلي تيدق بيراف لام لاکي کيت اداله مھمھدفي بيراف بايق مشله ۲ بع
لامين تيلقي لھرکارا کامانن دان تترامن مندقله دسليکن دھولو.

* * * *

اوجاڻن بع دلفظکن ددالم مجلس مشواره اونداشن فد 18 نوسبر، 1948.

لھرکارا بھسر سکالي بولاکو بيراف بولن بھلالو اين اياله فرجوبان
کومپونيسہ غلرتي ملايا دان فوکھن ۲ هندق مرومکن اقتصاد نکري اين بع
سوده بھيل کوجر کاجير اوله سبب ففراغن ايت دان هندق مرومکن فنتديبران
کراچان نکري اين. اهلي ۲ بھرحدمت اکن منڊل فکھه ۲ بع داميل
اکي منجکھ فرجوبان ايت تالفي بارغکالي بھسور اکن سدر بهوا
فکرجان بھلمکن دان بھجوکن لھرکارا ۲ اقتصاد اداله ترسکت



Sebagian dari ucapan Komisaris Tinggi Sir Henry Gurney (Oktober–November 1949) yang banyak menyinggung masalah pentingnya menjaga keamanan dan kewaspadaan nasional terhadap bahaya Komunis, selain menyeru partisipasi rakyat untuk membantu pemerintah menghancurkan kekuatan komunis. Beliau turut menyinggung masalah pelaksanaan Undang–Undang Darurat, keberadaan serikat–serikat buruh yang dikuasai komunis serta peranan pers memovitasi massa untuk turut berpartisipasi dan membantu pemerintah memberantas komunis di Malaya.

Sumber: Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 7

DATA-DATA TENTANG PROGRAM "KAMPUNG BARU"
(RESETTLEMENT AND REGROUPMENT)

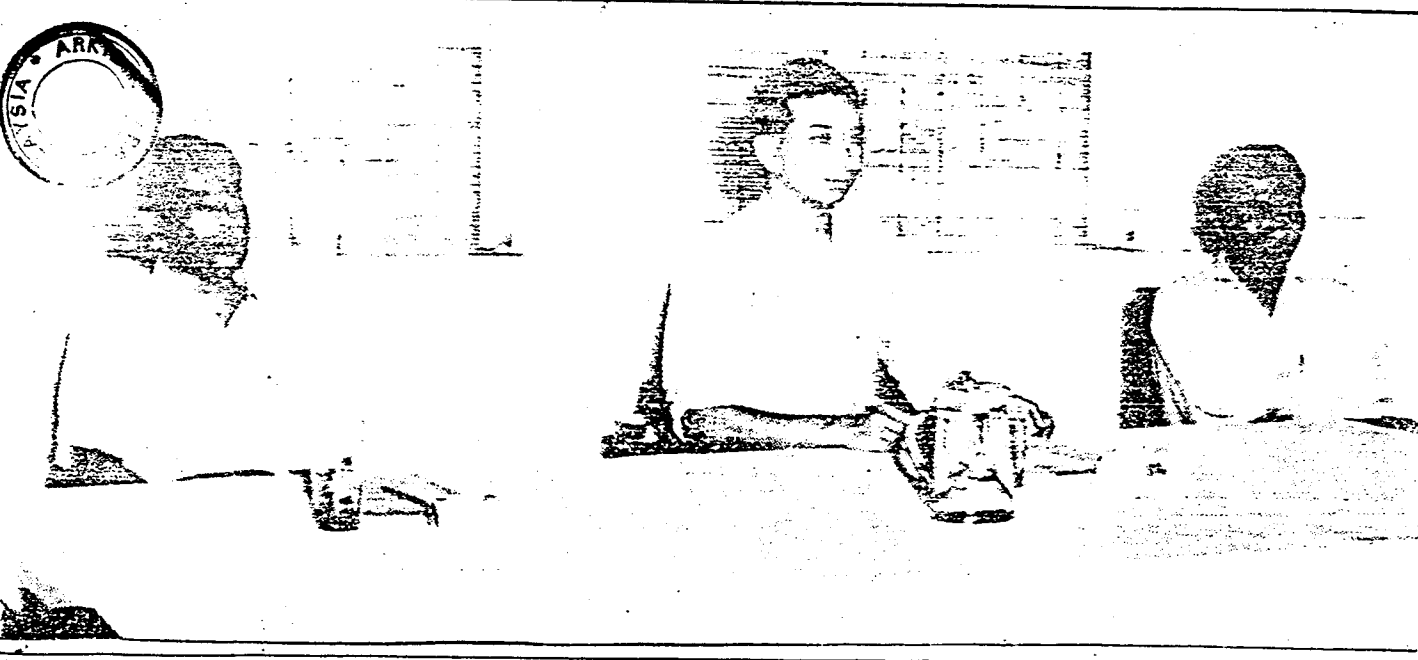
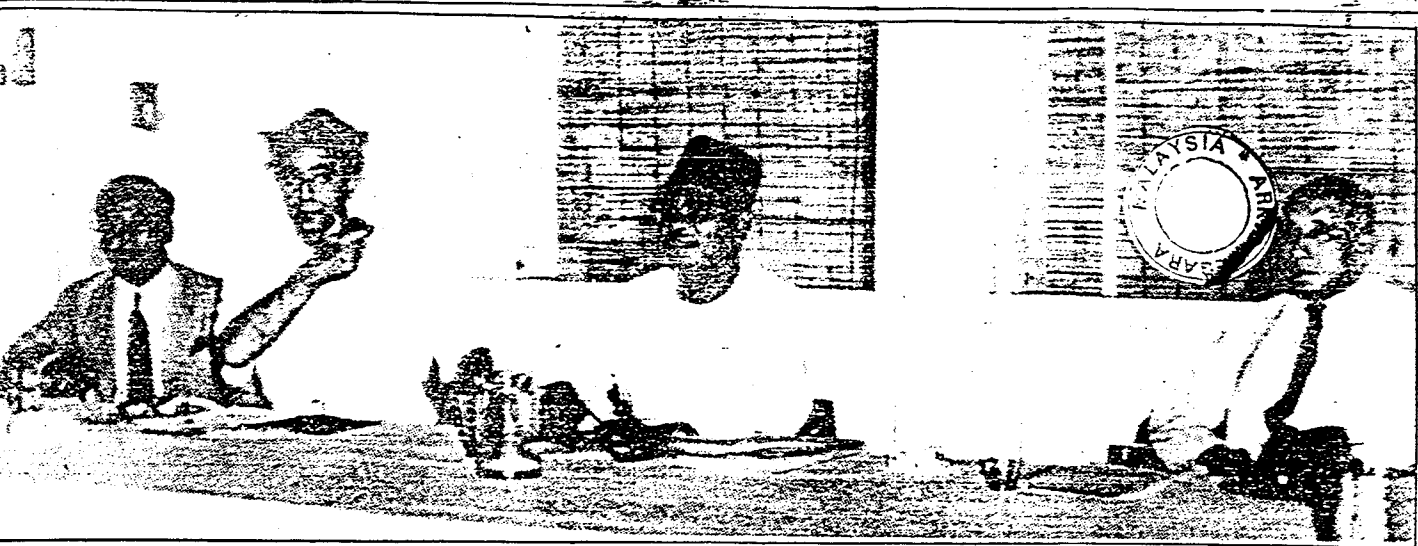
<i>RESETTLEMENT AND REGROUPMENT</i>					
<i>SIZE OF NEW VILLAGES</i>					
<i>Size (people)</i>	<i>Number of Villages</i>	<i>Total in these villages</i>	<i>Percentage of villages of this size</i>	<i>Percentage of people in these villages</i>	
Under 100	12	769	3	1	
100-500	169	51,874	35	9	
500-1,000	116	79,886	24	14	
1,000-5,000	169	340,710	35	59	
5,000-10,000	10	73,405	2	13	
Over 10,000	2	26,273	1	4	
Unknown	2	—	—	—	
Total	480	572,917 (say 573,000)	100	100	
 <i>PERCENTAGE BY RACE IN NEW VILLAGES</i>					
86% Chinese (493,000)	9% Malay (52,000)	4% Indian (23,000)	1% Others (5,000)		
 <i>DEGREE TO WHICH NEW VILLAGES WERE NEW</i>					
On new and isolated sites	32%				
'New Suburbs' (separate, but near towns)	16%				
Built around existing small villages	24%				
Unclassified	28%				
 <i>LABOUR REGROUPMENT 1951-3</i>					
	<i>Population</i>	<i>% Chinese</i>	<i>% Malay</i>	<i>% Indian</i>	<i>% Others</i>
Estates*	510,000	29.0	16.0	50.0	5.0
Mines	80,000	68.7	17.6	13.6	0.1
Others	60,000	71.8	14.0	14.0	0.2
Total	650,000	246,000	104,000	274,000	26,000
* Mainly Rubber, Pineapple and Oil Palm					

Sumber: R. Clutterbuck, *Riot and Revolution in Singapore and Malaya 1945-1963* (London: Faber & Faber Ltd., 1973), hal. 177

LAMPIRAN 8

SEBAGIAN DARI WAKIL PEMERINTAH DAN PKM YANG HADIR
DALAM RUNDINGAN BALING 1955.

Barisan atas dari kiri mewakili pemerintah, yaitu Mr. David Marshall (dua dari kiri), Tunku Abdul Rahman dan Tan Cheng Lock. Sementara PKM baris bawah dari kiri, Rasyid Maidin, Chin Peng dan Chen Tien.



Sumber: Foto-Foto Koleksi Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 9

DOKUMEN HASIL RUNDINGAN BALING 1955

A's ^{soon} as the ^{elect}
 Government of the Federation obtains complete
 control of internal security
 and legal armed forces
 we will end hostilities, lay
 down our arms and disband
 our forces. It does not amount
 to accept the present amnesty
 terms.



Ini merupakan sebagian dari dokumen yang disediakan oleh Ketua Menteri
 Singapura, Mr. David Marshall dan beberapa perubahan yang dibuat oleh
 Chin Tien, wakil pihak Komunis dalam Rundingan Baling 1955.

Sumber: Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 10

LAPORAN KETUA MENTERI PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
TENTANG RUNDINGAN BALING 1956REPORT BY THE CHIEF MINISTER OF THE
FEDERATION OF MALAYA ON THE BALING TALKS

BACKGROUND

At the beginning of June, 1955, a letter was received from the representative of the "Supreme Command Headquarters of the Malayan Racial Liberation Army", stating that the Malayan Communist Party was prepared to negotiate the ending of the Emergency and the restoration of peace in Malaya. On June 24th, 1955, the Federation Government, while reaffirming its desire for peace, rejected this offer to negotiate and stated that if the Communists genuinely wished to end the Emergency, then they should do it immediately by accepting the liberal terms of surrender which were well known to all. Both the letter and the government statement were issued to the press.

2. On September 8th, 1955, shortly after the Alliance Government came into power after the first Federal Elections, an amnesty offer was announced by the Chief Minister. The terms of this offer are attached at Appendix. Subsequently contact was made with a representative of Chin Peng, the Secretary-General of the Malayan Communist Party, so that a meeting could be held to discuss these terms. The Chief Minister made it clear that he did not propose to negotiate with Chin Peng and that he intended only to explain the amnesty terms and to consider any proposals regarding them which the M.C.P. might put forward.

THE MEETING

3. On this basis a meeting was arranged and took place at Baling on the 28th and 29th of December, 1955.

4. The Chief Minister of the Federation, Tunku Abdul Rahman, and the Chief Minister of Singapore, Mr. David Marshall, were accompanied by Dato' Sir Cheng-Lock Tan. On the Communist side were Chin Peng, Chea Tian and Abdul Rashid Mahiden.

5. The talks were held in four sessions—

28th December, 1st session, 2.30 p.m.-3.30 p.m.

2nd session, 3.40 p.m.-5.45 p.m.

3rd session, 6.30 p.m.-8.05 p.m.

29th December, 4th session, 10.50 a.m.-12.48 p.m.



FIRST SESSION

The present position and the Amnesty offer

6. Tunku Abdul Rahman opened the meeting by thanking the Communists for the confidence they had shown in coming out to the meeting. He reminded them that he was not standing in judgement over them but was there to explain the amnesty terms. He then detailed the political changes which had been taking place in the country and explained that his election victory was based on one big promise "that colonialism must end and that this country must be given freedom." He then mentioned the High Commissioner's announcement at the last Legislative Council meeting that self-government would be given to Malaya despite the Emergency. Since then the UMNO Assembly had passed a very important resolution to the effect that independence for Malaya must be given by the 31st August, 1957, and "I have no doubt in my mind whatsoever that we shall, if possible, achieve this aim and that there will be no conditions attached to that independence." He explained that the words "if possible" had been included to allow a

Sumber: Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 11

DOKUMEN-DOKUMEN ARSIP TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH
UNTUK MENGHINDARI PETANI-PETANI MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA PKM

REPORT ON THE SEMENYIH
INQUIRY
BY THE
STATE INFORMATION OFFICER, SELANGOR

These notes do not purport to give a full report of the Semenyih Inquiry. Their purpose is to give a general picture to those interested and who were not able to attend the Inquiry.

To give a full report would take about 1000 pages which we have not the time to write and the reader would not have the time to digest.

In general, the report is a precis but certain passages, which are considered of special significance, are given in full.



FIRST DAY
20th February 1956

The Inquiry was conducted by Mr. Justice J.S. Thomson, into the method of search used by the Security Forces in the Ulu Langat district with special reference to Semenyih during the period between January 1st and 18th 1956.

Mr. P.G. Clough, represented the Legal Department; Mr. Bernard Sheldon, represented the police and Home Guard; Mr. Paul Register, represented the Military; Mr. Ng Ek Tiong and Mr. Eugene Lye, for a number of woman rubber tappers who made complaints of the manner in which they were searched; Mr. Yong Pung How and Miss Ginn Chit Kwa for the Semenyih New Village Council; Mr. K.L. Devasar, for the Alliance and Miss P.G. Lim, for the Labour Party.

A crowd of 1500 to 2000 people, mainly Chinese and mainly tappers gathered in the compound outside the court.

When the proceedings opened the noise of the crowd was so loud that the Judge had to announce "We do not want to deprive the public of their rights but if they want to discuss what is going on they can do so outside the earshot of the court".

A few minutes later as the noise had not subsided the Judge announced "If people are going to remain congregated here and make so much noise it is going to be utterly impossible to carry on this Inquiry and I shall have to move it to Kuala Lumpur".

There was a short interruption in the proceeding while part of the crowd was moved further away from the court.

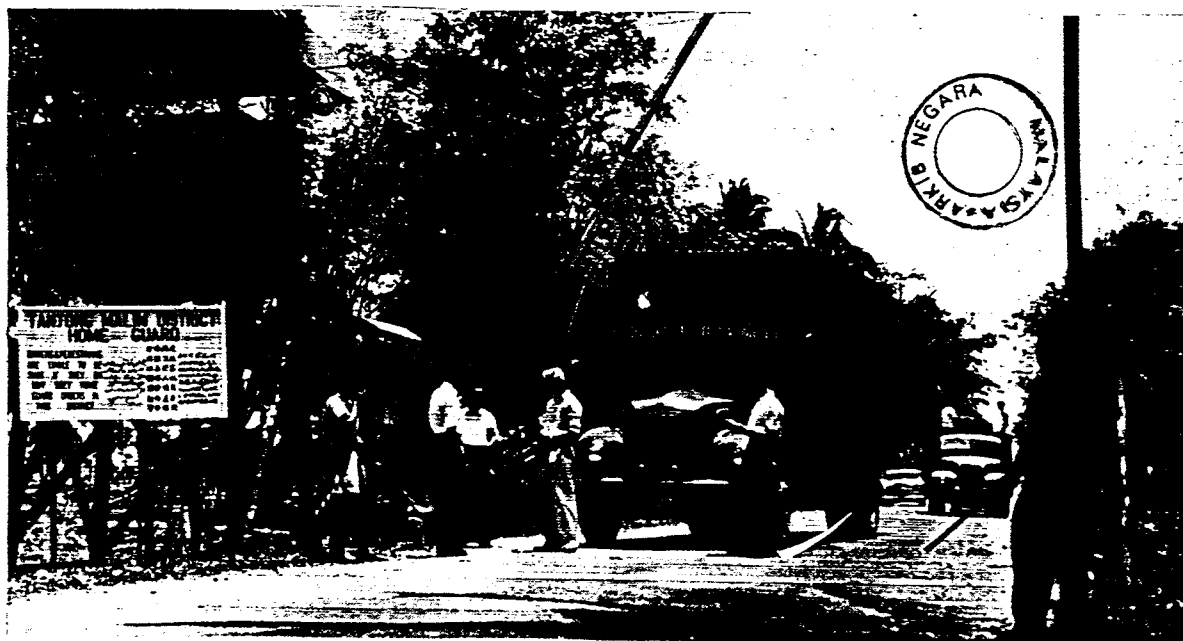
As the day wore on the crowd gradually diminished until by the afternoon only a few score remained.

Mr. Clough opened the proceedings by explaining the regulations under which searches were conducted and emphasised "These regulations provide that no woman shall be searched except by a woman."

Sumber: Koleksi Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 12

FOTO PASUKAN PENGAWAL KAMPUNG (HOME GUARDS) DAN
SALAH SATU TUGASNYA MEMBANTU PEMERINTAH
MEMBERANTAS KOMUNIS SELAMA DARURAT 1948-1960



Sumber: Foto-Foto Koleksi Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 13

FOTO-FOTO SEBAGIAN DARI TINDAK KEKERASAN
DAN KEKEJAMAN GERILYA PKM 1948-1960

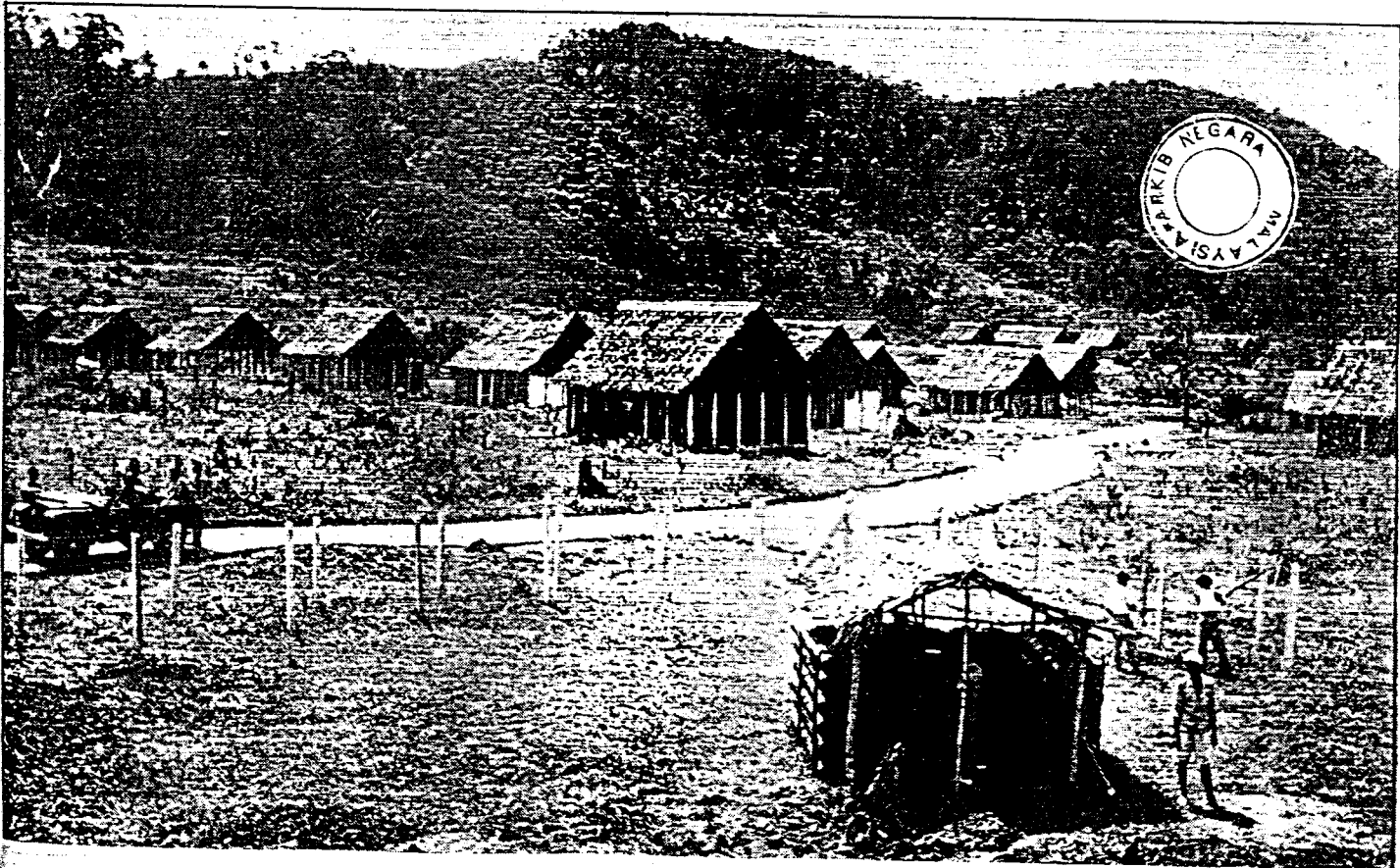


Sumber: Koleksi Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 14

PROGRAM PEMBENTUKAN 'KAMPUNG BARU'

Antara lain kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Rencana Briggs untuk mengantisipasi gerakan komunis di Malaya selama periode Darurat 1948-1960



Sumber: Foto-Foto Koleksi Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 15

PENGUMUMAN DAERAH ALOR STAR KEDAH SEBAGAI
"KAWASAN PUTIH" PADA 20 FEBRUARI 1954

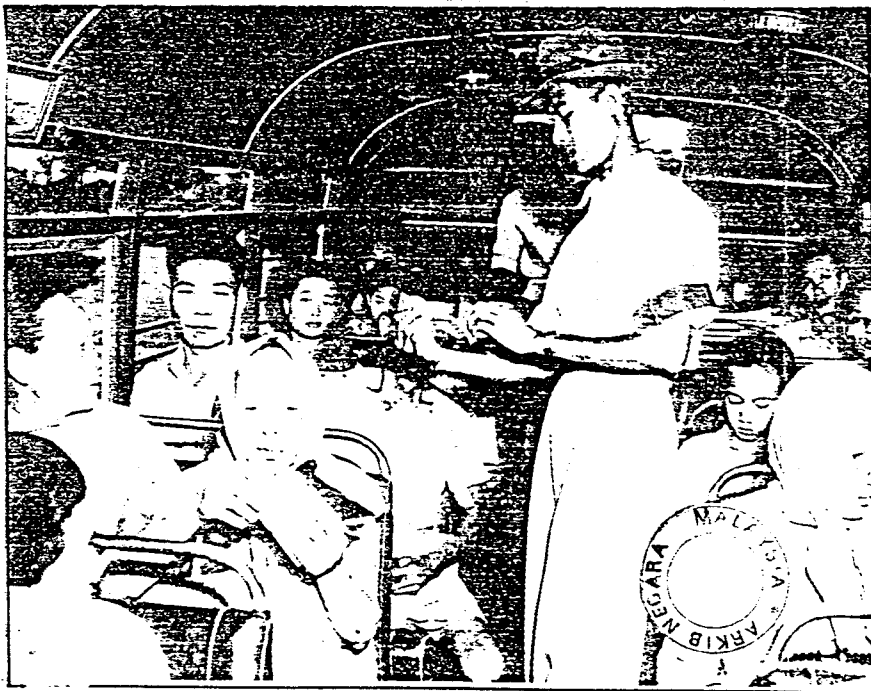


Sumber: Koleksi Gambar-Gambar Bersejarah, Arkib Negara
Malaysia, Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 16

OPERASI PEMERIKSAAN KTP

Pemeriksaan KTP setiap warga oleh aparat keamanan dalam suatu operasi mendadak yang dilakukan dalam sebuah angkutan umum. Ini merupakan sebagian dari langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi gerakan komunis di Malaya selama Darurat 1948-1960.

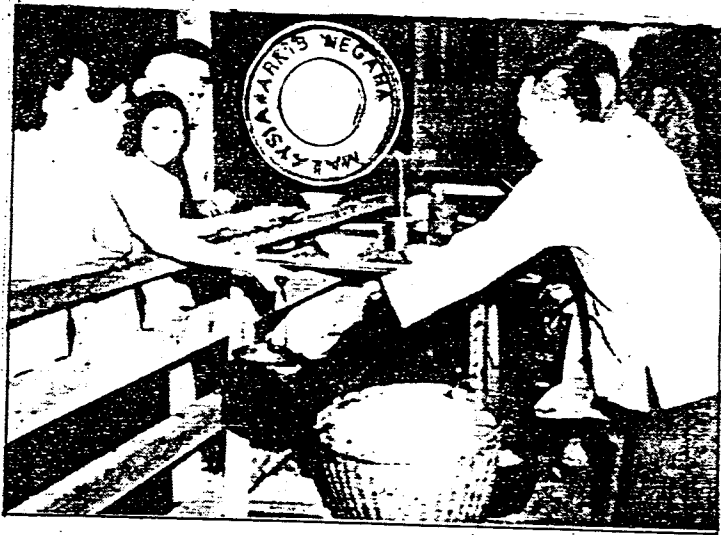


Sumber: Foto Koleksi Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur

LAMPIRAN 17

UPAYA PENJATAHAN KEPERLUAN MAKANAN SELAMA
PERIODE DARURAT 1948-1960

Tindakan ini dilakukan terutama di daerah-daerah "Kampung Baru", dengan cara melakukan pengawasan ketat dan pembatasan terhadap proses distribusi keperluan makanan. Ini bertujuan untuk menghindari keperluan makanan dapat tersalur ke pihak komunis, selain bertujuan untuk melumpuhkan pengaruh dan kekuatan gerilya-gerilya PKM selama periode Darurat antara tahun 1948 - 1960.



Sumber: Foto Koleksi Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur

LAMPIRAN 18

PENGUMUMAN BERAKHIRNYA KEADAAN DARURAT DI MALAYA
SUNDAY TIMES TANGGAL 31 JULI 1960.

BACK TO NORMAL—official

PROCLAMATION IS SIGNED

Enemy must never be allowed to return—Tengku

KUALA LUMPUR, Saturday.

A 176-WORD proclamation repealing the 12-year-old Emergency Regulations Ordinance was signed today by Tengku Abdul Rahman.

The solemn, historical 10-minute ceremony which ended the Emergency and signified the defeat of the Malayan Communist Party was held in the Cabinet Room of Parliament House under the leadership of the Malaysian Film Unit.

It was witnessed by the entire Cabinet, Police and Service Chiefs and the Press.

The Tengku, smiling broadly, read the proclamation twice — first in the national language and then in English—before signing it.

Then, in a message to the nation he referred to three lessons learned during the dark days of the terrorist war which, he said, Malaysians young or old must never forget.

These were Unity, Unity and Vigilance. With these qualities the country had won independence, it had won the battle of the Emergency and could now face the future with faith and hope.

But, following the advice came this warning: "Be wary of those Communists who are still lurking around us, spread and encouraged by the unthinking actions of irresponsible politicians."

"I am proud to say that, through unity and many Malays has shown the Communist world that it has a way of life far better and more powerful than anything the Communists are able to produce or promise," the Tengku said.

'Common effort'

"I encourage the people to "go forward" with the Government in a spirit of co-operation and confidence."

"This was essential so that "this enemy of ours be never return to strike at us again," he added.

Remembering the Tengku said, all Malays would celebrate the end of 12 years of armed struggle against the evil forces of Communism.



'A hard-earned victory'

The day would also mark the end of 12 years of trials and tribulations borne by the people in defying the Emergency.

"Let us never forget that the hard-earned victory we celebrate tomorrow has been brought about by the common effort and co-operation of the Armed Forces, the people and the friendly forces from the Commonwealth.

"This factor of unity and co-operation was one which the Communists found it hard to see when I offered them terms of surrender in my meeting with Chiu Ping at Saling in December, 1954.

"If he had see it, then he did not believe it was hopeful, however, that the people would go along with me when the negotiations broke down, and I was not disappointed.

"I had declared my belief in the Legislative Council three months before I went to Saling. I thank God that my prayers and your prayers have been answered.

Therefore on our Victory Day, second only in importance to the Day of Merdeka, we celebrate with joy and thankfulness to Almighty God, the Redeemer and the Merciful, for our success.

'Red day of shame'

"Praise be to God and to those who gave their support in faith and confidence in the course of their duty to bring an end to the Emergency."

"The Communists will remember these celebrations, for they will hate this day. To them our Victory Day is a day of sorrow and defeat, of humiliation and bitter shame.

"We in Malaya as a nation will honour and remember this Day of Victory."

SEE PAGE 4—COLUMN 1

THE Minister for Finance, Mr. Tan Siew Sin, and the Deputy Prime Minister, Tan Abdul Razak, look on as a leading Press Minister signs the proclamation ending the Emergency Regulations in the Cabinet Room at Parliament House. — Sunday Times picture.

STOP PRESS

U.M. HAS DONE IT AGAIN!

U.M. has

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1969, di Batu Kikir Negeri Sembilan, Malaysia. Merupakan puteri ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Darus Bin Haji Hassan dan Sukeah Binti Abdullah.

Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Serting Ulu, Batu Kikir, Negeri Sembilan Darul Khusus (1976-1981). Kemudian melanjutkan pendidikan menengah tingkat pertama dan menengah atas di Sekolah Menengah Batu Kikir Negeri Sembilan, mulai tahun 1982 sampai lulus pada tahun 1986. Jalur Pendidikan Pra-University / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (High School Certificate) diperoleh pada sekolah yang sama sehingga lulus pada tahun 1988.

Pada tahun 1990, penulis mendapat tawaran untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang Sejarah, pada Jurusan Sejarah & Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujungpandang, di bawah "Program Government To Government" kerjasama di bidang pendidikan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia, dengan beasiswa dari pihak Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA).

Selama mendalami ilmu di Universitas Hasanuddin, penulis aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, seminar, simposium, dan kegiatan ilmiah lainnya, baik di tingkat Jurusan, Universitas, regional maupun di tingkat nasional. Antara lain menghadiri dan menjadi peserta pada Simposium Kerjasama ASEAN Dalam Menghadapi Tantangan Era Pasifik (1990), Simposium dan Temu Ilmiah Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sulawesi Selatan (1990), Penelitian Studi Budaya Tana Toa (1991), Seminar Sejarah Militer Sulawesi

Selatan (1992), Pelatihan Penelitian Sejarah I Se-kota Madya Ujungpandang (1992), Dialog Perdamaian Dunia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dan Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah Se - Indonesia yang berlangsung di Ujungpandang pada tahun 1993, di samping beberapa kegiatan ilmiah lainnya.

Selain itu, penulis juga aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan, antara lain seperti Himpunan Mahasiswa Sejarah & Arkeologi (HIMSA) Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin dan Kelompok Studi Sejarah (KSS) pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin 1991-1993. Di samping terlibat secara aktif dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Malaysia di Indonesia/National Association of Malaysian Students in Indonesia (1990-1993).